



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berlandaskan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;





- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; dan
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### **I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro.
- 2.2. Kebijakan Keuangan.
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah.

#### **V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

- 5.1. Penjelasan Atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD
- 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
- 5.3. Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca
- 5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas



5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas

## **VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah**

6.1 Penetapan Manajemen Selama Tahun Berjalan.

6.2 Pergeseran Anggaran.

6.3 Penerapan Kebijakan.

6.4 Pengungkapan Lainnya.

## **VII Penutup**





## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Malinau Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,30%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,14%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,285% (Provinsi Kalimantan Utara);
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,32%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,70%<sup>xx</sup>;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,33%; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 12.323,07 miliar rupiah<sup>xx</sup>.

- <sup>xx</sup>=Angka sangat sementara

##### 2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.





**Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(turun) (%)
1	Kabupaten Malinau (%)	6,63	7,30	0,67
2	Kabupaten Malinau (Ribu Orang)	6,16	6,39	0,23
3	Provinsi (%)	6,8	7,36	0,56
4	Nasional (%)	10,19	9,71	(0,48)
5	Peringkat Provinsi	4	4	-
6	Peringkat Nasional	123	137	14

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau pada Tahun 2020 sebesar 6,63% mengalami kenaikan sebesar 0,67%, dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin meningkat hingga menjadi 7,30%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau masih di bawah provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang agar mendapat prioritas lebih untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malinau**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malinau	1,16	0,85	(0,31)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,84	0,87	0,03
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	(0,08)
4	Peringkat Provinsi	3	4	(1)
5	Peringkat Nasional	208	110	-(98)

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

**Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Malinau**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Malinau	0,28	0,23	(0,05)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,17	0,18	0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,47	0,42	(0,05)
4	Peringkat Provinsi	4	3	(1)
5	Peringkat Nasional	366	162	(204)

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

### 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan



tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah sebesar 5,08%, sebagaimana dijelaskan **Tabel 2.4**.

**Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau (%)	5,08	4,14	(0,94)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,97	4,58	(0,39)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	(0,58)
4	Peringkat Provinsi	4	4	-

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Malinau Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,14%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 5,08% atau lebih tinggi 0,94% dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. TPT Kabupaten Malinau di Tahun 2020 ini bahkan lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Utara yang sebesar 4,58%.

### 2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan keterangan bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau tidak melakukan survey pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Malinau sebab survey dilakukan hanya BPS Provinsi Kalimantan Utara, sesuai data sebagaimana dijelaskan **Tabel 2.5**.



**Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Malinau**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kabupaten Malinau	-	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,3	0,285	(0,015)
3	Tingkat Nasional	0,385	0,381	(0,004)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk tingkat Provinsi Kaltara yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,285 Angka ini turun 0,015 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2020 yang sebesar 0,300 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional.

#### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah ( $< 60$ );
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ );
- Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ); dan
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Malinau Tahun 2021 adalah sebesar 72,32 poin dengan tetap kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel 2.6**.

**Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
1	Kabupaten/Kota	71,94	72,32	0,38
2	Provinsi	70,63	71,19	0,56
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	0,35
4	Peringkat Provinsi	2	2	-
5	Peringkat Nasional	172	154	18

Sumber Dokumen BPS Prov/Kab

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Malinau dibandingkan Tahun 2020 sebesar 71,94 poin mengalami kenaikan sebesar 0,38 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,49 tahun pada Tahun 2021, lebih lama 0,05 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,40



tahun dengan harapan lama sekolah 13,31 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp9.928.000,00 atau meningkat Rp317.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Malinau pada saat ini tetap berada pada urutan 2 dari 5 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan berada pada urutan 154 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

### 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau

No	Uraian	Kabupaten Malinau (miliar rupiah)		Provinsi (miliar rupiah)	Nasional (miliar rupiah)
		Tahun 2020 <sup>R</sup>	Tahun 2021 <sup>xx</sup>	Tahun 2021 <sup>xx</sup>	Tahun 2021 <sup>xx</sup>
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	7.822,76	8.190,17	60.162,97	11.118.868,5
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(0,34)	4,70	3,98	3,7
3	Peringkat Provinsi	4	2	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab

R=Angka revisi

x=Angka sementara

xx=Angka sangat sementara

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2021 perekonomian Kabupaten Malinau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,3%. Pada periode Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Malinau sebesar negatif (-) 0,34% dan pada Tahun 2021 laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Malinau bertumbuh sebesar 4,70%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Malinau turun menempati urutan 2 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau salah satunya disebabkan oleh menurunnya COVID-19 sehingga meningkatkan kembali gairah pelaku ekonomi.





### 2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Malinau dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Onflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau tidak melakukan survei untuk Tingkat Inflasi Kabupaten, sebab survei inflasi hanya dilakukan di tingkat Kota sehingga data yang digunakan adalah Kota Tarakan dan Tanjung Selor. Inflasi Tahun 2021 menggunakan data Tanjung Selor adalah sebesar 2,83% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel 2.8**.

**Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Malinau**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Malinau/Tanjung Selor (%)	1,96	2,83	0,87
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,32	2,73	1,41
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,9	1,87	(0,03)
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov

Tingkat inflasi di Kabupaten Malinau Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,83%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,96% atau lebih tinggi 0,87% dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Dengan demikian inflasi Kabupaten Malinau masih lebih tinggi 0,1% dibandingkan tingkat inflasi Provinsi dan sebesar 0,96% dari tingkat inflasi Nasional.

### 2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau

Struktur perekonomian Kabupaten Malinau dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.





**Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
Dalam miliar rupiah**

No	Uraian	Tahun 2019 <sup>R</sup>	Tahun 2020 <sup>x</sup>	Tahun 2021 <sup>xx</sup>
		(miliar rupiah)	(miliar rupiah)	(miliar rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1168.90	1278.36	1420.13
2	Pertambangan dan Penggalian	5294.14	5358.41	6021.15
3	Industri Pengolahan	275.89	288.05	312.05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.86	4.47	4.62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7.17	8.54	9.75
6	Konstruksi	1715.32	1919.64	2002.90
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	444.15	491.93	575.97
8	Transportasi dan Pergudangan	337.51	346.15	366.24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	195.04	204.40	246.62
10	Informasi dan Komunikasi	34.98	40.46	48.21
11	Jasa Keuangan	22.55	24.53	29.13
12	Real Estate	24.67	26.19	29.47
13	Jasa Perusahaan	15.94	17.35	19.43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	696.92	713.20	760.18
15	Jasa Pendidikan	238.13	257.41	282.90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135.65	159.24	184.01
17	Jasa Lainnya	7.55	8.98	10.73
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1168.90	1278.36	1420.13
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	10618.38	11147.29	12323.48
20	PDRB Provinsi	57.459,31	61.422,64	60.743,20
21	PDRB Nasional	10.425.851,90	10.949.037,80	10.722.442,70
22	Peringkat Provinsi	4	4	4
23	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab

R=Angka revisi

x=Angka sementara

xx=Angka sangat sementara

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,55 persen dibandingkan tahun 2020 menjadi 12,323,48 miliar rupiah. Kenaikan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman seperti Hotel dan Restoran/ Rumah Makan. Hal tersebut sejalan dengan mulai melonggarnya peraturan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama pandemi COVID-19, sehingga acara-acara besar yang sebelumnya dilarang selama tahun 2020, dapat dilaksanakan pada tahun 2021. Hal tersebut juga mengakibatkan loncatan pada jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Malinau.





## 2.2. Kebijakan Keuangan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Pembangunan tersebut telah memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau secara berkeadilan dan bermanfaat menuju masyarakat madani dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sistem yang menyeluruh mengenai pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows functions*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah, yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN. Selain itu, agar keuangan Pemerintah Daerah dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan dengan selalu menggali potensi pendapatan daerah juga melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

Pada Tahun 2010, Pemerintah menyelenggarakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash to accrual*).





Di Tahun 2021 merupakan masa transisi peralihan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mencabut Permendagri 13 Tahun 2005 secara menyeluruh berikut peraturan pendukungnya sampai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Malinau. Mengingat Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah masih dalam proses maka di Tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Malinau mengacu pada aturan lebih tinggi yang berlaku.

### 2.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah, serta hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malinau diarahkan pada:

#### a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang semua itu merupakan keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalan sumber-sumber penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pendapatan yang ada dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi pajak daerah dapat dilakukan antara lain:

1. Pajak reklame, melalui *updating* jumlah perusahaan dan pengukuran di lapangan bagi papan nama/reklame dan menghitung/menyesuaikan kembali besaran kewajiban membayar pajak reklame kepada pemerintah daerah;
2. Pajak penerangan jalan, dengan cara memasukkan penggunaan listrik non-PLN (perorangan maupun listrik perusahaan) menjadi obyek pajak penerangan jalan umum (PPJU);
3. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, potensi pendapatan dapat ditingkatkan melalui inventarisasi potensi bahan galian golongan C seperti pasir, batu koral, andesit, batu gunung, tanah urug dan proyek daerah; dan
4. Pajak pendaftaran perusahaan, masih dapat dioptimalkan dengan cara mengenakan ketentuan pendaftaran ulang perusahaan khususnya bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Malinau baik bagi perusahaan yang berstatus kantor pusat, kantor induk, kantor cabang maupun kantor perwakilan.





Selain dari Pajak Daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kreativitas untuk memperluas cakupan pungutan pada jenis-jenis retribusi lainnya perlu dilakukan, disamping intensifikasi pemungutan terhadap retribusi yang ada.

Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi retribusi, yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, antara lain:

1. Retribusi kebersihan, masih dapat dioptimalkan dengan cara memperbaiki sistem penarikannya, yaitu melalui pembayaran rekening listrik atau air bersih yang besarnya disesuaikan;
2. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil dapat ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sampai ke level desa;
3. Retribusi parkir di tepi jalan umum, obyek ini dapat ditingkatkan dengan cara menginventarisir seluruh jumlah kendaraan bermotor (roda 4 dan roda 2) dan mengenakan retribusi parkir pada saat pengurusan/ pembaharuan STNK yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas parkir;
4. Retribusi pelayanan pelabuhan dan bandar udara, mengoptimalkannya dengan peningkatan fasilitas pelabuhan beserta sarana dan prasarananya;
5. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dioptimalkan dengan peningkatan harga/tarif yang wajar bagi pemakaian kekayaan daerah, seperti sewa gedung milik pemerintah, tanah, rumah dinas, petak kios pasar, kendaraan dan alat berat; dan
6. Retribusi IMB, melalui peninjauan lapangan untuk updating ulang bangunan dan penggunaannya (tempat tinggal, usaha pertokoan, kantor perusahaan, dan usaha lainnya).

Selain dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan melalui optimalisasi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penerimaan PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dikontribusi oleh pendapatan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah Intimung yang telah melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2005. Sumber pendapatan dari BUMD yang terbesar diperoleh dari bagian laba/deviden BPD Kalimantan Timur, optimalisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dilakukan terhadap:

1. PDAM Kabupaten Malinau sangat dimungkinkan karena jumlah pelanggan cukup besar dan bertambah setiap tahunnya, asalkan beroperasi lebih efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan komersial; dan
2. Perusda Intimung diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya.





Sehingga kedepannya kedua BUMD tersebut di atas akan berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dan tidak membebani Keuangan Pemerintah Daerah.

**b. Peningkatan Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan selain untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan antar pemerintah daerah.

Sampai saat ini peranan Dana Perimbangan terhadap struktur pendapatan Pemerintah Kabupaten Malinau relatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Dengan kata lain, sumber-sumber pembiayaan tugas-tugas rutin dan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Malinau berasal dan tergantung dari dana Pemerintah Pusat. Langkah antisipasi apabila suatu saat nanti dana perimbangan semakin kecil bahkan tidak ada lagi maka Pemerintah Daerah tentunya harus tetap berupaya untuk menciptakan kemandirian melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan manajemen pemerintahan.

**c. Peningkatan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah**

Sumber-sumber Pendapatan Lain-lain yang memiliki potensi untuk ditingkatkan, antara lain adalah penerimaan dari penyewaan aset Pemerintah Daerah dan penerimaan lain yang tidak termasuk dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi tersebut yang masih bisa ditingkatkan antara lain sektor pariwisata, perluasan lahan pertanian, penggemukan sapi, hasil kebun percontohan, dan penjualan besi tua.

### 2.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Pada era sekarang ini, pengelolaan belanja daerah dan setiap aktivitas pemerintah perlu disajikan secara transparan dan akuntabel. Perspektif perubahan yang diinginkan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan belanja daerah pada khususnya dalam lima tahun kedepannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan atas dasar tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini terlihat dengan pengalokasian anggaran yang berbasis kinerja dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan belanja daerah;
- c. Penyesuaian kerangka hukum dan administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercipta sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah dengan pembangunan daerah;





- d. Tersedianya ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan;
- e. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
- f. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
- g. Pembinaan dan pengawasan, berperannya asosiasi dan anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah; dan
- h. Pengembangan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah melalui teknologi informasi untuk menunjang jalannya pemerintah yang terpadu dan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan manifestasi pengelolaan belanja daerah adalah merupakan rencana keuangan tahunan daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, terutama kegiatan yang berkaitan pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam pengelolaan belanja daerah haruslah ditekankan pada semangat (1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kuantitas dan kualitas pelayanan dan kesejahteraan itu terus semakin baik; (2) mengembangkan kehidupan demokratis, berkeadilan dan pemerataan; (3) memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam perkembangannya di awal pelaksanaan anggaran tahun 2020 terjadi suatu kondisi yaitu pandemi COVID-19 yang dirasakan secara global termasuk Indonesia sehingga memaksa Pemerintah mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga desa merefocusing anggaran awal untuk dialokasikan ke penanganan COVID-19 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.

### 2.2.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi ini, diharapkan dapat menjadi spirit bagi Pemerintah Daerah untuk aktif dan membenahi diri dengan melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit, sedangkan di sisi lain Pemerintah Daerah hanya memiliki dana yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana, baik melalui pinjaman daerah maupun obligasi daerah.

Agar pinjaman tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan jangka menengah di Kabupaten Malinau, maka perlu dikendalikan serta dalam pelaksanaannya harus hati-hati, misalnya : (1) syarat pinjaman hendaknya dengan bunga lunak dan ada masa tenggang; (2) tujuan





pinjaman hendaknya benar-benar digunakan untuk kegiatan yang benar-benar sangat prioritas dan mendesak; (3) tata cara peminjaman tidak berbelit-belit sehingga tidak mengakibatkan biaya tinggi dan tidak merugikan; (4) tidak mempunyai persyaratan politik; dan (5) memerlukan pengawasan yang efektif dan efisien.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### 2.3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi

Tugas-tugas umum pemerintahan yang berupa pelayanan publik belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK); dan
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

#### Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1.  $N \geq 85\%$  : Sangat Berhasil
2.  $70\% < N < 85\%$  : Berhasil
3.  $55\% < N < 70\%$  : Cukup Berhasil





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4. N < 55% : Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

**Tabel 2.10**  
**Capaian Kinerja Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,29	13,28	99,9%
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,07	8,95	98,6%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	73,00	71,49	97,93%
		Prevalensi Balita Stunting	19	11,04	141,89%
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,04	7,30	96,30%
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang	40,21	37,09	92,24%
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	25,04	45,10	180%
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	100	100	100%
6	Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	100	95,41	95,41
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan masyarakat perkapita	130.147.622	143.900.000	151,2%
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,296	0,341	84,4%
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,47	4,14	151,12%
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	100	100	100%
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	8,26	11,05	133%
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	18,70	22,72	121,49%
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	1:250	1:290	86,21%
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0	0	0%
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<1,0	3,39	342,42%
		Indeks kualitas udara (ISPU)	0-50	96,21	192,42%
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP	A	CC	
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi	0	0
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	100	74,46	74,46%
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	85	74,82	88,03
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	95	97	102,1%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	8.000	15.811	197%
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	100	100	100%
22	Meningkatnya pelestarian	Persentase situs budaya yang	100	0	0%





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	kebudayaan daerah	terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya)			
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100%

Ket : Data sebelum direviu

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021, Bagian Organisasi Setkab Malinau

### 2.3.2. Pencapaian Kinerja Keuangan

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pelayanan umum maupun pelayanan kepada aparatur telah dianggarkan belanja daerah seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Dari anggaran belanja yang dialokasikan, maka dapat dilihat kinerja capaian keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan rincian pada **Tabel 2.11**.

**Tabel 2.11**  
**Alokasi Anggaran Menurut Urusan pada Unit Kerja**  
**Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
<b>PELAYANAN UMUM</b>	<b>687.623.478.191,00</b>	<b>636.825.799.019,00</b>	<b>(50.797.679.172,00)</b>	<b>92,62</b>
Pangan	5.974.248.794,00	5.611.914.325,00	(362.334.469,00)	93,94
Komunikasi dan Informatika	7.865.144.402,00	7.687.973.512,00	(177.170.890,00)	97,75
Kearsipan	109.697.000,00	109.697.000,00	0,00	100,00
Administrasi Pemerintahan	104.506.355.409,00	99.096.103.010,00	(5.410.252.399,00)	94,82
Pengawasan	10.361.088.304,00	8.602.776.888,00	(1.758.311.416,00)	83,03
Perencanaan	12.973.729.045,00	12.374.062.384,00	(599.666.661,00)	95,38
Keuangan	436.521.298.639,00	399.559.594.820,00	(36.961.703.819,00)	91,53
Kepegawaian	10.136.958.234,00	8.862.219.026,00	(1.274.739.208,00)	87,42
Pendidikan dan Pelatihan	809.303.625,00	507.726.950,00	(301.576.675,00)	62,74
Penelitian dan Pengembangan	207.985.290,00	171.469.597,00	(36.515.693,00)	82,44
Sekretariat DPRD	46.909.743.901,00	44.228.328.662,00	(2.681.415.239,00)	94,28
Penghubung	3.902.813.186,00	3.562.958.978,00	(339.854.208,00)	91,29
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	47.345.112.362,00	46.450.973.867,00	(894.138.495,00)	98,11
<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>51.293.175.440,00</b>	<b>50.199.732.289,00</b>	<b>(1.093.443.151,00)</b>	<b>97,87</b>
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	44.644.951.414,00	44.063.143.659,00	(581.807.755,00)	98,70
Pengelola Perbatasan Daerah	98.534.000,00	52.232.400,00	(46.301.600,00)	53,01
Kesatuan Bangsa dan Politik	6.549.690.026,00	6.084.356.230,00	(465.333.796,00)	92,90
<b>EKONOMI</b>	<b>71.289.157.602,00</b>	<b>66.738.415.933,00</b>	<b>(4.550.741.669,00)</b>	<b>93,62</b>
Tenaga Kerja	9.677.940.967,00	9.524.888.927,00	(153.052.040,00)	98,42
Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.591.184.759,00	9.905.944.946,00	(685.239.813,00)	93,53
Perhubungan	11.372.263.355,00	10.942.019.963,00	(430.243.392,00)	96,22
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.326.215.825,00	2.146.296.225,00	(179.919.600,00)	92,27





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
Penanaman Modal	5.000.730.395,00	4.250.626.421,00	(750.103.974,00)	85,00
Kelautan dan Perikanan	5.846.822.301,00	5.706.572.041,00	(140.250.260,00)	97,60
Pertanian	16.431.389.414,00	14.916.347.172,00	(1.515.042.242,00)	90,78
Perdagangan	7.574.487.886,00	7.228.141.116,00	(346.346.770,00)	95,43
Perindustrian	2.468.122.700,00	2.117.579.122,00	(350.543.578,00)	85,80
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>27.861.465.450,00</b>	<b>17.533.007.383,00</b>	<b>(10.328.458.067,00)</b>	<b>62,93</b>
Lingkungan Hidup	27.861.465.450,00	17.533.007.383,00	(10.328.458.067,00)	62,93
<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	<b>100.191.536.669,00</b>	<b>92.730.406.693,00</b>	<b>(7.461.129.976,00)</b>	<b>92,55</b>
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.239.666.669,00	91.778.706.693,00	(7.460.959.976,00)	92,48
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	951.870.000,00	951.700.000,00	(170.000,00)	99,98
<b>KESEHATAN</b>	<b>233.038.463.277,00</b>	<b>215.898.727.353,19</b>	<b>(17.139.735.923,81)</b>	<b>92,64</b>
Kesehatan	230.563.586.277,00	214.582.241.503,19	(15.981.344.773,81)	93,06
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.474.877.000,00	1.316.485.850,00	(1.158.391.150,00)	53,19
<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	<b>6.216.390.162,00</b>	<b>5.919.873.891,00</b>	<b>(296.516.271,00)</b>	<b>95,23</b>
Kebudayaan	6.084.810.162,00	5.789.043.891,00	(295.766.271,00)	95,14
Pariwisata	131.580.000,00	130.830.000,00	(750.000,00)	99,43
<b>PENDIDIKAN</b>	<b>264.830.117.459,00</b>	<b>254.911.632.027,00</b>	<b>(9.918.485.432,00)</b>	<b>96,25</b>
Pendidikan	252.191.556.871,00	242.549.567.025,00	(9.641.989.846,00)	96,18
Kepemudaan dan Olah Raga	7.659.409.052,00	7.512.121.311,00	(147.287.741,00)	98,08
Perpustakaan	4.979.151.536,00	4.849.943.691,00	(129.207.845,00)	97,41
<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>13.338.262.100,00</b>	<b>12.793.591.223,00</b>	<b>(544.670.877,00)</b>	<b>95,92</b>
Sosial	653.192.350,00	626.843.350,00	(26.349.000,00)	95,97
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.618.770.964,00	5.373.823.492,00	(244.947.472,00)	95,64
Administrasi Kependudukan dan Capil	7.066.298.786,00	6.792.924.381,00	(273.374.405,00)	96,13
<b>JUMLAH</b>	<b>1.455.682.046.350,00</b>	<b>1.353.551.185.811,19</b>	<b>(102.130.860.538,81)</b>	<b>92,98</b>

Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 diperoleh realisasi sebesar Rp1.353.529.079.491,19 dari total anggaran sebesar Rp1.455.682.046.350,00. Dari anggaran tersebut yang dialokasikan untuk dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp41.113.219.587,00 dengan realisasi sebesar Rp36.215.868.910,00 atau 88,09%, berikut rincian alokasi untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp27.884.682.447,00 dengan realisasi sebesar Rp27.560.978.247,00 atau 98,84%, dan alokasi untuk Program Dukungan Ekonomi sebesar Rp13.228.537.140,00 dengan realisasi sebesar Rp8.654.890.663,00 atau 65,43%.





### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

No. Rekening	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.357.613.033.544,00</b>	<b>1.419.812.373.811,41</b>	<b>104,58</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>47.446.020.648,00</b>	<b>74.809.719.548,04</b>	<b>157,67</b>
4.1.1	Pajak Daerah	11.717.281.000,00	13.866.537.016,00	118,34
4.1.2	Retribusi Daerah	1.650.722.500,00	2.408.229.534,00	145,89
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.325.430.716,00	3.503.009.671,36	105,34
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	30.752.586.432,00	55.031.943.326,68	178,95
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.292.477.012.896,00</b>	<b>1.324.456.400.263,37</b>	<b>102,47</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.239.581.673.000,00	1.263.641.709.413,00	101,94
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.048.810.838.000,00	1.072.870.874.413,00	102,29
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	19.625.186.000,00	19.625.186.000,00	100,00
4.2.1.5	Dana Desa	171.145.649.000,00	171.145.649.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.895.339.896,00	60.814.690.850,37	114,97
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986,00	48.631.549.939,90	119,45
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	12.183.140.910,00	12.183.140.910,47	100,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.690.000.000,00</b>	<b>20.546.254.000,00</b>	<b>116,15</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	2.511.000.000,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.690.000.000,00	18.035.254.000,00	101,95
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.455.682.046.350,00</b>	<b>1.353.551.185.811,19</b>	<b>92,98</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>981.783.830.390,00</b>	<b>900.121.416.079,19</b>	<b>91,68</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	543.355.773.950,00	505.155.869.372,00	92,97
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	407.119.218.104,00	368.895.538.503,19	90,61
5.1.4	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.393.507.500,00	47,87
5.1.5	Belanja Hibah	23.259.625.136,00	20.982.118.202,00	90,21
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.049.213.200,00	2.694.382.502,00	88,36
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>111.172.312.460,00</b>	<b>101.357.607.237,00</b>	<b>91,17</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.444.091.277,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.895.084.300,00	54.902.417.219,00	91,66
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.445.773.681,00	14.725.005.950,00	84,40



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No. Rekening	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.311.695.700,00	30.695.745.068,00	98,03
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.075.667.502,00	1.034.439.000,00	96,17
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.946.518.500,00	25.292.777.495,00	70,36
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	35.946.518.500,00	25.292.777.495,00	70,36
5.4	BELANJA TRANSFER	326.779.385.000,00	326.779.385.000,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	326.779.385.000,00	326.779.385.000,00	100,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(98.069.012.806,00)</b>	<b>66.261.188.000,22</b>	<b>(67,57)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>101.069.012.806,00</b>	<b>100.581.169.024,69</b>	<b>99,52</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.069.012.806,00	100.581.169.024,69	99,52
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>98.069.012.806,00</b>	<b>97.581.169.024,69</b>	<b>99,50</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>163.842.357.024,91</b>	<b>0,00</b>

### 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pencapaian pendapatan di Tahun 2021 sebagian besar melebihi dari target yang ditetapkan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memang dianggarkan sedikit rendah dari tahun sebelumnya mengingat ditengah pandemi covid yang melanda dikhawatirkan tidak dapat terserap. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomian di Kabupaten Malinau dapat seiring kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penyebaran virus covid-19 serta ditambah dengan program-program pendukung ekonomi masyarakat sehingga kembali bergeliat mendekati normal.

Untuk realisasi belanja daerah awalnya tidak berjalan sesuai target salah satunya disebabkan *refocusing* anggaran yang penetapannya dilakukan ditengah periode tahun berjalan sehingga ada *stagnasi* dalam menjalankan kegiatan-kegiatan mengingat kepastian dan bahkan sampai dengan pengurangan anggaran bahkan kegiatan.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Malinau, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Kabupaten Malinau
- Alamat : Jl. Pusat Pemerintahan No. 01 Telp. 0553-21049
- Bupati : WEMPI W. MAWA, SE., M.H
- Sekretaris Daerah : Dr. Ernes Silvanus, S.Pi.,M.M

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Malinau meliputi seluruh unsur Entitas Akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Kabupaten Malinau, Entitas Akuntansi tersebut terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.

#### 4.1.1. Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi





dan standarisasi nasional. Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan lain-lain urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau mencabut peraturan daerah sebelumnya dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati yang mendukungnya diberlakukan secara efektif mulai Tahun 2017 yang dirubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian dirubah kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang meliputi:

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdiri atas:
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    - a) Bagian Hukum;
    - b) Bagian Tata Pemerintahan;
    - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
    - a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - b) Bagian Administrasi Pembangunan;
    - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  3. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
    - a) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
    - b) Bagian Organisasi;
    - c) Bagian Umum;





- d) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu:
1. Sekretariat DPRD.
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau, yaitu:
1. Inspektorat.
- d. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial;
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Dinas Ketenagakerjaan
  11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  13. Dinas Perhubungan;
  14. Dinas Ketahanan Pangan;
  15. Dinas Pertanian;
  16. Dinas Perikanan;
  17. Dinas Lingkungan Hidup;
  18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
  19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.





- e. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, yang terdiri atas:
  - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
  - 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:
  - 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, yang terdiri dari:
  - 1. Kecamatan Malinau Kota;
  - 2. Kecamatan Malinau Barat;
  - 3. Kecamatan Malinau Utara;
  - 4. Kecamatan Malinau Selatan;
  - 5. Kecamatan Mentarang;
  - 6. Kecamatan Mentarang Hulu;
  - 7. Kecamatan Pujungan;
  - 8. Kecamatan Bahau Hulu;
  - 9. Kecamatan Sungai Boh;
  - 10. Kecamatan Kayan Hulu;
  - 11. Kecamatan Kayan Hilir;
  - 12. Kecamatan Kayan Selatan;
  - 13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
  - 14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
  - 15. Kecamatan Sungai Tubu.
- h. Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008, yaitu:
  - 1. Sekretariat KPU.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau, yaitu:
  - 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah





- j. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah, yaitu:
  1. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
- k. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, yang terdiri dari:
  1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- l. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malinau
  1. Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.

#### 4.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau per 31 Desember 2021 sebanyak 3.450 orang terdiri dari Pria 1.825 orang dan Wanita 1.625 orang dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel 4.1 data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data PNS Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan

No.	GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	I/b/ Juru Muda Tingkat I	5	1	6
2	I/c/ Juru	9	0	9
3	I/d/ Juru Tingkat I	16	5	21
4	II/a/ Pengatur Muda	22	15	37
5	II/b/ Pengatur Muda Tk. I	87	67	154
6	II/c/ Pengatur	94	40	134
7	II/d/ Pengatur Tingkat I	194	174	368
8	III/a/ Penata Muda	340	406	746
9	III/b/ Penata Muda Tk.I	251	334	583
10	III/c/ Penata	264	223	487
11	III/d/ Penata Tingkat I	239	191	430
12	IV/a/ Pembina	187	125	312
13	IV/b/ Pembina Tingkat I	95	43	138
14	IV/c/ Pembina Utama Muda	21	1	22
15	IV/d/ Pembina Utama Madya	1	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>1.825</b>	<b>1.625</b>	<b>3.450</b>

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau





#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kabupaten Malinau menerapkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember dengan menggunakan asas akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020





#### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

##### 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

##### **Pengukuran**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA *bruto* (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas *bruto* dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

##### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;





3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;  
dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

##### **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Malinau dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* di mana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

##### **Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO *bruto* (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas *bruto* dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.





### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

#### **Pengakuan**

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, di mana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, di mana pengakuan beban dilakukan setelah





pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

#### **Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional;
3. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang





tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga;
2. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dan lembaga teknis daerah;
3. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat:

1. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh RKUD;
2. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, di mana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD;
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
4. Belanja badan layanan umum daerah diakui pada saat laporan belanja disahkan oleh PPKD/BUD.

#### **Pengukuran**

1. Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat sebesar nilai kas yang dibelanjakan;
2. Belanja dilaksanakan berdasarkan azas *bruto* dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.





### **Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya Bendahara Pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.





## **Pengakuan**

### **1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan**

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

### **2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

### **3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan**

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

### **4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan**

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
  - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.





## 5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

## 6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

## 7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspem dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

### Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.





Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **4.4.6. Kebijakan Akuntansi Investasi**

##### **a. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

##### **b. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;





- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen  
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
    - a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
    - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

### **Pengakuan**

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

### **Pengukuran dan Penilaian**

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Pengukuran investasi jangka pendek**

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:





- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
  - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

**b. Pengukuran investasi jangka panjang:**

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang non permanen:
  - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
  - b) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
  - c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar harga perolehan pada saat perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercantum di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
  - d) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (setelah dikurangi penyisihan) dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan umur tunggakan cicilan pokok dana bergulir dan persentase penyisihan sebagai berikut:





Tabel 4.2  
Besarnya Penyisihan atas Investasi yang Tidak Dapat Diterima Kembali  
Dihitung Berdasarkan Persentase

No	Kelompok Dana Bergulir	Umur tunggakan cicilan pokok dana bergulir	Persentase Penyisihan
1	Lancar	< 1 Tahun	0,5 %
2	Kurang Lancar	1 – 3 Tahun	10 %
3	Diragukan	3 – 5 Tahun	50 %
4	Macet	> 5 Tahun	100 %

- e) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar nilai perolehan. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- f) Penerimaan kembali dana bergulir yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.
- g) Suatu dana bergulir yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas dana bergulir yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.
- h) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
- i) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

**a. Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang





diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**b. Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

**c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat serta investasi nonpermanen-dana bergulir.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.





### **Pengungkapan**

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

Sedangkan hal-hal lain yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi nonpermanen-dana bergulir, antara lain:

1. Dasar penilaian dana bergulir;
2. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
3. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
4. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
5. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

#### **4.4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang**

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari debitor. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat **dari** sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi Daerah; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan, Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar





pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.

- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

#### **Pengakuan**

Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. **Piutang pajak dan retribusi daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- c. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh, maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- e. **Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
  - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa





yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

**f. Piutang Bagi Hasil dari provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan, maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

**g. Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

### Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
  - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan





harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;

c. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh, maka piutang atas DBH tidak disajikan;

d. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

**Pengukuran Piutang Berikutnya**

Pengukuran piutang berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.





Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Piutang pajak daerah: kualitas lancar jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun, kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, kualitas diragukan jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun, dan kualitas macet jika umur piutang lebih dari 5 tahun;
- Piutang retribusi daerah: kualitas lancar jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan, kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan, dan kualitas macet jika umur piutang lebih dari 12 bulan;
- Piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah: kualitas lancar jika belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, kualitas kurang lancar jika dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, kualitas diragukan jika apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua, dan kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga.

#### Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila





kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

### **Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
  - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
  - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.





Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal, maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit;
5. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *hair cut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel;





### **Pengungkapan**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusbukuan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### **4.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.





### Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

### Pengukuran

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinyu dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.
- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).





### **Penyajian dan Pengungkapan**

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### **4.4.9. Aset Non Lancar**

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non lancar meliputi:

- a. Investasi Jangka Panjang;
- b. Aset Tetap;
- c. Dana Cadangan; dan
- d. Aset Lainnya.

##### **4.2.9.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**  
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:
  - 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
  - 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
  - 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
  - 4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang





dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen;
- c. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
  - 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
  - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

#### 4.2.9.2 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.





## Pengakuan Aset Tetap

### 1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Harga perolehan aset tetap memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.





## 2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- Peralatan dan mesin sebesar sama dengan Rp1.000.000,00 ke atas atau lebih dari 10%;
- aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sama dengan sebesar Rp200.000,00 ke atas;
- Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi gedung/bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan sebesar sama dengan Rp10.000.000,00 ke atas.

### Pengukuran Aset Tetap

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penambahan masa manfaat atas perbaikan terhadap aset tetap yang mulai berlaku untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perubahan Masa Manfaat

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
<b>Alat Angkutan</b>			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
<b>Alat Pertanian</b>			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
<b>Alat laboratorium</b>			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektonika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
<b>Alat Persenjataan</b>			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<b>Komputer</b>			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
<b>Alat Eksplorasi</b>			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
<b>Alat Pengeboran</b>			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
<b>Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian</b>			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
<b>Alat Bantu Explorasi</b>			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
<b>Alat keselamatan Kerja</b>			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
<b>Alat Peraga</b>			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
<b>Peralatan Proses / Produksi</b>			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
<b>Rambu-Rambu</b>			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
<b>Peralatan Olah Raga</b>			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
<b>Bangunan Gedung</b>			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
<b>Monumen</b>			





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
<b>Bangunan Menara</b>			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
<b>Tugu Titik Kontrol / Prasasti</b>			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
<b>Jalan dan Jembatan</b>			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
<b>Bangunan Air</b>			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
<b>Instalasi</b>			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
<b>Jaringan</b>			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Masa manfaat aset tetap untuk menghitung tarif penyusutan masing-masing kelompok aset adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Perubahan Tarif Penyusutan**

URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
<b>Aset Tetap</b>	
<b>Peralatan Dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-Alat Bantu	7





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkutan Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	15
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan Dan Perlindungan	5





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
Rambu-Rambu	5
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	4
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	10
Alat Pengeboran Non Mesin	10
Sumur	10
Produksi	10
Pengolahan Dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	10
Alat Bantu Produksi	10
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat Sar	2
Alat Kerja Penerbangan	10
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	8
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
Peralatan Olah Raga	3
<b>Gedung Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)
<b>Jalan, Irigasi, Dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Instalasi Lain	5

#### 4.4.10. Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.





Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- 1) Utang Bunga;
- 2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 4) Utang Beban; dan
- 5) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Sedangkan kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka;





- 3) Utang Beban; dan
  - 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- 1) Utang Dalam Negeri;
- 2) Utang Luar Negeri; dan
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya

### **Pengakuan**

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

#### **1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)**

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

#### **2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)**

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai





sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

### 3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi, maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

### 4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:





- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan;
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Utang perhitungan pihak ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. **Utang Beban**, diakui pada saat:
  - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai





- dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang jangka pendek** lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang kepada pihak ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
- 1) barang yang dibeli sudah diterima; atau
  - 2) jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
  - 3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Kewajiban jangka panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

### Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya





konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;

- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. **Utang PFK**, pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. **Utang kepada pihak ketiga**, pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- c. **Utang transfer**, dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
- d. **Utang bunga atas utang pemerintah**, harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. **Bagian lancar hutang jangka panjang**, nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Pendapatan diterima dimuka**, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. **Utang Beban**, merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. **Kewajiban lancar lainnya**, merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang





telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - 1) Pengurangan pinjaman;
  - 2) Modifikasi persyaratan utang;
  - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
  - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
  - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.





## BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Malinau periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (Bagian pertama);
2. Laporan Operasional (Bagian kedua);
3. Neraca (Bagian ketiga);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (Bagian keempat);
5. Laporan Perubahan SAL (Bagian kelima);
6. Laporan Arus Kas (Bagian keenam); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

### 5.1 Penjelasan Atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD

Dalam laporan realisasi APBD, selain menyajikan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai pembanding, laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

<b>5.1.1. Pendapatan Daerah</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>Rp1.419.812.373.811,41</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>Rp1.462.640.670.308,85</b>
---------------------------------	---	---

Realisasi pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.419.812.373.811,41 atau 104,58% dari anggaran sebesar Rp1.357.613.033.544,00, dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.462.640.670.308,85 yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian realisasi pendapatan dapat disajikan pada **Tabel 5.1**.

**Tabel 5.1 Rincian Realisasi Pendapatan**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	47.446.020.648,00	74.809.719.548,04	157,67
Pendapatan Transfer	1.292.477.012.896,00	1.324.456.400.263,37	102,47
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.690.000.000,00	20.546.254.000,00	116,15
<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>1.357.613.033.544,00</b>	<b>1.419.812.373.811,41</b>	<b>104,58</b>





**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp74.809.719.548,04 Rp65.311.671.387,39

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp74.809.719.548,04 atau 157,67% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp47.446.020.648,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp65.311.671.387,39, maka realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp9.498.048.160,65 atau 14,54%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

**5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp13.866.537.016,00 Rp10.103.027.404,00

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp13.866.537.016,00 atau 118,34% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp11.717.281.000,00, dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2020 sebesar Rp10.103.027.404,00. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah disajikan pada **Tabel 5.2**.

**Tabel 5.2 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/(Turun)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	249.843.000,00	166.992.974,00	155.124.301	11.868.673,00
Pajak Restoran	5.746.620.000,00	4.750.167.224,00	4.273.000.920	477.166.304,00
Pajak Hiburan	43.274.000,00	26.421.725,00	31.066.200	(4.644.475,00)
Pajak Reklame	174.900.000,00	153.023.428,00	154.520.893	(1.497.465,00)
Pajak Penerangan Jalan	1.491.644.000,00	1.884.116.298,00	1.814.622.428	69.493.870,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.211.000.000,00	1.198.575.073,00	1.033.499.823	165.075.250,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.800.000.000,00	1.211.547.535,00	1.214.354.991	(2.807.456,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000,00	4.475.692.759,00	1.426.837.848	3.048.854.911,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.717.281.000,00</b>	<b>13.866.537.016,00</b>	<b>10.103.027.404,00</b>	<b>3.763.509.612,00</b>

Berdasarkan data pada tabel diatas realisasi pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, yakni sebesar Rp3.763.509.612,00 atau 37,25% dari tahun sebelumnya.



5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2021  
Rp2.408.229.534,00

31 Desember 2020  
Rp1.445.260.069,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.408.229.534,00, atau 145,89% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.650.722.500,00 dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.445.260.069,00. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada **Tabel 5.3**.

**Tabel 5.3 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	600.000.000,00	365.926.440,00	258.021.000,00	175.021.000,00	190.905.440,00
<i>Retribusi Surat izin Operasional di Bidang Kesehatan (SIK)</i>	0,00	0,00	0,00	81.800.000,00	(81.800.000,00)
<i>Retribusi Surat Izin Kesehatan Jasa Boga dan Catering</i>	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	38.437.500,00	460.000,00	460.000,00	37.977.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar	191.992.500,00	209.652.500,00	210.033.000,00	210.033.000,00	(380.500,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	29.000.000,00	43.560.000,00	73.545.000,00	73.545.000,00	(29.985.000,00)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	3.000.000,00	1.275.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(5.325.000,00)
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	18.520.000,00	35.560.000,00	23.210.000,00	0,00	35.560.000,00
<i>Retribusi Izin Lingkungan</i>	0,00	0,00	0,00	23.210.000,00	(23.210.000,00)
<i>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</i>	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	422.210.000,00	1.024.499.334,00	236.546.908,00	173.567.500,00	850.931.834,00
<i>Retribusi Pemakaian Kendaraan / Alat Berat</i>	0,00	0,00	0,00	60.668.058,00	(60.668.058,00)
<i>Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium</i>	0,00	0,00	0,00	2.311.350,00	(2.311.350,00)
Retribusi Terminal	33.500.000,00	0,00	10.215.000,00	10.215.000,00	(10.215.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Retribusi Surat Izin Usaha Hotel Berbintang dan Melati</i>	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250.000.000,00	525.427.000,00	497.301.000,00	497.301.000,00	28.126.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
<i>Retribusi Izin Pusat Kebugaran</i>	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	4.272.000,00	0,00	0,00
<i>Retribusi Leges</i>	0,00	0,00	0,00	4.272.000,00	(4.272.000,00)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	159.871.760,00	99.831.761,00	98.831.761,00	61.039.999,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00	1.800.000,00	2.650.000,00	2.500.000,00	(700.000,00)



Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Retribusi Izin usaha Jasa Kontruksi (IUK)	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	(5.850.000,00)
Retribusi Izin Pendaftaran Perusahaan (SIUP dan TDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi SITU	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	16.574.400,00	16.574.400,00	(16.574.400,00)
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.650.722.500,00</b>	<b>2.408.229.534,00</b>	<b>1.445.260.069,00</b>	<b>1.445.260.069,00</b>	<b>962.969.465,00</b>

Berdasarkan data di atas realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp962.969.465,00 atau 66,63% dari realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.445.260.069,00.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 pada Retribusi Daerah mengalami perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dari Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pada Tabel 5.3 untuk Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 telah disajikan realisasi berdasarkan dari Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tidak mengakomodir semua kode dan uraian rekening retribusi daerah pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, sehingga dilakukan pemetaan terhadap kode dan uraian rekening, yang telah disajikan pada **Tabel 5.3**.

Retribusi surat izin operasional dibidang kesehatan (SIK), retribusi surat izin kesehatan jasa boga dan catering pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sudah tidak tercantum, untuk itu pada *entry* saldo awal 2021 khusus kode rekening retribusi surat izin operasional di bidang kesehatan (SIK), retribusi surat izin kesehatan jasa boga dititipkan pada retribusi pelayanan kesehatan. Begitu juga pada retribusi leges dititipkan pada retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi izin usaha jasa kontruksi (IUK), retribusi izin pendaftaran perusahaan (SIUP) dan TDP), dan retribusi SITU dititipkan pada retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

#### 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

31 Desember 2021  
Rp3.503.009.671,36

31 Desember 2020  
Rp3.250.680.716,62

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.503.009.671,36 atau 105,34 % dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp3.325.430.716,00, jika



dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.250.680.716,62 mengalami penurunan sebesar Rp252.328.954,74 atau sebesar 7,76%. Rincian realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disajikan pada **Tabel 5.4**.

**Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.680.716,00	3.385.500.083,36	3.155.877.736,62	0,00	3.385.500.083,36
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	0,00	0,00	0,00	3.155.877.736,62	(3.155.877.736,62)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	74.750.000,00	117.509.588,00	94.802.980,00	0,00	117.509.588,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	94.802.980,00	(94.802.980,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.325.430.716,00</b>	<b>3.503.009.671,36</b>	<b>3.250.680.716,62</b>	<b>3.250.680.716,62</b>	<b>252.328.954,74</b>

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.503.009.671,36 merupakan pembagian dividen tunai yang diterima Pemerintah Kabupaten Malinau atas kepemilikan saham pada PT BPD Kaltim Kaltara yang merupakan dividen pembagian laba tahun buku 2020 sebesar Rp3.385.500.083,36 dan pembagian dividen tunai yang diterima Pemerintah Kabupaten Malinau atas kepemilikan saham pada PDAM Apa' Mening yang merupakan dividen pembagian laba Tahun 2020 sebesar Rp117.509.588,00.

Sedangkan Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.250.680.716,62 juga merupakan pembagian dividen tunai yang diterima Pemerintah Kabupaten Malinau atas kepemilikan saham pada PT BPD Kaltim Kaltara dan PDAM Apa' Mening yang merupakan dividen pembagian laba Tahun 2020.

**5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah**

**31 Desember 2021**  
**Rp55.031.943.326,68**

**31 Desember 2020**  
**Rp50.512.703.197,77**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp55.031.943.326,68 atau 178,95% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp30.752.586.432,00, dan realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.512.703.197,77. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan pada **Tabel 5.5**.

**Tabel 5.5 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	(4.880.000,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah	20.000.000,00	2.307.191.213,82	1.281.295.614,55	1.281.295.614,55	1.025.895.599,27
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000,00	9.273.886,01	37.028.349,45	37.028.349,45	(27.754.463,44)
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	16.526.599,00	0,00	0,00	16.526.599,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	3.013.356.164,30	7.736.338.797,76	7.736.338.797,76	(4.722.982.633,46)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	9.355.946.937,32	0,00	0,00	9.355.946.937,32
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	120.160.466,89	834.196.132,18	834.196.132,18	(714.035.665,29)
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	1.816.440,00	3.380.256,00	3.380.256,00	(1.563.816,00)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	103.595.782,00	112.459.903,00	112.459.903,00	(8.864.121,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	61.078.100,00	432.602.806,00	217.630.800,00	(156.552.700,00)
<i>Pendapatan dari Pengembalian Pensiun</i>	0,00	0,00	0,00	214.972.006,00	(214.972.006,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	30.000.000,00	9.550.400,00	34.259.350,00	34.259.350,00	(24.708.950,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	3.902.065,00	0,00	0,00	3.902.065,00
Pendapatan BLUD	26.592.586.432,00	35.459.800.457,34	33.963.331.420,00	33.963.331.420,00	1.496.469.037,34
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.000.000.000,00	4.471.442.271,00	4.573.785.699,00	4.573.785.699,00	(102.343.428,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	98.302.544,00	0,00	0,00	98.302.544,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.499.144.869,83	901.029.099,32	(901.029.099,32)
<i>Penerimaan Lain-lain yang sah / Tak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00	353.788.320,51	(353.788.320,51)
<i>Pendapatan Rumah Sakit Pratama Langap - LRA</i>	0,00	0,00	0,00	173.426.700,00	(173.426.700,00)
<i>Pendapatan Pelayanan Kesehatan BPJS - LRA</i>	0,00	0,00	0,00	7.433.600,00	(7.433.600,00)
<i>Pendapatan Rumah Sakit Pratama Long Ampung - LRA</i>	0,00	0,00	0,00	63.467.150,00	(63.467.150,00)
<b>Jumlah</b>	<b>30.752.586.432,00</b>	<b>55.031.943.326,68</b>	<b>50.512.703.197,77</b>	<b>50.512.703.197,77</b>	<b>4.519.240.128,91</b>





Berdasarkan data di atas, realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp4.519.240.128,91 atau 8,95% dari realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan Rumah Sakit Pratama Langap, pendapatan pelayanan kesehatan BPJS, pendapatan Rumah Sakit Pratama Long Ampung pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 realisasi tahun anggaran 2021 ada pada kode rekening retribusi pelayanan kesehatan dan untuk saldo awal dititipkan pada kode rekening lain-lain PAD yang sah lainnya, sedangkan saldo awal pada rekening Pendapatan dari Pengembalian Pensiun disesuaikan menjadi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan berdasarkan penyesuaian menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

#### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer

**31 Desember 2021**  
Rp1.324.456.400.263,37

**31 Desember 2020**  
Rp1.221.925.653.921,46

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.324.456.400.263,37 atau 102,47% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.292.477.012.896,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.221.925.653.921,46 maka terjadi peningkatan sebesar Rp102.530.746.341,91.

Realisasi pendapatan transfer terdiri dari: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, rincian pada **Tabel 5.6**.

**Tabel 5.6 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.239.581.673.000,00	1.263.641.709.413,00	1.169.063.121.413,00	1.147.461.770.413,00	116.179.939.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	21.601.351.000,00	(21.601.351.000,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.895.339.896,00	60.814.690.850,37	43.149.023.138,12	43.149.023.138,12	17.665.667.712,25
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	9.713.509.370,34	9.713.509.370,34	(9.713.509.370,34)
<b>Jumlah</b>	<b>1.292.477.012.896,00</b>	<b>1.324.456.400.263,37</b>	<b>1.221.925.653.921,46</b>	<b>1.221.925.653.921,46</b>	<b>102.530.746.341,91</b>

#### 5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

**31 Desember 2021**  
Rp1.263.641.709.413,00

**31 Desember 2020**  
Rp1.169.063.121.413,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.263.641.709.413,00 atau 101,94% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.239.581.673.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2020 sebesar



Rp1.169.063.121.413,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp94.578.588.000,00 atau 8,09%.

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari (1) Dana Perimbangan (2) Dana Insentif Daerah (DID) dan (3) Dana Desa.

**5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan** 31 Desember 2021  
Rp1.072.870.874.413,00 31 Desember 2020  
Rp1.147.461.770.413,00

Realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.072.870.874.413,00 atau 102,29% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.048.810.838.000,00, dan realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.147.461.770.413,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp74.590.896.000,00 atau 6,50%. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Rincian dana perimbangan tersaji dalam **Tabel 5.7**.

**Tabel 5.7 Rincian Realisasi Dana Perimbangan TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	152.466.924.000,00	184.538.596.041,00	223.453.301.690,00	0,00	184.538.596.041,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	34.979.905.378,00	(34.979.905.378,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	188.473.396.312,00	(188.473.396.312,00)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	780.635.100.000,00	779.926.601.361,00	784.353.307.000,00	784.353.307.000,00	(4.426.705.639,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.053.682.000,00	64.578.624.516,00	97.978.950.122,00	97.978.950.122,00	(33.400.325.606,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.655.132.000,00	43.827.052.495,00	41.676.211.601,00	41.676.211.601,00	2.150.840.894,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.048.810.838.000,00</b>	<b>1.072.870.874.413,00</b>	<b>1.147.461.770.413,00</b>	<b>1.147.461.770.413,00</b>	<b>(74.590.896.000,00)</b>

**5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)** 31 Desember 2021  
Rp184.538.596.041,00 31 Desember 2020  
Rp223.453.301.690,00

Realisasi dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp184.538.596.041,00 atau 121,04% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp152.466.924.000,00. Dalam Permendagri 64 Tahun 2013 struktur transfer umum dana bagi hasil dipisah, yakni bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam. Realisasi dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp223.453.301.690,00. Berikut rincian Realisasi dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) pada **Tabel 5.8**.





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

**Tabel 5.8 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)  
TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	18.396.390.000,00	35.909.141.702,00	29.187.495.120,00	0,00	35.909.141.702,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	0,00	0,00	0,00	491.709.832,00	(491.709.832,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	0,00	0,00	0,00	4.827.157.064,00	(4.827.157.064,00)
Biaya Pungut PBB Perkebunan - LRA	0,00	0,00	0,00	15.777.601,00	(15.777.601,00)
Biaya Pungut PBB Kehutanan - LRA	0,00	0,00	0,00	201.125.461,00	(201.125.461,00)
Biaya Pungut PBB Migas - LRA	0,00	0,00	0,00	158.925.695,00	(158.925.695,00)
Biaya Pungut PBB Non Migas Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	504.296.079,00	(504.296.079,00)
Bagi Hasil PBB Migas - LRA	0,00	0,00	0,00	4.583.466.795,00	(4.583.466.795,00)
Bagi Hasil PBB Non Migas Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	15.634.176.554,00	(15.634.176.554,00)
DBH PBB Bagi Rata - LRA	0,00	0,00	0,00	2.711.491.934,00	(2.711.491.934,00)
Biaya Pungut PBB Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.695.153,00	(1.695.153,00)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	57.672.952,00	(57.672.952,00)
DBH PPh Pasal 21	0,00	5.071.335.400,00	5.385.384.068,00	0,00	5.071.335.400,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.321.783.000,00	260.071.100,00	407.026.190,00	0,00	260.071.100,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	0,00	0,00	0,00	5.792.410.258,00	(5.792.410.258,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	113.000,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	822.239.000,00	1.082.289.300,00	8.367.616.646,00	8.367.616.646,00	(7.285.327.346,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	200.000.000,00	123.162.700,00	782.574.680,00	782.574.680,00	(659.411.980,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.223.282.200,00	724.574.225,00	637.424.550,00	637.424.550,00	87.149.675,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	108.537.557.800,00	119.405.716.375,00	136.762.546.211,00	136.762.546.211,00	(17.356.829.836,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	13.724.840.000,00	17.072.145.539,00	11.635.532.036,00	11.635.532.036,00	5.436.613.503,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	3.112.400.000,00	3.532.484.050,00	29.499.425.900,00	29.499.425.900,00	(25.966.941.850,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	788.276.289,00	788.276.289,00	569.342.861,00
<b>Jumlah</b>	<b>152.466.924.000,00</b>	<b>184.538.596.041,00</b>	<b>223.453.301.690,00</b>	<b>223.453.301.690,00</b>	<b>(38.914.705.649,00)</b>

Pemetaan pada Permendagri 64 Tahun 2013 ke Permendagri 90 Tahun 2019 untuk akun Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,



Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Biaya Pungut PBB Perkebunan, Biaya Pungut PBB Kehutanan, Biaya Pungut PBB Migas, Biaya Pungut PBB Non Migas Lainnya, Bagi Hasil PBB Migas, Bagi Hasil PBB Non Migas Lainnya, DBH PBB Bagi Rata, Biaya Pungut PBB Sektor Lainnya, serta Bagi Hasil dari PBB Sektor Lainnya ke akun DBH Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara untuk akun Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 menjadi DBH PPh Pasal 21 dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPND di Permendagri 90 Tahun 2019.

**5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-**

**Dana Alokasi Umum** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp779.926.601.361,00 Rp784.353.307.000,00  
**(DAU)**

Realisasi pendapatan dana alokasi umum Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp779.926.601.361,00 atau 99,91% dari target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp780.635.100.000,00 dan Realisasi pendapatan dana alokasi umum Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp784.353.307.000,00.

**5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-**

**Dana Alokasi Khusus** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp64.578.624.516,00 Rp97.978.950.122,00  
**(DAK) Fisik**

Realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp64.578.624.516,00 atau 96,31% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp67.053.682.000,00 dan realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp97.978.950.122,00. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp33.400.325.606,00 atau 34,09% dari realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp97.978.950.122,00. Rincian realisasi pendapatan dana alokasi khusus disajikan pada **Tabel 5.9**.

**Tabel 5.9 Rincian Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus  
TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	881.164.000,00	866.100.686,00	1.491.762.979,00	0,00	866.100.686,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.429.991.000,00	3.310.430.000,00	3.738.274.645,00	0,00	3.310.430.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.133.036.000,00	2.091.790.000,00	2.137.668.750,00	0,00	2.091.790.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	150.511.500,00	0,00	0,00
DAK Bidang Pendidikan - LRA	0,00	0,00	0,00	7.518.217.874,00	(7.518.217.874,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.000.000.000,00	1.538.600.521,00	2.680.427.594,00	0,00	1.538.600.521,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.286.192.000,00	3.241.978.632,00	5.395.401.574,00	0,00	3.241.978.632,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.661.685.000,00	2.450.780.518,00	6.638.396.131,00	0,00	2.450.780.518,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.434.320.000,00	1.399.509.000,00	598.676.000,00	0,00	1.399.509.000,00
DAK Bidang Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00	15.312.901.299,00	(15.312.901.299,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	1.378.184.000,00	1.378.184.000,00	(1.378.184.000,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13.994.566.000,00	13.645.443.000,00	27.402.221.000,00	27.402.221.000,00	(13.756.778.000,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	2.160.630.999,00	2.160.630.999,00	(2.160.630.999,00)
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	5.040.000.000,00	4.757.863.200,00	0,00	0,00	4.757.863.200,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	0,00	0,00	889.320.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	0,00	0,00	15.842.696.560,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	0,00	0,00	6.846.078.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi	0,00	0,00	1.174.502.250,00	0,00	0,00
DAK AFIRMASI - LRA	0,00	0,00	0,00	25.112.596.810,00	(25.112.596.810,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	8.214.438.000,00	7.571.734.981,00	0,00	0,00	7.571.734.981,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	1.731.220.650,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	1.697.297.289,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	270.000.000,00	256.500.000,00	0,00	0,00	256.500.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.515.000.000,00	3.484.740.000,00	367.500.000,00	0,00	3.484.740.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	650.341.000,00	638.591.000,00	0,00	0,00	638.591.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.882.015.000,00	9.801.111.300,00	12.425.568.000,00	0,00	9.801.111.300,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.298.493.000,00	5.298.410.994,00	2.872.612.201,00	0,00	5.298.410.994,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.643.433.000,00	1.643.202.300,00	0,00	0,00	1.643.202.300,00





Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.767.000.000,00	1.629.968.384,00	0,00	0,00	1.629.968.384,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	952.008.000,00	951.870.000,00	0,00	0,00	951.870.000,00
DAK Penugasan - LRA	0,00	0,00	0,00	19.094.198.140,00	(19.094.198.140,00)
<b>Jumlah</b>	<b>67.053.682.000,00</b>	<b>64.578.624.516,00</b>	<b>97.978.950.122,00</b>	<b>97.978.950.122,00</b>	<b>(33.400.325.606,00)</b>

**5.1.1.2.1.1.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik** **31 Desember 2021**  
**Rp43.827.052.495,00** **31 Desember 2020**  
**Rp41.676.211.601,00**

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp43.827.052.495,00 atau 90,08% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp48.655.132.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp41.676.211.601,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp2.150.840.894,00 atau 5,16%. Rincian realisasi pendapatan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik disajikan pada **Tabel 5.10**.

**Tabel 5.10 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
TPG PNSD	17.682.954.000,00	17.682.954.000,00	15.858.394.000,00	15.858.394.000,00	1.824.560.000,00
Tamsil Guru PNSD	792.000.000,00	792.000.000,00	1.255.500.000,00	1.255.500.000,00	(463.500.000,00)
TKG PNSD	2.908.507.000,00	2.908.507.000,00	5.086.494.000,00	5.086.494.000,00	(2.177.987.000,00)
BOP PAUD	1.543.200.000,00	1.340.400.000,00	1.533.600.000,00	1.533.600.000,00	(193.200.000,00)
BOP Pendidikan Kesetaraan	551.800.000,00	541.700.000,00	544.350.000,00	544.350.000,00	(2.650.000,00)
BOKKB -BOK	18.461.683.000,00	16.763.790.895,00	16.575.081.401,00	16.575.081.401,00	188.709.494,00
BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	469.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOKKB- Akreditasi Puskesmas	982.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOKKB- Jaminan Persalinan	380.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOKKB- BOKB	2.474.951.000,00	1.391.271.600,00	0,00	0,00	1.391.271.600,00
PK2UKM	390.304.000,00	390.304.000,00	0,00	0,00	390.304.000,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.285.712.000,00	1.284.742.000,00	648.642.200,00	648.642.200,00	636.099.800,00
Fasilitasi Penanaman Modal	381.383.000,00	381.383.000,00	0,00	0,00	381.383.000,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	174.150.000,00	174.150.000,00	(174.150.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>48.655.132.000,00</b>	<b>43.827.052.495,00</b>	<b>41.676.211.601,00</b>	<b>41.676.211.601,00</b>	<b>2.150.840.894,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Malinau yang berasal dari



Pemerintah Pusat yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan non fisik, dan baru diberikan mulai Tahun 2021.

**5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah** 31 Desember 2021  
Rp19.625.186.000,00 31 Desember 2020  
Rp21.601.351.000,00  
(DID)

Realisasi pendapatan transfer Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp19.625.186.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp19.625.186.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.601.351.000,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.976.165.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya terdiri dari Dana Penyesuaian. Rincian realisasi pendapatan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat lainnya disajikan pada **Tabel 5.11**.

**Tabel 5.11** Rincian Realisasi Belanja Subsidi TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Pajak Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/(Turun)
Dana Insentif Daerah (DID)	19.625.186.000,00	19.625.186.000,00	21.601.351.000,00	(1.976.165.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>19.625.186.000,00</b>	<b>19.625.186.000,00</b>	<b>21.601.351.000,00</b>	<b>(1.976.165.000,00)</b>

**5.1.1.2.1.3. Dana Desa** 31 Desember 2021  
Rp171.145.649.000,00 31 Desember 2020  
Rp0,00

Realisasi pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp171.145.649.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp171.145.649.000,00 dan realisasi pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi pendapatan Dana Desa disajikan pada **Tabel 5.12**.

**Tabel 5.12** Rincian Realisasi Pendapatan Dana Desa TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/(Turun)
Dana Desa	171.145.649.000,00	171.145.649.000,00	0,00	171.145.649.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>171.145.649.000,00</b>	<b>171.145.649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.145.649.000,00</b>

Berdasarkan data diatas pendapatan dana desa Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp157.973.035.000,00, namun terealisasi pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah karena saat itu anggaran Dana Desa terletak diakun tersebut.





**5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah** 31 Desember 2021  
Rp60.814.690.850,37 31 Desember 2020  
Rp52.862.532.508,46

Realisasi pendapatan transfer antar daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp60.814.690.850,37 atau 114,97% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp52.895.339.896,00 dan realisasi pendapatan transfer antar daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp52.862.532.508,46. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari dua, yakni pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.

**5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak** 31 Desember 2021  
Rp48.631.549.939,90 31 Desember 2020  
Rp43.149.023.138,12

Realisasi pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp48.631.549.939,90 atau 119,45% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp40.712.198.986,00 dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43.149.023.138,12. Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi disajikan pada **Tabel 5.13**.

**Tabel 5.13 Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/(Turun)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.522.680.000,00	4.000.094.340,42	3.747.958.713,91	252.135.626,51
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.058.140.000,00	4.899.504.159,59	3.982.071.115,40	917.433.044,19
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.164.239.218,00	34.858.331.924,73	29.963.818.528,94	4.894.513.395,79
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	320.695.288,00	213.746.014,16	173.797.816,87	39.948.197,29
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.646.444.480,00	4.659.873.501,00	5.281.376.963,00	(621.503.462,00)
<b>Jumlah</b>	<b>40.712.198.986,00</b>	<b>48.631.549.939,90</b>	<b>43.149.023.138,12</b>	<b>5.482.526.801,78</b>

Berdasarkan tabel 5.13 realisasi pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi mengalami peningkatan sebesar Rp5.482.526.801,78 atau 12,71% dari anggaran tahun sebelumnya.

**5.1.1.2.2.2. Bantuan Keuangan** 31 Desember 2021  
Rp12.183.140.910,47 31 Desember 2020  
Rp9.713.509.370,34

Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp12.183.140.910,47 atau 100,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp12.183.140.910,00 dan bantuan keuangan dari



pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.713.509.370,34. Rincian realisasi pendapatan bantuan keuangan dari provinsi disajikan pada **Tabel 5.14**.

**Tabel 5.14 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/(Turun)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.183.140.910,00	12.183.140.910,47	9.713.509.370,34	2.469.631.540,13
<b>Jumlah</b>	<b>12.183.140.910,00</b>	<b>12.183.140.910,47</b>	<b>9.713.509.370,34</b>	<b>2.469.631.540,13</b>

Berdasarkan data diatas bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp2.469.631.540,13 atau 25,42% dari realisasi pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Realisasi Bantuan Keuangan dari provinsi terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru Sekolah Dasar, Tambahan Penghasilan Guru Sekolah Menengah Pertama, Tambahan Penghasilan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Lainnya nonformal, Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya jenjang PAUD, PNS & TBPP-Penyuluh Pertanian, PNS & TBPP-Penyuluh Perikanan dan Bantuan Keuangan Berbasis Ekologi.

**5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

**31 Desember 2021**  
**Rp20.546.254.000,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp175.403.345.000,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp20.546.254.000,00 dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp175.403.345.000,00. Rincian lain-lain pendapatan yang sah disajikan pada **Tabel 5.15**.

**Tabel 5.15 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Pendapatan Hibah	0,00	2.511.000.000,00	2.935.000.000,00	2.935.000.000,00	(424.000.000,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.690.000.000,00	18.035.254.000,00	172.468.345.000,00	0,00	18.035.254.000,00
<i>Pendapatan Lainnya - LRA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172.468.345.000,00</i>	<i>(172.468.345.000,00)</i>
<b>Jumlah</b>	<b>17.690.000.000,00</b>	<b>20.546.254.000,00</b>	<b>175.403.345.000,00</b>	<b>175.403.345.000,00</b>	<b>(154.857.091.000,00)</b>

Pendapatan Hibah sebesar Rp2.511.000.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah dari Menteri





Keuangan nomor S-10/MK.7/2021 Hal: Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2021 untuk Kabupaten Malinau dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan target 1.000 sambungan rumah (SR). Berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan oleh BPKP, sambungan rumah (SR) yang telah terpasang dan dinyatakan diterima sebanyak 837 sambungan rumah (nomor surat LR-398/PW34/4/2021 hal Laporan Reviu atas Laporan Konsultan verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2021 pada Kabupaten Malinau). Merujuk pada Surat Penetapan Pemberian Hibah dari Menteri Keuangan No. S-10/MK.7/2021 point 1 (satu) bahwa jumlah pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebagaimana jumlah terlampir dan diberikan berdasarkan capaian kinerja (*output-based*), maka jumlah hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 adalah  $837 \text{ (SR)} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}2.511.000.000,00$ .

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pendapatan hibah dana BOS yang terealisasi sebesar Rp18.035.254.000,00. Pendapatan hibah BOS terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021, Dana BOS Afirmasi Tahun Anggaran 2021, Dana BOS kinerja ditransfer langsung ke rekening sekolah penerima.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus. Realisasi Dana BOS Reguler pada Sekolah Negeri di Kabupaten Malinau Tahun 2021 adalah sebesar Rp17.015.254.000,00.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Realisasi Dana BOS Afirmasi Tahun 2021 pada Sekolah Negeri di Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp960.000.000,00.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidik dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementrian. Realisasi Dana BOS dan Kinerja Tahun 2021 pada Sekolah Negeri di Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp60.000.000,00.

Realisasi transfer Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp157.973.035.000,00 dicatat pada Pendapatan Lainnya – LRA hal ini mengacu pada penempatan anggaran pendapatan Dana Desa.





<b>5.1.2 Belanja Daerah</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>Rp1.353.551.185.811,19</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>Rp1.445.195.513.749,67</b>
-----------------------------	---	---

Belanja daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja, yaitu:

1. Dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah.
2. Menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, dan terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh daerah.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.353.551.185.811,19 atau 92,98% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.455.682.046.350,00 dan pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.445.195.513.749,67. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari: (1) Belanja Operasi sebesar Rp900.121.416.079,19 atau 91,68% dari anggaran sebesar Rp981.783.830.390,00; (2) Belanja modal sebesar Rp101.357.607.237,00 atau 91,17% dari anggaran sebesar Rp111.172.312.460,00; (3) Belanja tak terduga sebesar Rp25.292.777.495,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp35.946.518.500,00 atau 70,36%; dan (4) Belanja Transfer sebesar Rp326.779.385.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp326.779.385.000,00.

Belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 meliputi:

<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>Rp900.121.416.079,19</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>Rp940.657.546.868,67</b>
--------------------------------	---	---

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp900.121.416.079,19 atau 91,68% dari anggaran sebesar Rp981.783.830.390,00 dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp940.657.546.868,67. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 terdiri dari: (1) Belanja Pegawai sebesar Rp505.155.869.372,00; (2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp368.895.538.503,19; (3) Belanja Subsidi sebesar Rp2.393.507.500,00; (4) Belanja Hibah sebesar Rp20.982.118.202,00; dan (5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.694.382.502,00.

Belanja operasi ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi, antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.



Belanja operasi yang telah terealisasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau disajikan pada **Lampiran 1**.

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

**31 Desember 2021**  
**Rp505.155.869.372,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp481.304.058.967,00**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp505.155.869.372,00 atau 92,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp543.355.773.950,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp481.304.058.967,00, maka Belanja Pegawai tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp23.851.810.405,00 atau 4,96%.

Realisasi Belanja Pegawai merupakan Belanja Pegawai Dinas/Badan/Bagian/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Belanja Pegawai selama Tahun 2021 dan perbandingannya dengan Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 5.16**.

**Tabel 5.16 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Gaji Pokok ASN	171.283.236.523,00	156.364.768.634,00	158.954.854.867,00	132.806.450.567,00	23.558.318.067,00
Belanja Uang Representasi DPRD	454.794.375,00	450.765.000,00	375.795.000,00	0,00	450.765.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	69.772.256,00	9.600.000,00	46.800.000,00	0,00	9.600.000,00
Tunjangan Hari Raya (THR)	0,00	0,00	0,00	13.102.467.500,00	(13.102.467.500,00)
Gaji Ketigabelas	0,00	0,00	0,00	13.468.531.800,00	(13.468.531.800,00)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.010.428.772,00	15.309.824.466,00	13.008.153.206,00	13.043.849.006,00	2.265.975.460,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	29.741.775,00	29.479.800,00	29.143.800,00	0,00	29.479.800,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.728.000,00	1.344.000,00	6.552.000,00	0,00	1.344.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.564.294.000,00	6.981.280.000,00	6.175.735.000,00	6.804.877.750,00	176.402.250,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	659.451.844,00	653.609.250,00	606.107.250,00	0,00	653.609.250,00
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00	13.382.775,00	(13.382.775,00)
Belanja Tunjangan Komisi	0,00	0,00	0,00	26.582.850,00	(26.582.850,00)
Belanja Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	0,00	15.575.175,00	(15.575.175,00)
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	0,00	5.663.700,00	(5.663.700,00)
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.507.980,00	17.280.000,00	84.240.000,00	0,00	17.280.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.774.327.893,00	6.725.434.000,00	5.610.790.500,00	5.610.790.500,00	1.114.643.500,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.802.664.802,00	3.575.057.046,00	2.935.517.260,00	2.935.517.260,00	639.539.786,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	10.868.012.392,00	10.294.575.420,00	8.831.941.660,00	8.887.777.480,00	1.406.797.940,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.071.798,00	42.655.380,00	48.883.500,00	0,00	42.655.380,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00	1.448.400,00	6.952.320,00	0,00	1.448.400,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	478.361.751,00	460.934.928,00	249.361.132,00	250.700.236,00	210.234.692,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000,00	65.550,00	1.339.104,00	0,00	65.550,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.458.189,00	2.317.272,00	1.988.416,00	1.989.376,00	327.896,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	450.000,00	160,00	960,00	0,00	160,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.244.486.790,00	13.472.553.798,00	14.697.928.271,00	14.697.928.271,00	(1.225.374.473,00)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	326.349.698,00	321.381.691,00	0,00	0,00	321.381.691,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	979.367.037,00	963.259.952,00	0,00	0,00	963.259.952,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	847.185.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	211.978.438.078,00	205.985.554.008,00	148.941.464.071,00	145.668.330.371,00	60.317.223.637,00
<i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Resiko Kerja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.273.133.700,00</i>	<i>(3.273.133.700,00)</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	9.757.849.191,00	9.472.100.000,00	12.703.894.226,00	9.170.504.226,00	301.595.774,00
<i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Koordinasi Administratif</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.533.390.000,00</i>	<i>(3.533.390.000,00)</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.799.650.000,00	3.754.550.000,00	32.757.696.666,00	32.586.280.000,00	(28.831.730.000,00)
<i>Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171.416.666,00</i>	<i>(171.416.666,00)</i>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	16.392.986.644,00	14.080.621.370,00	27.461.710.465,00	27.461.710.465,00	(13.381.089.095,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN			13.164.521.632,00	13.164.521.632,00	(13.164.521.632,00)
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	24.785.304.080,00	21.670.889.280,00	15.229.191.100,00	15.229.191.100,00	6.441.698.180,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.015.497.500,00	3.005.921.400,00	5.013.568.800,00	5.013.568.800,00	(2.007.647.400,00)
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	900.500.000,00	900.250.000,00	5.633.000.000,00	5.633.000.000,00	(4.732.750.000,00)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.481.300.710,00	3.591.785.995,00	0,00	0,00	3.591.785.995,00
Belanja Honorarium	770.608.243,00	612.815.000,00	81.395.000,00	0,00	612.815.000,00
Belanja Uang Paket DPRD	39.032.438,00	38.629.500,00	37.579.500,00	37.579.500,00	1.050.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	59.659.163,00	59.042.550,00	0,00	0,00	59.042.550,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.153.172,00	10.048.500,00	10.048.500,00	10.048.500,00	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.564.750.000,00	3.528.000.000,00	3.439.800.000,00	3.439.800.000,00	88.200.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.190.700.000,00	882.000.000,00	882.000.000,00	882.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	221.580.399,00	41.258.039,00	3.143.511,00	3.143.511,00	38.114.528,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.767.500.000,00	2.767.500.000,00	2.713.500.000,00	2.713.500.000,00	54.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851,00	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	(3.675.000,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	206.420.960,00	201.128.960,00	0,00	0,00	201.128.960,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	69.120,00	0,00	0,00	69.120,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	241.823.992,00	239.904.000,00	274.680.000,00	274.680.000,00	(34.776.000,00)
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	3.672.618.000,00	3.645.293.000,00	5.263.413.700,00	0,00	3.645.293.000,00
Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000,00	14.590.850.863,00	0,00	0,00	14.590.850.863,00
Belanja Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	47.975.000,00	(47.975.000,00)
Belanja Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	914.526.250,00	(914.526.250,00)
<b>Jumlah</b>	<b>543.355.773.950,00</b>	<b>505.155.869.372,00</b>	<b>485.686.366.417,00</b>	<b>481.304.058.967,00</b>	<b>23.851.810.405,00</b>

Berdasarkan tabel 5.16 belanja pegawai tahun 2021 naik sebesar Rp23.851.810.405,00 atau 4,96% dari realisasi Tahun Anggaran 2020. Terjadi perubahan klasifikasi Belanja Pegawai menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yakni belanja honorarium untuk jenis belanja honorarium tim pengadaan barang dan jasa, Belanja Pegawai BOS dimana sebelumnya merupakan Belanja Barang Jasa. Sementara untuk belanja uang lembur PNS dan non PNS masuk dalam Belanja Barang Jasa menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa** **31 Desember 2021**  
Rp368.895.538.503,19 **31 Desember 2020**  
Rp370.367.965.307,67

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp368.895.538.503,19 atau 90,61% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp407.119.218.104,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp370.367.965.307,67. Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 dikelompokkan menjadi 7 bagian belanja yaitu: belanja barang sebesar Rp64.805.392.846,66; belanja jasa sebesar Rp162.846.995.309,00; belanja pemeliharaan sebesar Rp7.461.557.824,00; belanja perjalanan dinas sebesar Rp77.629.225.243,00; belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp13.104.585.422,00; belanja barang dan jasa BOS sebesar



Rp25.323.843.763,00; dan belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp17.723.938.095,53.

Terjadi perubahan klasifikasi Belanja Barang dan Jasa menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yakni belanja honorarium untuk jenis belanja honorarium tim pengadaan barang dan jasa, belanja pegawai BOS dimana sebelumnya merupakan belanja barang jasa, menjadi belanja pegawai. Sementara untuk belanja uang lembur PNS dan non PNS yang sebelumnya masuk dalam belanja pegawai, menjadi belanja barang jasa menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rincian realisasi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BLUD, disajikan pada **Tabel 5.17, Tabel 5.18, Tabel 5.19, Tabel 5.20, Tabel 5.21, Tabel 5.22, dan Tabel 5.23.**

**Tabel 5.17 Rincian Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	905.625.368,00	905.625.368,00	594.427.379,00	594.427.379,00	311.197.989,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	24.200.000,00	24.200.000,00	72.898.000,00	72.898.000,00	(48.698.000,00)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.062.523.220,00	5.830.714.650,00	8.642.330.646,00	7.962.776.910,00	(2.132.062.260,00)
<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>679.553.736,00</i>	<i>(679.553.736,00)</i>
Belanja Bahan-Bahan Baku	753.925.300,00	454.522.620,00	0,00	0,00	454.522.620,00
Belanja Bahan-Barang dalam Proses	2.800.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.361.977.800,00	290.295.750,00	100.550.000,00	100.550.000,00	189.745.750,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	238.564.934,00	201.319.000,00	894.365.000,00	894.365.000,00	(693.046.000,00)
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	257.275.000,00	252.996.000,00	52.408.700,00	52.408.700,00	200.587.300,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.298.696.760,00	2.270.260.180,00	3.789.755.052,00	0,00	2.270.260.180,00
<i>Belanja Bahan Dapur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.816.500,00</i>	<i>(102.816.500,00)</i>
<i>Belanja Bahan Pembersih</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313.725.490,00</i>	<i>(313.725.490,00)</i>
<i>Belanja Bahan Percontohan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.250.000,00</i>	<i>(11.250.000,00)</i>
<i>Belanja Bahan Perlengkapan Pelatihan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134.047.000,00</i>	<i>(134.047.000,00)</i>
<i>Belanja Bahan Sembako</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.023.685.500,00</i>	<i>(2.023.685.500,00)</i>
<i>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.204.230.562,00</i>	<i>(1.204.230.562,00)</i>
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	25.110.000,00	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.266.751.980,00	753.574.800,00	0,00	0,00	753.574.800,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	29.494.000,00	22.994.000,00	0,00	0,00	22.994.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	112.600.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00	48.300.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7.000.000,00	7.000.000,00	30.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	161.211.000,00	155.666.400,00	2.444.896.853,00	2.500.006.853,00	(2.344.340.453,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.582.239.102,00	7.332.885.007,00	6.926.551.992,00	6.926.551.992,00	406.333.015,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.069.174.432,00	3.774.241.550,00	5.324.558.773,00	0,00	3.774.241.550,00
<i>Belanja Cetak</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.021.308.393,00</i>	<i>(4.021.308.393,00)</i>
<i>Belanja Foto Copy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>984.899.630,00</i>	<i>(984.899.630,00)</i>
<i>Belanja Penggandaan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318.350.750,00</i>	<i>(318.350.750,00)</i>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,00	0,00	30.336.000,00	30.336.000,00	(30.336.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	11.944.000,00	11.944.000,00	(11.944.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	58.656.000,00	54.192.000,00	0,00	0,00	54.192.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	103.416.713,00	32.416.713,00	0,00	0,00	32.416.713,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	394.443.205,00	366.581.200,00	463.387.907,00	463.387.907,00	(96.806.707,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	44.263.000,00	42.139.000,00	1.108.854.304,00	1.108.854.304,00	(1.066.715.304,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	998.958.000,00	992.958.000,00	873.100.000,00	873.100.000,00	119.858.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.914.930.875,00	3.440.386.414,66	4.505.234.173,00	0,00	3.440.386.414,66
<i>Belanja Spanduk/Umbul-umbul</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>597.950.399,00</i>	<i>(597.950.399,00)</i>
<i>Belanja Barang Di Bawah Nilai Kapitalisasi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.907.283.774,00</i>	<i>(3.907.283.774,00)</i>
Belanja Obat-Obatan-Obat	51.975.000,00	36.525.000,00	5.995.488.821,00	5.995.488.821,00	(5.958.963.821,00)
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.598.746.790,00	3.286.509.426,00	7.975.874.748,00	0,00	3.286.509.426,00
<i>Belanja BAKHP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.975.874.748,00</i>	<i>(7.975.874.748,00)</i>
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.533.235.400,00	10.326.910.800,00	42.570.000,00	42.570.000,00	10.284.340.800,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	489.227.570,00	468.229.000,00	4.776.619.405,00	4.776.619.405,00	(4.308.390.405,00)
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.143.220.970,00	3.139.340.925,00	0,00	0,00	3.139.340.925,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.590.406.330,00	10.142.124.500,00	10.548.223.788,00	8.959.193.688,00	1.182.930.812,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	0,00	0,00	1.589.030.100,00	(1.589.030.100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.588.361.450,00	6.460.152.300,00	7.292.550.181,00	7.292.550.181,00	(832.397.881,00)
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	384.737.000,00	240.592.400,00	1.132.041.500,00	1.132.041.500,00	(891.449.100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	221.782.000,00	214.264.900,00	1.090.324.000,00	986.596.000,00	(772.331.100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0,00	103.728.000,00	(103.728.000,00)
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	313.600.000,00	143.600.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	68.900.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	197.300.000,00	197.300.000,00	84.250.000,00	84.250.000,00	113.050.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.750.000,00	100.750.000,00	615.800.000,00	615.800.000,00	(515.050.000,00)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	356.250.000,00	356.125.500,00	294.216.000,00	294.216.000,00	61.909.500,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	92.500.000,00	92.500.000,00	97.150.000,00	97.150.000,00	(4.650.000,00)
Belanja Pakaian Siaga	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	98.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	58.800.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	23.300.000,00	23.300.000,00	19.850.000,00	19.850.000,00	3.450.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	49.750.000,00	49.750.000,00	6.250.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	445.655.000,00	445.490.000,00	569.800.000,00	569.800.000,00	(124.310.000,00)
Belanja Pakaian Olahraga	197.710.000,00	146.650.000,00	140.440.000,00	140.440.000,00	6.210.000,00
Belanja Pakaian Paskibraka	36.512.000,00	30.790.000,00	0,00	0,00	30.790.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00	0,00	122.500.000,00
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.377.157.472,00	1.314.373.443,00	0,00	0,00	1.314.373.443,00
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	19.848.000,00	15.598.000,00	0,00	0,00	15.598.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>76.819.249.671,00</b>	<b>64.805.392.846,66</b>	<b>76.690.357.222,00</b>	<b>76.690.357.222,00</b>	<b>(11.884.964.375,34)</b>

Tabel 5.18 Rincian Realisasi Belanja Jasa TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.096.890.000,00	637.250.000,00	2.384.198.829,00	2.384.198.829,00	(1.746.948.829,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.755.816.230,00	18.989.106.013,00	7.002.393.220,00	6.893.533.900,00	12.095.572.113,00
Belanja Honorarium PNS Lainnya	0,00	0,00	0,00	108.859.320,00	(108.859.320,00)
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	81.395.000,00	(81.395.000,00)
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.694.630.000,00	1.137.803.600,00	0,00	0,00	1.137.803.600,00
Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	22.907.974.000,00	19.831.297.000,00	0,00	0,00	19.831.297.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	27.192.337.698,00	25.378.646.973,00	8.981.959.572,00	4.793.259.131,00	20.585.387.842,00
Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	4.188.700.441,00	(4.188.700.441,00)
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	192.000.000,00	144.000.000,00	20.059.200,00	20.059.200,00	123.940.800,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.355.680.000,00	6.297.930.000,00	0,00	0,00	6.297.930.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	18.559.000.000,00	18.095.300.000,00	0,00	0,00	18.095.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.373.300.000,00	4.370.300.000,00	0,00	0,00	4.370.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.948.400.000,00	2.942.400.000,00	0,00	0,00	2.942.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	501.000.000,00	401.000.000,00	0,00	0,00	401.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	75.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.678.620.000,00	7.192.950.070,00	0,00	106.093.429.563,00	(98.900.479.493,00)
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.589.175.000,00	2.638.775.000,00	106.093.429.563,00	0,00	2.638.775.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.520.312.100,00	1.433.110.000,00	0,00	0,00	1.433.110.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.166.267.000,00	10.843.376.914,00	3.003.030.141,00	2.709.030.141,00	8.134.346.773,00
Belanja Jasa Kebersihan Taman	0,00	0,00	0,00	294.000.000,00	(294.000.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.311.073.312,00	1.124.913.312,00	720.000.000,00	720.000.000,00	404.913.312,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	537.600.000,00	461.600.000,00	0,00	0,00	461.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	370.400.000,00	369.200.000,00	0,00	0,00	369.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.998.579.000,00	1.690.814.500,00	2.064.870.638,00	986.305.124,00	704.509.376,00
Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	1.078.565.514,00	(1.078.565.514,00)
Belanja Jasa Tata Rias	210.000.000,00	209.992.900,00	0,00	0,00	209.992.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	31.460.000,00	30.410.000,00	0,00	0,00	30.410.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.000.000,00	7.901.000,00	0,00	0,00	7.901.000,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	1.561.223,00	187.428.259,00	187.428.259,00	(185.867.036,00)
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	317.010.000,00	316.992.500,00	0,00	0,00	316.992.500,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	263.000.000,00	262.999.920,00	9.419.664.261,00	0,00	262.999.920,00
<i>Belanja Jasa Dekorasi</i>	0,00	0,00	0,00	<i>406.690.000,00</i>	<i>(406.690.000,00)</i>
<i>Belanja Jasa Publikasi</i>	0,00	0,00	0,00	<i>701.540.000,00</i>	<i>(701.540.000,00)</i>
<i>Belanja Uang Saku, Transportasi dan Akomodasi</i>	0,00	0,00	0,00	<i>8.311.434.261,00</i>	<i>(8.311.434.261,00)</i>
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	1.213.811.140,00	671.780.000,00	(671.780.000,00)
<i>Belanja Iuran APKASI</i>	0,00	0,00	0,00	<i>25.000.000,00</i>	<i>(25.000.000,00)</i>
<i>Belanja Sertifikasi</i>	0,00	0,00	0,00	<i>517.031.140,00</i>	<i>(517.031.140,00)</i>
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	180.000.000,00	179.985.000,00	0,00	0,00	179.985.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	144.400.000,00	142.400.000,00	0,00	0,00	142.400.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	275.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.293.900.000,00	1.293.900.000,00	0,00	0,00	1.293.900.000,00
Belanja Tagihan Telepon	377.584.958,00	298.189.105,00	322.961.957,00	322.961.957,00	(24.772.852,00)
Belanja Tagihan Air	1.028.730.004,00	892.748.350,00	1.493.800.443,00	1.493.800.443,00	(601.052.093,00)
Belanja Tagihan Listrik	5.589.189.671,00	5.434.892.664,00	7.243.068.287,00	7.243.068.287,00	(1.808.175.623,00)
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.120.000,00	5.688.228.998,00	5.688.228.998,00	(5.687.108.998,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.713.736.840,00	2.537.929.141,00	2.221.248.427,00	2.221.248.427,00	316.680.714,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.651.009.500,00	1.234.591.900,00	1.643.672.606,00	1.643.672.606,00	(409.080.706,00)
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	160.000.000,00	86.999.733,00	150.759.300,00	0,00	86.999.733,00
<i>Belanja Pajak Kendaraan Bermotor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.722.100,00</i>	<i>(90.722.100,00)</i>
<i>Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59.837.200,00</i>	<i>(59.837.200,00)</i>
<i>Belanja Jasa KIR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>(200.000,00)</i>
Belanja Lembur	0,00	0,00	962.501.250,00	0,00	0,00
Belanja Medical Check Up	3.600.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	480.440.000,00	335.510.000,00	0,00	0,00	335.510.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.620.712.091,00	2.912.518.782,00	0,00	0,00	2.912.518.782,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	36.019.200,00	30.111.200,00	0,00	0,00	30.111.200,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.231.568.661,00	11.903.338.453,00	252.054.720,00	252.054.720,00	11.651.283.733,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	125.852.200,00	118.468.500,00	11.284.210.295,00	11.284.210.295,00	(11.165.741.795,00)
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	109.135.000,00	52.000.000,00	24.500.000,00	81.800.000,00	(29.800.000,00)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	29.300.000,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	132.900.000,00	131.900.000,00	0,00	0,00	131.900.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	415.176.000,00	415.176.000,00	(415.176.000,00)
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	181.440.000,00	181.440.000,00	(181.440.000,00)
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000,00	199.990.000,00	0,00	0,00	199.990.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.604.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Belanja Sewa Sumber Tenaga	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
Belanja Sewa MOB	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00
Belanja Sewa Hotel	668.550.500,00	394.882.489,00	0,00	0,00	394.882.489,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	13.987.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	17.494.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	214.620.787,00	214.620.787,00	(214.620.787,00)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.000.000,00	69.300.000,00	82.341.612,00	0,00	69.300.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	109.230.000,00	201.971.612,00	(201.971.612,00)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	117.340.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	60.000.000,00	59.895.000,00	0,00	0,00	59.895.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	24.811.500,00	24.475.000,00	0,00	0,00	24.475.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	38.100.000,00	36.550.000,00	0,00	0,00	36.550.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	7.026.000,00	6.969.000,00	46.927.000,00	51.530.797,00	(44.561.797,00)
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	4.603.797,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	50.000.000,00	49.390.000,00	0,00	0,00	49.390.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	59.895.000,00	59.565.000,00	0,00	0,00	59.565.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	12.548.375,00	12.419.000,00	0,00	0,00	12.419.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	40.000.000,00	39.696.000,00	0,00	0,00	39.696.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	43.100.000,00	43.100.000,00	(43.100.000,00)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	19.000.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	78.910.000,00	78.425.000,00	0,00	0,00	78.425.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	238.960.500,00	238.960.500,00	0,00	0,00	238.960.500,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	595.200.000,00	569.900.000,00	378.250.000,00	130.250.000,00	439.650.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Beasiswa Ijin Belajar S1	0,00	0,00	0,00	248.000.000,00	(248.000.000,00)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.223.800.000,00	1.185.800.000,00	1.969.550.000,00	1.969.550.000,00	(783.750.000,00)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	200.000.000,00	200.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	140.000.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.197.240.000,00	5.979.092.400,00	2.592.807.804,00	2.592.807.804,00	3.386.284.596,00
Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
Belanja Bimbingan Teknis	1.063.870.167,00	812.662.167,00	0,00	0,00	812.662.167,00
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	5.263.413.700,00	(5.263.413.700,00)
<b>Jumlah</b>	<b>182.187.204.707,00</b>	<b>162.846.995.309,00</b>	<b>178.595.198.106,00</b>	<b>182.977.505.556,00</b>	<b>(20.130.510.247,00)</b>

Tabel 5.19 Rincian Realisasi Belanja PemeliharaanTA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	567.536.500,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	567.536.500,00	(567.536.500,00)
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	774.531.342,00	758.847.500,00	0,00	0,00	758.847.500,00
Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	1.485.617.457,00	(1.485.617.457,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.387.740.540,00	(1.387.740.540,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	81.500.000,00	15.516.700,00	0,00	0,00	15.516.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	47.325.000,00	47.325.000,00	0,00	0,00	47.325.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.798.383.280,00	1.671.306.240,00	0,00	0,00	1.671.306.240,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	622.190.000,00	400.852.475,00	1.316.965.340,00	0,00	400.852.475,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	175.100.000,00	174.219.250,00	1.518.282.657,00	0,00	174.219.250,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	18.110.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	647.144.030,00	578.313.292,00	0,00	0,00	578.313.292,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	148.318.000,00	144.413.000,00	0,00	0,00	144.413.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	92.890.000,00	42.672.500,00	0,00	0,00	42.672.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	349.066.090,00	346.920.195,00	0,00	0,00	346.920.195,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	200.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	197.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	63.550.000,00	63.550.000,00	0,00	0,00	63.550.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	172.000.000,00	197.714.193,00	0,00	0,00	197.714.193,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	77.430.000,00	77.320.000,00	0,00	0,00	77.320.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	233.410.000,00	216.520.000,00	0,00	0,00	216.520.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	47.710.000,00	42.572.580,00	0,00	0,00	42.572.580,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	17.816.000,00	17.816.000,00	0,00	0,00	17.816.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	625.590.250,00	549.049.623,00	1.739.835.668,00	0,00	549.049.623,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	342.932.265,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.082.767.933,00	(2.082.767.933,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	762.000.000,00	752.765.118,00	0,00	0,00	752.765.118,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	100.000.000,00	99.963.358,00	0,00	0,00	99.963.358,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	750.000.000,00	749.719.000,00	0,00	0,00	749.719.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	31.904.986,00	0,00	0,00
<i>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.904.986,00</i>	<i>(31.904.986,00)</i>
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	232.500.000,00	229.259.800,00	0,00	0,00	229.259.800,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	0,00	668.388.976,00	0,00	0,00
<i>Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>668.388.976,00</i>	<i>(668.388.976,00)</i>
<b>Jumlah</b>	<b>8.658.375.992,00</b>	<b>7.461.557.824,00</b>	<b>6.223.956.392,00</b>	<b>6.223.956.392,00</b>	<b>1.237.601.432,00</b>

Tabel 5.20 Rincian Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.825.581.923,00	76.354.497.243,00	42.756.902.417,00	0,00	76.354.497.243,00
<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.756.902.417,00</i>	<i>(42.756.902.417,00)</i>
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.180.036.800,00	1.029.864.000,00	35.786.373.431,00	35.786.373.431,00	(34.756.509.431,00)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	65.232.000,00	64.864.000,00	0,00	0,00	64.864.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>88.250.850.723,00</b>	<b>77.629.225.243,00</b>	<b>78.543.275.848,00</b>	<b>78.543.275.848,00</b>	<b>(914.050.605,00)</b>

Tabel 5.21 Rincian Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	61.400.000,00	61.400.000,00	0,00	0,00	61.400.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	0,00	53.250.000,00
Belanja Beasiswa	52.500.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00





Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.009.735.044,00	6.009.734.400,00	0,00	0,00	6.009.734.400,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.122.819.998,00	6.936.176.022,00	0,00	0,00	6.936.176.022,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	17.820.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00	9.025.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.317.525.042,00</b>	<b>13.104.585.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104.585.422,00</b>

**Tabel 5.22 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Barang dan Jasa BOS	25.401.401.037,00	25.323.843.763,00	16.401.436.845,67	16.401.436.845,67	8.922.406.917,33
<b>Jumlah</b>	<b>25.401.401.037,00</b>	<b>25.323.843.763,00</b>	<b>16.401.436.845,67</b>	<b>16.401.436.845,67</b>	<b>8.922.406.917,33</b>

**Tabel 5.23 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.484.610.932,00	17.723.938.095,53	9.531.433.444,00	9.531.433.444,00	8.192.504.651,53
<b>Jumlah</b>	<b>12.484.610.932,00</b>	<b>17.723.938.095,53</b>	<b>9.531.433.444,00</b>	<b>9.531.433.444,00</b>	<b>8.192.504.651,53</b>

Dari tabel di atas telah dikomparasikan antara realisasi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020, terlihat bahwa realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp1.494.533.124,48 atau 0,40% dari realisasi belanja barang/jasa Tahun Anggaran 2020.

**5.1.2.1.3. Belanja Subsidi**

**31 Desember 2021**  
**Rp2.393.507.500,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp1.881.918.000,00**

Realisasi belanja subsidi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.393.507.500,00 atau 47,87% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp5.000.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.881.918.000,00 maka realisasi belanja subsidi Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp511.589.500,00 atau 27,18% dari realisasi belanja subsidi Tahun Anggaran 2020. Rincian realisasi belanja subsidi disajikan pada **Tabel 5.24**.





**Tabel 5.24 Rincian Realisasi Belanja Subsidi TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000,00	2.393.507.500,00	1.881.918.000,00	1.881.918.000,00	511.589.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>2.393.507.500,00</b>	<b>1.881.918.000,00</b>	<b>1.881.918.000,00</b>	<b>511.589.500,00</b>

Belanja subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 berupa subsidi kepada Perusahaan yaitu berupa subsidi pembelian Beras Daerah (Rasda) bagi masyarakat tidak mampu.

Belanja subsidi tersebut dimaksudkan untuk membantu agar harga jual beras daerah yang diberikan PERUSDA INTIMUNG dapat dijangkau oleh masyarakat tidak mampu.

**5.1.2.1.4. Belanja Hibah**

**31 Desember 2021**  
**Rp20.982.118.202,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp83.194.061.169,00**

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp20.982.118.202,00 atau 90,21% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp23.259.625.136,00 jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tahun 2020 sebesar Rp83.194.061.169,00, maka realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp62.211.942.967,00 dari realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2020, rincian realisasi belanja hibah disajikan pada **Tabel 5.25**.

**Tabel 5.25 Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.955.093.136,00	7.808.870.236,00	75.411.237.974,00	75.411.237.974,00	(67.602.367.738,00)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.204.532.000,00	12.087.634.000,00	3.936.748.000,00	3.936.748.000,00	8.150.886.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Tingkat PAUD,TK, SMP, SMA/SMK Swasta	0,00	0,00	3.579.900.000,00	3.579.900.000,00	(3.579.900.000,00)
Belanja Hibah Kepada Partai Politik	300.000.000,00	285.613.966,00	266.175.195,00	266.175.195,00	19.438.771,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.259.625.136,00</b>	<b>20.982.118.202,00</b>	<b>83.194.061.169,00</b>	<b>83.194.061.169,00</b>	<b>(62.211.942.967,00)</b>





**5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial**

**31 Desember 2021**  
**Rp2.694.382.502,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp3.909.543.425,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.694.382.502,00 atau 88,36% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.049.213.200,00 dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 sebesar Rp3.909.543.425,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan pada **Tabel 5.26**.

**Tabel 5.26 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.514.000.000,00	2.159.324.721,00	2.339.000.000,00	0,00	2.159.324.721,00
Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa Kurang Mampu	0,00	0,00	0,00	2.339.000.000,00	(2.339.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	1.312.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Baru Masyarakat Kurang Mampu Swadaya (DAK AFIRMASI)	0,00	0,00	0,00	1.312.500.000,00	(1.312.500.000,00)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	535.213.200,00	535.057.781,00	148.590.000,00	50.000.000,00	485.057.781,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	109.453.425,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Biaya Berobat kepada Keluarga Miskin	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00	(18.590.000,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang Kena Musibah	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	(57.500.000,00)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Mengalami Musibah Dukacita	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)
Belanja Bantuan Organisasi Sosial Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	51.953.425,00	(51.953.425,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.049.213.200,00</b>	<b>2.694.382.502,00</b>	<b>3.909.543.425,00</b>	<b>3.909.543.425,00</b>	<b>(1.215.160.923,00)</b>

Berdasarkan data di atas realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp1.215.160.923,00 dari realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020.

**5.1.2.2 Belanja Modal**

**31 Desember 2021**  
**Rp101.357.607.237,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp152.038.868.147,00**

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp101.357.607.237,00 atau 91,17% dari anggaran sebesar Rp111.172.312.460,00 dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp152.038.868.147,00. Belanja Modal yang telah terealisasi Tahun 2021 terdiri dari: (1) Tanah sebesar Rp0,00; (2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp54.902.417.219,00; (3) Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.725.005.950,00; (4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar



Rp30.695.745.068,00; dan (5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.034.439.000,00; pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau disajikan pada **Lampiran 2**. Rincian realisasi belanja modal disajikan pada **Tabel 5.27**.

**Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Modal Tanah	1.444.091.277,00	0,00	78.305.181,00	78.305.181,00	(78.305.181,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.895.084.300,00	54.902.417.219,00	25.894.489.860,00	25.894.489.860,00	29.007.927.359,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.445.773.681,00	14.725.005.950,00	50.360.093.912,00	50.360.093.912,00	(35.635.087.962,00)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.311.695.700,00	30.695.745.068,00	74.974.715.067,00	74.974.715.067,00	(44.278.969.999,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.075.667.502,00	1.034.439.000,00	731.264.127,00	0,00	1.034.439.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	731.264.127,00	(731.264.127,00)
<b>Jumlah</b>	<b>111.172.312.460,00</b>	<b>101.357.607.237,00</b>	<b>152.038.868.147,00</b>	<b>152.038.868.147,00</b>	<b>(50.681.260.910,00)</b>

**5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah**

**31 Desember 2021**  
**Rp0,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp78.305.181,00**

Realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp1.444.091.277,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp78.305.181,00, maka belanja modal tanah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp78.305.181,00 atau 100%. Realisasi belanja modal tanah disajikan pada **Tabel 5.28**.

**Tabel 5.28 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Modal Tanah untuk Makam	1.444.091.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	19.792.500,00	19.792.500,00	(19.792.500,00)
Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	0,00	0,00	58.512.681,00	58.512.681,00	(58.512.681,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.444.091.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.305.181,00</b>	<b>78.305.181,00</b>	<b>(78.305.181,00)</b>





**5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin** **31 Desember 2021**  
**Rp54.902.417.219,00** **31 Desember 2020**  
**Rp25.894.489.860,00**

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 sebesar Rp54.902.417.219,00 atau 91,66% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp59.895.084.300,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.894.489.860,00, maka belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp29.007.927.359,00 atau 112,02%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin disajikan pada **Tabel 5.29**.

**Tabel 5.29 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Modal Excavator	2.101.754.000,00	2.061.160.000,00	0,00	0,00	2.061.160.000,00
Belanja Modal Hauler	0,00	0,00	899.000.000,00	899.000.000,00	(899.000.000,00)
Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	12.720.910.000,00	12.098.260.000,00	0,00	0,00	12.098.260.000,00
Belanja Modal Mesin Proses Apung	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	156.100.000,00	156.100.000,00	(156.100.000,00)
Belanja Modal Pompa	84.900.000,00	98.365.439,00	27.965.000,00	27.965.000,00	70.400.439,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	7.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	1.989.000.000,00	1.989.000.000,00	(1.989.000.000,00)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.145.200.000,00	1.908.000.000,00	0,00	0,00	1.908.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	(62.400.000,00)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	411.000.000,00	268.987.512,00	97.000.000,00	97.000.000,00	171.987.512,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	3.209.600.000,00	3.209.600.000,00	(3.209.600.000,00)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.474.500.000,00	1.297.110.180,00	0,00	0,00	1.297.110.180,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	10.295.000,00	10.295.000,00	0,00	0,00	10.295.000,00
Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	(1.650.000,00)
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	16.266.000,00	16.266.000,00	(16.266.000,00)
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	35.156.000,00	18.952.000,00	0,00	0,00	18.952.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(6.600.000,00)
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	79.590.500,00	79.590.500,00	0,00	0,00	79.590.500,00
Belanja Modal Mesin Ketik	15.927.000,00	11.496.000,00	0,00	0,00	11.496.000,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	63.900.000,00	63.900.000,00	(63.900.000,00)
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	65.212.000,00	65.212.000,00	(65.212.000,00)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	18.253.000,00	18.253.000,00	236.947.000,00	236.947.000,00	(218.694.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	768.955.500,00	711.614.400,00	2.342.980.099,00	2.342.980.099,00	(1.631.365.699,00)
Belanja Modal Mebel	889.350.000,00	846.650.000,00	1.791.252.500,00	1.791.252.500,00	(944.602.500,00)
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	(1.725.000,00)
Belanja Modal Alat Pembersih	66.798.000,00	63.108.000,00	58.130.000,00	58.130.000,00	4.978.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	788.211.816,00	762.206.716,00	640.243.100,00	640.243.100,00	121.963.616,00
Belanja Modal Alat Dapur	282.664.000,00	266.297.600,00	62.135.000,00	62.135.000,00	204.162.600,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	28.800.000,00	551.058.700,00	551.058.700,00	(522.258.700,00)
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	111.840.910,00	111.840.910,00	33.834.250,00	33.834.250,00	78.006.660,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	216.135.000,00	217.429.200,00	67.872.500,00	67.872.500,00	149.556.700,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	27.225.000,00	27.223.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	11.923.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	160.928.000,00	160.925.000,00	104.020.000,00	104.020.000,00	56.905.000,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	204.376.000,00	144.076.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	125.676.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	128.327.600,00	131.127.600,00	102.668.000,00	102.668.000,00	28.459.600,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	833.814.000,00	623.558.000,00	24.000.000,00	359.591.421,00	263.966.579,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	74.531.600,00	79.531.600,00	178.250.000,00	83.250.000,00	(3.718.400,00)
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	44.416.000,00	44.416.000,00	117.982.000,00	0,00	44.416.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	163.559.500,00	163.559.500,00	122.609.421,00	0,00	163.559.500,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	68.870.700,00	68.870.700,00	(68.870.700,00)
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	(8.200.000,00)
Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Microwave FPU	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	2.960.000,00	8.472.818.366,00	8.472.818.366,00	(8.469.858.366,00)
Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	313.160.000,00	313.160.000,00	(313.160.000,00)
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	64.350.000,00	0,00	0,00	64.350.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	4.478.475.723,00	4.274.321.348,00	0,00	0,00	4.274.321.348,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.698.288.605,00	9.953.321.169,00	0,00	0,00	9.953.321.169,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	(53.000.000,00)
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	(1.650.000,00)
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	(11.400.000,00)
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	0,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	(9.800.000,00)





Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	6.595.000,00	6.595.000,00	(6.595.000,00)
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	14.580.000,00	14.580.000,00	(14.580.000,00)
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	25.695.000,00	25.695.000,00	(25.695.000,00)
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	17.691.200,00	17.691.200,00	(17.691.200,00)
Alat Ukur Fisika Kesehatan	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	(1.760.000,00)
Belanja Modal Peralatan Umum	803.410.000,00	693.866.000,00	0,00	0,00	693.866.000,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	3.169.244.500,00	3.006.015.400,00	367.230.000,00	367.230.000,00	2.638.785.400,00
Belanja Modal Personal Computer	1.833.887.240,00	3.682.527.075,00	2.328.856.399,00	2.398.171.399,00	1.284.355.676,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	4.408.321.170,00	4.134.965.870,00	0,00	0,00	4.134.965.870,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	(3.250.000,00)
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	349.275.625,00	349.275.625,00	(349.275.625,00)
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.878.307.080,00	2.880.343.600,00	434.166.500,00	364.851.500,00	2.515.492.100,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	224.548.000,00	223.652.300,00	281.890.500,00	281.890.500,00	(58.238.200,00)
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.339.385.556,00	2.798.495.400,00	0,00	0,00	2.798.495.400,00
Belanja Modal Produksi Lainnya	900.000.000,00	660.072.500,00	0,00	0,00	660.072.500,00
Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	80.000.000,00	79.973.400,00	0,00	0,00	79.973.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.895.084.300,00</b>	<b>54.902.417.219,00</b>	<b>25.894.489.860,00</b>	<b>25.894.489.860,00</b>	<b>29.007.927.359,00</b>

### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

**31 Desember 2021**  
**Rp14.725.005.950,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp50.360.093.912,00**

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar Rp14.725.005.950,00 atau 84,40% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp17.445.773.681,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.360.093.912,00, maka belanja modal gedung dan bangunan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp35.635.087.962,00 atau 70,76%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan disajikan pada **Tabel 5.30**.

**Tabel 5.30 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.742.201.980,00	2.260.246.400,00	8.294.377.515,00	8.294.377.515,00	(6.034.131.115,00)
Belanja Modal Bangunan Gudang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	556.210.000,00	552.610.000,00	0,00	0,00	552.610.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.532.830.800,00	2.201.715.300,00	17.496.143.072,00	17.496.143.072,00	(15.294.427.772,00)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.451.687.000,00	5.293.087.250,00	8.027.721.000,00	8.027.721.000,00	(2.734.633.750,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	647.538.600,00	599.660.000,00	9.666.734.575,00	9.666.734.575,00	(9.067.074.575,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.310.308.100,00	1.127.583.000,00	419.350.000,00	419.350.000,00	708.233.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	533.265.100,00	508.605.100,00	0,00	0,00	508.605.100,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	32.007.500,00	31.861.000,00	0,00	0,00	31.861.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	492.649.750,00	5.917.004.750,00	(5.877.004.750,00)
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.291.589.000,00	944.255.900,00	0,00	0,00	944.255.900,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Taman	52.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	192.000.000,00	190.375.000,00	5.424.355.000,00	0,00	190.375.000,00
Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	472.358.000,00	472.358.000,00	(472.358.000,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	974.135.601,00	943.007.000,00	0,00	0,00	943.007.000,00
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	0,00	66.405.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	48.405.000,00	(48.405.000,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>17.445.773.681,00</b>	<b>14.725.005.950,00</b>	<b>50.360.093.912,00</b>	<b>50.360.093.912,00</b>	<b>(35.635.087.962,00)</b>

**5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

**31 Desember 2021**  
**Rp30.695.745.068,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp74.974.715.067,00**

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berubah menjadi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2021 sebesar Rp30.695.745.068,00 atau 98,03% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp31.311.695.700,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp74.974.715.067,00, maka belanja modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp44.278.969.999,00 atau 59,06%. Realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi disajikan pada **Tabel 5.31**.





**Tabel 5.31 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi  
TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019			Permendagri 64 Th 2013	Naik/(Turun)
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Belanja Modal Jalan Kabupaten	29.939.660.300,00	29.397.067.500,00	60.860.637.517,00	60.860.637.517,00	(31.463.570.017,00)
Belanja Modal Jalan Desa	141.909.000,00	141.283.235,00	526.689.500,00	526.689.500,00	(385.406.265,00)
Belanja Modal Jalan Khusus	0,00	0,00	3.172.996.800,00	3.172.996.800,00	(3.172.996.800,00)
Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	3.570.483.000,00	3.570.483.000,00	(3.570.483.000,00)
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	19.214.250,00	19.214.250,00	(19.214.250,00)
Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	150.000.000,00	146.323.000,00	0,00	0,00	146.323.000,00
Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	149.958.000,00	134.403.000,00	0,00	0,00	134.403.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	6.791.704.000,00	6.791.704.000,00	(6.791.704.000,00)
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	13.990.000,00	13.990.000,00	(13.990.000,00)
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	295.000.000,00	292.694.333,00	0,00	0,00	292.694.333,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	(19.000.000,00)
Belanja Modal Instalasi Lain	113.016.000,00	112.999.000,00	0,00	0,00	112.999.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	518.522.400,00	467.375.000,00	0,00	0,00	467.375.000,00
Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	3.630.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.311.695.700,00</b>	<b>30.695.745.068,00</b>	<b>74.974.715.067,00</b>	<b>74.974.715.067,00</b>	<b>(44.278.969.999,00)</b>

**5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

**31 Desember 2021**  
**Rp1.034.439.000,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp0,00**

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar Rp1.034.439.000,00 atau 96,17% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp1.075.667.502,00 dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya disajikan pada **Tabel 5.32.**







**Tabel 5.33 Rincian Realisasi Penyaluran Belanja Tak Terduga ke OPD TA 2021**

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BAGIAN UMUM	22.654.340.430,00
2	KEC. MALINAU KOTA	50.000.000,00
3	KEC. MALINAU UTARA	50.000.000,00
4	KEC. MALINAU BARAT	50.000.000,00
5	RSUD	2.288.927.065,00
6	BPBD	199.510.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.292.777.495,00</b>

**5.1.2.4. Belanja Transfer**

**31 Desember 2021**  
**Rp326.779.385.000,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp313.606.773.000,00**

Merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021 dimana realisasi Belanja Transfer merupakan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp326.779.385.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp326.779.385.000,00 dan realisasi Belanja Transfer merupakan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp313.606.773.000,00.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan telah ditransfer langsung ke rekening desa-desa sebesar Rp171.145.649.000,00 dan dana RT Bersih yang diperuntukkan bagi seluruh RT se-Kabupaten Malinau sebesar Rp99.060.000.000,00 serta Rp56.573.736.000,00 merupakan dana Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Rincian Belanja Transfer tersaji pada **Tabel 5.34**.

**Tabel 5.34 Realisasi Belanja Transfer**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana Desa (ABPN)	171.145.649.000,00
2	Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)	56.573.736.000,00
3	RT Bersih	99.060.000.000,00
<b>Total</b>		<b>326.779.385.000,00</b>





### 5.1.3. Surplus/Defisit

31 Desember 2021  
Rp66.261.188.000,22

31 Desember 2020  
Rp17.445.156.559,18

Berdasarkan perhitungan, yaitu dengan mengurangkan jumlah realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.419.812.373.811,41 dan jumlah realisasi belanja daerah sebesar Rp1.353.551.185.811,19 (termasuk didalamnya Belanja Transfer sebesar Rp326.779.385.000,00), maka pada Tahun Anggaran 2021 terjadi selisih lebih atau surplus anggaran sebesar Rp66.261.188.000,22.

Sedangkan apabila diperhatikan dari sisi penganggaran yaitu dengan melakukan pengurangan antara total anggaran pendapatan daerah dan total anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2021 diperkirakan terdapat defisit sebesar Rp98.069.012.806,00.

### 5.1.4. Pembiayaan Netto

31 Desember 2021  
Rp97.581.169.024,69

31 Desember 2020  
Rp83.623.856.246,51

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, realisasi pembiayaan *netto* adalah sebesar Rp97.581.169.024,69 yang berarti 99,50% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp98.069.012.806,00 dan realisasi pembiayaan *netto* Tahun 2020 sebesar Rp83.623.856.246,51.

Pembiayaan *netto* merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp100.581.169.024,69 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00.

#### 5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2021  
Rp100.581.169.024,69

31 Desember 2020  
Rp236.623.856.246,51

##### 5.1.4.1.1. Sisa Lebih

**Perhitungan Anggaran  
Tahun Sebelumnya  
(SiLPA)**

31 Desember 2021  
Rp100.581.169.024,69

31 Desember 2020  
Rp86.623.856.246,51

Realisasi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp100.581.169.024,69. Jumlah realisasi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah 99,52% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp100.581.169.024,69 merupakan dana yang tersedia pada awal Tahun 2021 yang siap digunakan/dibelanjakan dalam tahun berjalan. Penggunaan SiLPA Tahun 2021 terdapat koreksi dimana terdapat kesalahan pembukuan ditahun sebelumnya sehingga realisasi terlihat tidak sepenuhnya





digunakan. Adapun rincian penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021 pada **Tabel 5.35**.

**Tabel 5.35 Rincian penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021**

*(dalam rupiah)*

Kode Transaksi	Uraian	Jumlah
<b>Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya</b>		
01b/SILPA/2021	Koreksi SILPA Tahun 2020	101.069.012.805,69
<b>Total Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya</b>		<b>101.069.012.805,69</b>
<b>Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>		
01b/JK/Dana Kapitasi/IV/2021	Koreksi atas Kurang Catat di saldo Akhir 2020 Dana Kapitasi Jasa Pelayanan Bulan okt - Desember 2020 PKM Long Loreh Senilai 58.755.780,- dan Lebih catat di PKM Malinau seberang Seberang 1,-	58.755.781,00
01b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Reguler pada SDN 006 MENTARANG (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2019)	9.460.000,00
02b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Reguler pada SDN 003 MENTARANG (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK sudah di SPJ pada Tahun 2019)	4.634.000,00
03b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Kurang Catat Belanja Bos Afirmasi Tahun 2020 pada SDN 008 MENTARANG HULU	1.170.000,00
04b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Kurang Catat Belanja Bos Afirmasi Tahun 2020 pada SDN 001 MALINAU SELATAN	9.268.000,00
05b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Kurang Catat Belanja Bos Afirmasi Tahun 2020 pada SMPN 2 M. SELATAN HULU	10.590.000,00
06b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Afirmasi pada SDN 006 MALINAU KOTA (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2019)	91.966.000,00
07b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Afirmasi pada SDN 001 MENTARANG HULU (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2019)	62.000.000,00
08b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Afirmasi pada SDN 001 MENTARANG HULU (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020)	60.000.000,00
09b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Kinerja pada SDN 002 SUNGAI BOH (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020)	60.000.000,00
10b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Afirmasi pada SDN 004 SUNGAI BOH (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020)	60.000.000,00
11b/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Kinerja pada SMPN 1 SUNGAI BOH (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020)	60.000.000,00
<b>Total Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>		<b>487.843.781,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>100.581.169.024,69</b>







PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

SILPA TA 2021		SILPA TA 2020	
URAIAN	NILAI	URAIAN	NILAI
Piutang PFK 2016 (dapat dilihat di Simda Keuangan TA 2016 no.Bukti: 02d/JK/lebih setor/BPKAD-PPKD/2016; 03d/JK/lebih bayar/BPKAD-PPKD/2016; 21/JK-BPK/PPKD/2016; 01e/JK/Utang PFK/PPKD/2018; 01f/JK/UtangPFK/PPKD/2018)	880.473,00	Piutang PFK 2016 (dapat dilihat di Simda Keuangan TA 2016 no.Bukti: 02d/JK/lebih setor/BPKAD-PPKD/2016; 03d/JK/lebih bayar/BPKAD-PPKD/2016; 21/JK-BPK/PPKD/2016; 01e/JK/Utang PFK/PPKD/2018; 01f/JK/UtangPFK/PPKD/2018)	880.473,00
Sisa Dana Hibah/Bansos 2015	(55.501,00)	Sisa Dana Hibah/Bansos 2015	(55.501,00)
<b>SILPA TA 2021</b>	<b>163.842.357.024,91</b>	<b>SILPA TA 2020</b>	<b>101.069.012.805,69</b>





## 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2021.

### 5.2.1. Pendapatan – LO

31 Desember 2021  
Rp1.215.000.741.307,64

31 Desember 2020  
Rp1.237.557.503.725,48

Pendapatan - LO Kabupaten Malinau adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.215.000.741.307,64 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.237.557.503.725,48 dengan rincian pada **Tabel 5.37**.

**Tabel 5.37 Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Pendapatan – LO	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	76.112.228.362,75	61.206.524.408,74	24,35
Pendapatan Transfer-LO	1.114.493.126.874,47	1.144.205.809.234,34	(2,60)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	24.395.386.070,42	32.145.170.082,40	(24,11)
<b>Jumlah</b>	<b>1.215.000.741.307,64</b>	<b>1.237.557.503.725,48</b>	<b>(1,82)</b>

Berdasarkan data diatas pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp22.556.762.417,84 atau 1,82% dari pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020.

#### 5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

31 Desember 2021  
Rp76.112.228.362,75

31 Desember 2020  
Rp61.206.524.408,74

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Malinau adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp76.112.228.362,75 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp61.206.524.408,74 dengan rincian pada **Tabel 5.38**.

**Tabel 5.38 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO  
Tahun 2021 dan Tahun 2020**

URAIAN	TA. 2021	TA. 2020	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Pajak Daerah-LO	14.806.527.144,00	11.750.948.921,00	3.055.578.223,00	26,00
Retribusi Daerah-LO	2.347.685.534,00	1.610.837.069,00	736.848.465,00	45,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.348.771.821,36	3.586.422.397,62	(1.237.650.576,26)	(34,51)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	56.609.243.863,39	44.258.316.021,12	12.350.927.842,27	27,91
<b>Jumlah</b>	<b>76.112.228.362,75</b>	<b>61.206.524.408,74</b>	<b>14.905.703.954,01</b>	<b>24,35</b>

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp14.905.703.954,01 atau 24,35% dari pendapatan - LO Tahun Anggaran 2020. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang telah diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan.





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

**5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO** **31 Desember 2021**  
**Rp14.806.527.144,00** **31 Desember 2020**  
**Rp11.750.948.921,00**

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp14.806.527.144,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.750.948.921,00, terjadi peningkatan sebesar Rp3.055.578.223,00 atau 26,00% dengan rincian pada **Tabel 5.39**.

**Tabel 5.39 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
Pajak Hotel-LO	159.588.974,00	142.995.301,00	142.995.301,00	16.593.673,00	11,60
Pajak Losmen-LO	540.000,00	0,00	8.649.000,00	(8.109.000,00)	(93,76)
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	6.864.000,00	8.649.000,00	0,00	6.864.000,00	0,00
Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	(3.480.000,00)	(100,00)
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	61.412.600,00	18.822.200,00	18.822.200,00	42.590.400,00	226,28
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	196.017.561,00	151.569.838,00	151.569.838,00	44.447.723,00	29,32
Kantin - LO	0,00	585.000,00	585.000,00	(585.000,00)	(100,00)
Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	20.520.000,00	15.011.000,00	15.011.000,00	5.509.000,00	36,70
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	4.474.531.345,00	4.080.518.650,00	4.080.518.650,00	394.012.695,00	9,66
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	26.421.725,00	22.631.700,00	22.631.700,00	3.790.025,00	16,75
Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) - LO	0,00	8.434.500,00	8.434.500,00	(8.434.500,00)	(100,00)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	37.416.628,00	59.821.350,00	59.821.350,00	(22.404.722,00)	(37,45)
Pajak Reklame Kain-LO	121.439.900,00	96.251.043,00	96.251.043,00	25.188.857,00	26,17
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	207.951.619,00	231.317.183,00	231.317.183,00	(23.365.564,00)	(10,10)
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	1.687.684.606,00	1.586.607.473,00	1.586.607.473,00	101.077.133,00	6,37
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	139.203.198,00	200.411.840,00	29.229.780,00	109.973.418,00	376,24
Pasir	0,00	0,00	171.182.060,00	(171.182.060,00)	(100,00)
Pajak Tanah Liat-LO	7.758.608,00	712.216.167,00	8.208.360,00	(449.752,00)	(5,48)
Tanah Timbun	0,00	0,00	704.007.807,00	(704.007.807,00)	(100,00)
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	685.008.027,00	508.687.420,00	0,00	685.008.027,00	0,00
Batu Pecah/Kerikil	0,00	0,00	94.866.480,00	(94.866.480,00)	(100,00)
Batu Gunung/Kali	0,00	0,00	171.275.640,00	(171.275.640,00)	(100,00)
Batu Sungai	0,00	0,00	41.121.660,00	(41.121.660,00)	(100,00)
Agregat	0,00	0,00	201.423.640,00	(201.423.640,00)	(100,00)
PBBP2-LO	2.498.475.594,00	2.476.101.408,00	2.476.101.408,00	22.374.186,00	0,90
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	4.156.804.600,00	974.803.600,00	974.803.600,00	3.182.001.000,00	326,42
BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	318.888.159,00	452.034.248,00	452.034.248,00	(133.146.089,00)	(29,45)
<b>Jumlah</b>	<b>14.806.527.144,00</b>	<b>11.750.948.921,00</b>	<b>11.750.948.921,00</b>	<b>3.055.578.223,00</b>	<b>26,00</b>





**5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

**31 Desember 2021**  
**Rp2.347.685.534,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp1.610.837.069,00**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.347.685.534,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.610.837.069,00, terjadi peningkatan sebesar Rp736.848.465,00 atau 45,74%, dengan rincian pada **Tabel 5.40**.

**Tabel 5.40 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO	196.315.200,00	172.732.000,00	172.732.000,00	23.583.200,00	13,65
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO	0,00	2.289.000,00	2.289.000,00	(2.289.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	169.611.240,00	83.000.000,00	0,00	169.611.240,00	0,00
Retribusi Surat Izin Operasional di Bidang Kesehatan (SIK) - LO	0,00	0,00	81.800.000,00	(81.800.000,00)	(100,00)
Retribusi Surat Izin Kesehatan Jasa Boga dan Catering	0,00	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	38.437.500,00	460.000,00	460.000,00	37.977.500,00	8.255,98
Retribusi Los-LO	19.670.000,00	19.530.000,00	19.530.000,00	140.000,00	0,72
Retribusi Kios-LO	189.982.500,00	190.503.000,00	190.503.000,00	(520.500,00)	(0,27)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	43.560.000,00	73.545.000,00	0,00	43.560.000,00	0,00
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	0,00	0,00	2.240.000,00	(2.240.000,00)	(100,00)
Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	0,00	0,00	720.000,00	(720.000,00)	(100,00)
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	0,00	0,00	37.145.000,00	(37.145.000,00)	(100,00)
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	0,00	0,00	11.440.000,00	(11.440.000,00)	(100,00)
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	0,00	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO	1.275.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(5.325.000,00)	(80,68)
Retribusi Industri-LO	35.560.000,00	23.210.000,00	0,00	35.560.000,00	0,00
Retribusi Izin Lingkungan	0,00	0,00	23.210.000,00	(23.210.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	893.940.000,00	339.144.500,00	339.144.500,00	554.795.500,00	163,59
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	900.000,00	2.311.350,00	2.311.350,00	(1.411.350,00)	(61,06)
Retribusi Pemakaian Alat-LO	69.115.334,00	60.668.058,00	60.668.058,00	8.447.276,00	13,92





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00	(3.555.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	0,00	7.660.000,00	6.660.000,00	(6.660.000,00)	(100,00)
Retribusi Surat Izin Usaha Hotel Berbintang dan Melati	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	525.427.000,00	497.301.000,00	497.301.000,00	28.126.000,00	5,66
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	159.871.760,00	98.831.761,00	98.831.761,00	61.039.999,00	61,76
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	1.800.000,00	2.650.000,00	2.500.000,00	(700.000,00)	(28,00)
Retribusi SITU - LO	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)	(100,00)
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO	0,00	5.850.000,00	0,00	-	0,00
Retribusi Izin usaha Jasa Kontruksi (IUK) - LO	0,00	0,00	5.850.000,00	(5.850.000,00)	(100,00)
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO	0,00	16.574.400,00	16.574.400,00	(16.574.400,00)	(100,00)
Retribusi Leges - LO	0,00	0,00	4.272.000,00	(4.272.000,00)	(100,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	0,00	4.272.000,00	0,00	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.347.685.534,00</b>	<b>1.610.837.069,00</b>	<b>1.610.837.069,00</b>	<b>736.848.465,00</b>	<b>45,74</b>

#### 5.2.1.1.3. Pendapatan Hasil

##### Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan –  
LO

31 Desember 2021  
Rp2.348.771.821,36

31 Desember 2020  
Rp3.586.422.397,62

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.348.771.821,36. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.586.422.397,62, terjadi penurunan sebesar Rp1.237.650.576,26 atau 34,51%.

#### 5.2.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

31 Desember 2021  
Rp56.609.243.863,39

31 Desember 2020  
Rp44.258.316.021,12

Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp56.609.243.863,39. Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD Yang Sah – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.258.316.021,12, terjadi





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

peningkatan sebesar Rp12.350.927.842,27 atau 27,91% dengan rincian **Tabel 5.41**.

**Tabel 5.41 Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LO**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.307.191.213,82	1.281.295.614,55	1.281.295.614,55	1.025.895.599,27	80,07
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	9.273.886,01	37.028.349,45	37.028.349,45	(27.754.463,44)	(74,95)
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	16.526.599,00	0,00	0,00	16.526.599,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	3.013.356.164,30	7.736.338.797,76	7.736.338.797,76	(4.722.982.633,46)	(61,05)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	7.715.989.822,32	1.595.534.208,83	353.788.320,51	7.362.201.501,81	2.080,96
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	0,00	782.446.432,32	(782.446.432,32)	(100,00)
Pendapatan Rumah Sakit Pratama Langap - LO	0,00	0,00	173.426.700,00	(173.426.700,00)	(100,00)
Pendapatan Pelayanan Kesehatan BPJS - LO	0,00	0,00	7.433.600,00	(7.433.600,00)	(100,00)
Pendapatan Rumah Sakit Pratama Long Ampung - LO	0,00	0,00	63.467.150,00	(63.467.150,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Pensiun - LO	0,00	0,00	214.972.006,00	(214.972.006,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	120.160.466,89	834.196.132,18	26.152.454,00	94.008.012,89	359,46
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	0,00	0,00	808.043.678,18	(808.043.678,18)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.789.968,00	3.456.168,00	3.456.168,00	(1.666.200,00)	(48,21)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO	26.472,00	0,00	0,00	26.472,00	0,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	103.595.782,00	112.459.903,00	112.459.903,00	(8.864.121,00)	(7,88)
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	60.030.000,00	0,00	0,00	60.030.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	61.078.100,00	217.630.800,00	217.630.800,00	(156.552.700,00)	(71,93)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	8.409.200,00	34.259.350,00	34.259.350,00	(25.850.150,00)	(75,45)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa <sup>u</sup> Luar Negeri-LO	1.141.200,00	0,00	0,00	1.141.200,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM-LO	3.902.065,00	0,00	0,00	3.902.065,00	0,00
Pendapatan dari BLUD-LO	38.617.028.109,05	27.363.131.978,70	27.427.276.907,00	11.189.751.202,05	40,80
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	0,00	0,00	-64.144.928,30	64.144.928,30	(100,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	98.302.544,00	0,00	0,00	98.302.544,00	0,00



Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
Hasil Penjualan Aset Lainnya- Aset Lain-Lain- LO	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	(4.880.000,00)	(100,00)
Hasil Sewa BMD-LO	0,00	2.398.685,65	2.398.685,65	(2.398.685,65)	(100,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	4.471.442.271,00	4.573.785.699,00	4.573.785.699,00	(102.343.428,00)	(2,24)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	461.920.334,00	0,00	-	0,00
<i>Pendapatan Lain-lain BLUD - LO</i>	0,00	0,00	461.920.334,00	(461.920.334,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>56.609.243.863,39</b>	<b>44.258.316.021,12</b>	<b>44.258.316.021,12</b>	<b>12.350.927.842,27</b>	<b>27,91</b>

**5.2.1.2. Pendapatan Transfer –LO** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp1.114.493.126.874,47** **Rp1.144.205.809.234,34**

Pendapatan Transfer - LO merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer tahun 2021 diperoleh Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021 berdasarkan Perpres Nomor 113 Tahun 2020, PMK Nomor 25/PMK/2021, PMK Nomor 129/PMK/2021, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.63/2021, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.354/2021.

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Malinau adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.114.493.126.874,47, sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.144.205.809.234,34, dengan rincian sebagai berikut:

**5.2.1.2.1. Pendapatan Transfer** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Pemerintah Pusat – LO** **Rp1.061.132.887.011,00** **Rp1.101.007.264.673,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Kabupaten Malinau untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.061.132.887.011,00, sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.101.007.264.673,00, dengan rincian sebagai berikut:

**5.2.1.2.1.1. Dana Transfer Umum-  
Dana Bagi Hasil (DBH)-  
LO** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp152.466.924.000,00** **Rp155.397.444.950,00**

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp152.466.924.000,00. Jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Pajak – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp155.397.444.950,00, terjadi penurunan sebesar Rp2.930.520.950,00 atau 1,89% dengan rincian pada **Tabel 5.42**.



Tabel 5.42 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
DBH PBB-LO	18.396.390.000,00	18.414.095.900,00	0,00	18.396.390.000,00	-
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	0,00	0,00	4.327.246.700,00	(4.327.246.700,00)	(100,00)
Biaya Pungut PBB Perhutanan - LO	0,00	0,00	180.291.300,00	(180.291.300,00)	(100,00)
Biaya Pungut PBB Migas - LO	0,00	0,00	172.105.400,00	(172.105.400,00)	(100,00)
Biaya Pungut PBB Non Migas Lainnya - LO	0,00	0,00	214.074.000,00	(214.074.000,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari PBB Migas - LO	0,00	0,00	4.951.128.000,00	(4.951.128.000,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari PBB Non Migas Lainnya - LO	0,00	0,00	6.157.269.300,00	(6.157.269.300,00)	(100,00)
DBH PBB Bagi Rata - LRA	0,00	0,00	2.391.207.300,00	(2.391.207.300,00)	(100,00)
Biaya Pungut PBB Sektor Lainnya	0,00	0,00	697.200,00	(697.200,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Lainnya	0,00	0,00	20.076.700,00	(20.076.700,00)	(100,00)
DBH PPh Pasal 21-LO	4.116.293.000,00	0,00	0,00	4.116.293.000,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	205.490.000,00	3.778.397.500,00	3.778.397.500,00	(3.572.907.500,00)	(94,56)
DBH CHT-LO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	902.406.000,00	4.884.208.700,00	4.884.208.700,00	(3.981.802.700,00)	(81,52)
DBH SDA Gas Bumi-LO	119.833.000,00	589.419.300,00	589.419.300,00	(469.586.300,00)	(79,67)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	638.478.000,00	723.520.775,00	723.520.775,00	(85.042.775,00)	(11,75)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	110.122.362.000,00	112.465.848.625,00	112.465.848.625,00	(2.343.486.625,00)	(2,08)
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	14.291.080.000,00	10.216.804.200,00	10.216.804.200,00	4.074.275.800,00	39,88
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	2.546.160.000,00	3.223.669.950,00	3.223.669.950,00	(677.509.950,00)	(21,02)
DBH SDA Perikanan-LO	1.128.319.000,00	1.101.480.000,00	1.101.480.000,00	26.839.000,00	2,44
<b>Jumlah</b>	<b>152.466.924.000,00</b>	<b>155.397.444.950,00</b>	<b>155.397.444.950,00</b>	<b>(2.930.520.950,00)</b>	<b>(1,89)</b>

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO ditetapkan berdasarkan Perpres dan PMK, kenaikan dan penurunan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO setiap tahunnya dipengaruhi oleh seberapa besar alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Malinau.

**5.2.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum – LO**

**31 Desember 2021**  
**Rp780.635.100.000,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp784.353.307.000,00**

Dana Alokasi Umum – LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp780.635.100.000,00. Jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp784.353.307.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.718.207.000,00 atau 0,47% dari tahun sebelumnya.

**5.2.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus Fisik – LO**

**31 Desember 2021**  
**Rp64.578.624.516,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp97.978.950.122,00**

Dana Alokasi Khusus Fisik – LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp64.578.624.516,00. Jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus





Fisik – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp97.978.950.122,00, terjadi penurunan sebesar Rp33.400.325.606,00 atau 34,09% dengan rincian pada **Tabel 5.43**.

**Tabel 5.43 Dana Alokasi Khusus Fisik – LO**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	866.100.686,00	1.491.762.979,00	0,00	866.100.686,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	3.310.430.000,00	3.738.274.645,00	0,00	3.310.430.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.091.790.000,00	2.137.668.750,00	0,00	2.091.790.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	150.511.500,00	0,00	0,00	0,00
DAK Bidang Pendidikan - LO	0,00	0,00	7.518.217.874,00	(7.518.217.874,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	1.538.600.521,00	2.680.427.594,00	0,00	1.538.600.521,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	3.241.978.632,00	5.395.401.574,00	0,00	3.241.978.632,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	2.450.780.518,00	6.638.396.131,00	0,00	2.450.780.518,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	7.571.734.981,00	0,00	0,00	7.571.734.981,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	1.399.509.000,00	598.676.000,00	0,00	1.399.509.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	256.500.000,00	0,00	0,00	256.500.000,00	0,00
DAK Bidang Kesehatan - LO	0,00	0,00	15.312.901.299,00	(15.312.901.299,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	3.484.740.000,00	367.500.000,00	0,00	3.484.740.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	9.801.111.300,00	12.425.568.000,00	0,00	9.801.111.300,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	5.298.410.994,00	2.872.612.201,00	0,00	5.298.410.994,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	1.731.220.650,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	1.697.297.289,00	0,00	0,00	0,00
DAK Penugasan - LO			19.094.198.140,00	(19.094.198.140,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	638.591.000,00	0,00	0,00	638.591.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	13.645.443.000,00	27.402.221.000,00	27.402.221.000,00	(13.756.778.000,00)	(50,20)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	1.643.202.300,00	0,00	0,00	1.643.202.300,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	1.629.968.384,00	0,00	0,00	1.629.968.384,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	1.378.184.000,00	1.378.184.000,00	(1.378.184.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	2.160.630.999,00	2.160.630.999,00	(2.160.630.999,00)	(100,00)
DAK AFFIRMASI - LO	0,00	0,00	25.112.596.810,00	(25.112.596.810,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP- LO	0,00	889.320.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO	0,00	15.842.696.560,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO	0,00	6.846.078.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi-LO	0,00	1.174.502.250,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler Lo	4.757.863.200,00	0,00	0,00	4.757.863.200,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan LO	951.870.000,00	0,00	0,00	951.870.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>64.578.624.516,00</b>	<b>97.978.950.122,00</b>	<b>97.978.950.122,00</b>	<b>(33.400.325.606,00)</b>	<b>(34,09)</b>

**5.2.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO** 31 Desember 2021  
Rp43.827.052.495,00 31 Desember 2020  
Rp41.676.211.601,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp43.827.052.495,00. Jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp41.676.211.601,00, terjadi peningkatan sebesar Rp2.150.840.894,00 atau 5,16% dengan rincian pada **Tabel 5.44.**

**Tabel 5.44 Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	17.682.954.000,00	15.858.394.000,00	15.858.394.000,00	1.824.560.000,00	11,51
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	792.000.000,00	2.371.761.000,00	2.371.761.000,00	(1.579.761.000,00)	(66,61)
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	2.908.507.000,00	3.970.233.000,00	3.970.233.000,00	(1.061.726.000,00)	(26,74)
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	1.340.400.000,00	1.533.600.000,00	1.533.600.000,00	(193.200.000,00)	(12,60)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	541.700.000,00	544.350.000,00	544.350.000,00	(2.650.000,00)	(0,49)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	16.763.790.895,00	16.575.081.401,00	16.575.081.401,00	188.709.494,00	1,14
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.391.271.600,00	0,00	0,00	1.391.271.600,00	0,00





Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	390.304.000,00	0,00	0,00	390.304.000,00	0,00
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	1.284.742.000,00	648.642.200,00	648.642.200,00	636.099.800,00	98,07
Dana Pelayanan Kepariwisata - LO	0,00	174.150.000,00	174.150.000,00	(174.150.000,00)	(100)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal LO	381.383.000,00	0,00	0,00	381.383.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian LO	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.827.052.495,00</b>	<b>41.676.211.601,00</b>	<b>41.676.211.601,00</b>	<b>2.150.840.894,00</b>	<b>5,16</b>

**5.2.1.2.1.5. Pendapatan Dana Insentif Daerah - LO** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp19.625.186.000,00** **Rp21.601.351.000,00**

Pendapatan Dana Insentif Daerah - LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp19.625.186.000,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah - LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.601.351.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.976.165.000,00 atau 9,15%.

**5.2.1.2.1.6. Pendapatan Dana Desa - LO** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp0,00** **Rp0,00**

Pendapatan Dana Desa - LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00. Pengakuan pendapatan Dana Desa - LO yang mengacu pada IPSAP 02 yang tidak dapat mengakui dikarenakan bukan merupakan pendapatan daerah.

**5.2.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp53.360.239.863,47** **Rp43.198.544.561,34**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Kabupaten Malinau untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.360.239.863,47, sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.198.544.561,34, dengan rincian sebagai berikut:

**5.2.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp41.177.098.953,00** **Rp33.485.035.191,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp41.177.098.953,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.485.035.191,00 terjadi peningkatan sebesar Rp7.692.063.762,00 atau 22,97% dengan rincian pada **Tabel 5.45**.





**Tabel 5.45 Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan LO 2021 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)	Pendapatan LO 2020 (Rp)		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.305.144.683,00	3.093.949.847	3.093.949.847	211.194.836,00	6,83
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	3.990.119.534,00	3.239.183.631	3.239.183.631	750.935.903,00	23,18
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	29.052.736.825,00	21.692.353.982	21.692.353.982	7.360.382.843,00	33,93
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	169.224.410,00	178.170.768	178.170.768	(8.946.358,00)	(5,02)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	4.659.873.501,00	5.281.376.963	5.281.376.963	(621.503.462,00)	(11,77)
<b>Jumlah</b>	<b>41.177.098.953,00</b>	<b>33.485.035.191,00</b>	<b>33.485.035.191,00</b>	<b>7.692.063.762,00</b>	<b>22,97</b>

**5.2.1.2.2. Bantuan Keuangan – LO** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp12.183.140.910,47** **Rp9.713.509.370,34**

Bantuan Keuangan – LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp12.183.140.910,47. Jika dibandingkan dengan Bantuan Keuangan – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.713.509.370,34 terjadi peningkatan sebesar Rp2.469.631.540,13 atau 25,42%.

**5.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp24.395.386.070,42** **Rp32.145.170.082,40**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp24.395.386.070,42. Jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp32.145.170.082,40 terjadi penurunan sebesar Rp7.749.784.011,98 atau 24,11%, dengan rincian pada **Tabel 5.46**.

**Tabel 5.46 Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO  
Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Pendapatan LO 2021	Pendapatan LO 2020	Pendapatan LO 2020		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	2.917.819.570,42	12.011.865.701,20	12.011.865.701,20	(9.094.046.130,78)	(75,71)
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	18.035.254.000,00	14.495.310.000,00	14.495.310.000,00	3.539.944.000,00	24,42
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	12.790.000,00	761.756.326,20	761.756.326,20	(748.966.326,20)	(98,32)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	3.007.316.500,00	0,00	0,00	3.007.316.500,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	422.206.000,00	4.876.238.055,00	4.876.238.055,00	(4.454.032.055,00)	(91,34)
<b>Jumlah</b>	<b>24.395.386.070,42</b>	<b>32.145.170.082,40</b>	<b>32.145.170.082,40</b>	<b>(7.749.784.011,98)</b>	<b>(24,11)</b>



Lain-lain pendapatan yang sah - LO merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang berupa hibah dari pemerintah pusat, provinsi, badan/lembaga/organisasi swasta.

**5.2.2. Beban Daerah** 31 Desember 2021  
Rp1.258.246.536.092,26 31 Desember 2020  
Rp1.310.506.219.990,40

Beban Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.258.246.536.092,26. Jika dibandingkan dengan Beban Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.310.506.219.990,40 terjadi penurunan sebesar Rp52.259.683.898,14 atau 3,99% dengan rincian pada **Tabel 5.47**.

**Tabel 5.47 Beban Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA. 2021	TA. 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)		
Beban Pegawai	504.769.183.242,00	481.316.331.226,00	23.452.852.016,00	4,87
Beban Barang dan Jasa	370.983.093.987,79	373.222.643.783,45	(2.239.549.795,66)	(0,60)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	2.393.507.500,00	1.881.918.000,00	511.589.500,00	27,18
Beban Hibah	21.718.178.702,00	87.825.444.881,33	(66.107.266.179,33)	(75,27)
Beban Bantuan Sosial	2.694.382.502,00	3.857.590.000,00	(1.163.207.498,00)	(30,15)
Beban Penyisihan Piutang	1.187.012.560,86	1.734.227.235,57	(547.214.674,71)	(31,55)
Beban Lain-lain	628.262.643,00	0,00	628.262.643,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.992.781.888,42	32.740.435.493,76	252.346.394,66	0,77
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.488.517.229,00	34.288.388.141,00	1.200.129.088,00	3,50
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	128.616.023.771,10	137.069.695.657,07	(8.453.671.885,97)	(6,17)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	168.197.465,00	0,00	168.197.465,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	973.658.601,09	935.807.572,220	37.851.028,87	4,04
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	155.633.736.000,00	155.633.738.000,00	(2.000,00)	(0,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.258.246.536.092,26</b>	<b>1.310.506.219.990,40</b>	<b>(52.259.683.898,14)</b>	<b>(3,99)</b>

Beban daerah merupakan beban yang ditanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan Gedung dan bangunan, beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi, beban penyusutan aset tetap lainnya, beban penyusutan aset lainnya, beban amortisasi aset tidak berwujud, beban bagi hasil, dan beban bantuan keuangan.

**5.2.2.1. Beban Pegawai** 31 Desember 2021  
Rp504.769.183.242,00 31 Desember 2020  
Rp481.316.331.226,00

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp504.769.183.242,00. Jika dibandingkan dengan Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp481.316.331.226,00 terjadi peningkatan sebesar Rp23.452.852.016,00 atau 4,87%, dengan rincian pada **Tabel 5.48**.





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Tabel 5.48 Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Gaji Pokok ASN	156.358.290.034,00	158.966.350.463,00	132.817.946.163,00	23.540.343.871,00	17,72
Beban Uang Representasi DPRD	450.765.000,00	375.795.000,00	0,00	450.765.000,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	9.600.000,00	46.800.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00
Beban Tunjangan Hari Raya (THR) - LO	0,00	0,00	13.102.467.500,00	(13.102.467.500,00)	(100,00)
Beban Gaji Ketigabelas - LO	0,00	0,00	13.468.531.800,00	(13.468.531.800,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	15.308.659.384,00	13.008.439.256,00	13.044.135.056,00	2.264.524.328,00	17,36
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	29.479.800,00	29.143.800,00	0,00	29.479.800,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.344.000,00	6.552.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.981.280.000,00	6.175.735.000,00	6.804.877.750,00	176.402.250,00	2,59
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	653.609.250,00	606.107.250,00	0,00	653.609.250,00	0,00
Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	0,00	0,00	13.382.775,00	(13.382.775,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Komisi - LO	0,00	0,00	26.582.850,00	(26.582.850,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	0,00	0,00	5.663.700,00	(5.663.700,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	0,00	0,00	15.575.175,00	(15.575.175,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	17.280.000,00	84.240.000,00	0,00	17.280.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	6.724.904.000,00	5.610.975.500,00	5.610.975.500,00	1.113.928.500,00	19,85
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.575.057.046,00	2.935.517.260,00	2.935.517.260,00	639.539.786,00	21,79
Beban Tunjangan Beras ASN	10.293.923.640,00	8.832.086.500,00	8.887.922.320,00	1.406.001.320,00	15,82
Beban Tunjangan Beras DPRD	42.655.380,00	48.883.500,00	0,00	42.655.380,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.448.400,00	6.952.320,00	0,00	1.448.400,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	460.934.928,00	249.388.593,00	250.727.697,00	210.207.231,00	83,84
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	65.550,00	1.339.104,00	0,00	65.550,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	2.317.203,00	1.988.466,00	1.989.426,00	327.777,00	16,48
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	160,00	960,00	0,00	160,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.472.226.850,00	14.698.061.533,00	14.698.061.533,00	(1.225.834.683,00)	(8,34)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	321.366.142,00	0,00	0,00	321.366.142,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	963.213.305,00	0,00	0,00	963.213.305,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	205.985.554.008,00	148.941.464.071,00	145.668.330.371,00	60.317.223.637,00	41,41
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Resiko Kerja	0,00	0,00	3.273.133.700,00	(3.273.133.700,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	9.472.100.000,00	12.703.894.226,00	9.170.504.226,00	301.595.774,00	3,29
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Koordinasi Administratif	0,00	0,00	3.533.390.000,00	(3.533.390.000,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.754.550.000,00	32.757.696.666,00	32.586.280.000,00	(28.831.730.000,00)	(88,48)



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	0,00	0,00	171.416.666,00	(171.416.666,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	14.080.621.370,00	27.461.710.465,00	27.461.710.465,00	(13.381.089.095,00)	(48,73)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	13.164.521.632,00	13.164.521.632,00	(13.164.521.632,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	21.670.889.280,00	15.229.191.100,00	15.229.191.100,00	6.441.698.180,00	42,30
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.005.921.400,00	5.013.568.800,00	5.013.568.800,00	(2.007.647.400,00)	(40,04)
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	900.250.000,00	5.633.000.000,00	5.633.000.000,00	(4.732.750.000,00)	(84,02)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.353.214.540,00	0,00	0,00	3.353.214.540,00	0,00
Beban Honorarium	612.815.000,00	131.295.000,00	0,00	612.815.000,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	38.629.500,00	37.579.500,00	37.579.500,00	1.050.000,00	2,79
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	59.042.550,00	0,00	0,00	59.042.550,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.048.500,00	10.048.500,00	10.048.500,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	3.439.800.000,00	3.439.800.000,00	88.200.000,00	2,56
Beban Tunjangan Reses DPRD	882.000.000,00	882.000.000,00	882.000.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	41.258.039,00	3.143.511,00	0,00	41.258.039,00	0,00
Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO	0,00	0,00	3.143.511,00	(3.143.511,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.767.500.000,00	2.713.500.000,00	2.713.500.000,00	54.000.000,00	1,99
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	(3.675.000,00)	(100,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	201.128.960,00	0,00	0,00	201.128.960,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	69.120,00	0,00	0,00	69.120,00	0,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	239.904.000,00	274.680.000,00	274.680.000,00	(34.776.000,00)	(12,66)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
Beban Pegawai BOS	3.506.393.000,00	5.263.413.700,00	0,00	3.506.393.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	14.590.850.863,00	0,00	0,00	14.590.850.863,00	0,00
Beban Uang Lembur PNS - LO	0,00	0,00	47.975.000,00	(47.975.000,00)	(100,00)
Beban Uang Lembur Non PNS - LO	0,00	0,00	914.526.250,00	(914.526.250,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>504.769.183.242,00</b>	<b>485.748.538.676,00</b>	<b>481.316.331.226,00</b>	<b>23.452.852.016,00</b>	<b>4,87</b>

Beban Pegawai merupakan potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran pegawai.



### 5.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2021  
Rp370.983.093.987,79

31 Desember 2020  
Rp373.222.643.783,45

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp370.983.093.987,79. Jika dibandingkan dengan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp373.222.643.783,45 terjadi penurunan sebesar Rp2.239.549.795,66 atau 0,60%. Berikut rincian Beban Barang dan Jasa.

#### 5.2.2.2.1. Beban Barang

31 Desember 2021  
Rp58.787.080.083,89

31 Desember 2020  
Rp75.093.091.082,49

Beban barang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp58.787.080.083,89 dan beban barang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp75.093.091.082,49. Berikut rincian beban barang pada **Tabel 5.49**.

**Tabel 5.49 Beban Barang Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	905.625.368,00	594.427.379,00	594.427.379,00	311.197.989,00	52,35
Beban Bahan-Bahan Kimia	81.369.020,00	278.850.070,00	278.850.070,00	(197.481.050,00)	(70,82)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.869.804.205,00	9.222.789.696,00	8.543.235.960,00	(2.673.431.755,00)	(31,29)
Beban Bahan-Bahan Baku	454.522.620,00	0,00	0,00	454.522.620,00	0,00
Beban Bahan-Barang dalam Proses	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	290.295.750,00	100.550.000,00	100.550.000,00	189.745.750,00	188,71
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	214.990.000,00	943.614.000,00	943.614.000,00	(728.624.000,00)	(77,22)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	252.996.000,00	52.408.700,00	52.408.700,00	200.587.300,00	382,74
Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.270.260.180,00	3.919.528.250,00	2.023.685.500,00	246.574.680,00	12,18
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	24.482.510,00	25.110.000,00	0,00	24.482.510,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	753.574.800,00	0,00	0,00	753.574.800,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	22.994.000,00	0,00	0,00	22.994.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	28.974.000,00	0,00	0,00	28.974.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	48.300.000,00	0,00	0,00	48.300.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7.000.000,00	56.000.000,00		7.000.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	155.666.400,00	2.428.846.853,00	0,00	155.666.400,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.135.190.199,00	6.966.017.451,00	6.966.017.451,00	169.172.748,00	2,43
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.815.361.069,00	4.600.528.203,00	0,00	3.815.361.069,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	456.000,00	29.944.400,00	29.944.400,00	(29.488.400,00)	(98,48)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	323.283.500,00	499.312.850,00	499.312.850,00	(176.029.350,00)	(35,25)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	54.192.000,00	0,00	0,00	54.192.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	32.416.713,00	0,00	0,00	32.416.713,00	0,00
<i>Beban Bahan Perlengkapan Ruang</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822.836.726,00</i>	<i>(822.836.726,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	333.546.400,00	380.520.507,00	380.520.507,00	(46.974.107,00)	(12,34)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	68.764.000,00	822.836.726,00	950.700.399,00	(881.936.399,00)	(92,77)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	3.600.000,00	0,00	134.047.000,00	(130.447.000,00)	(97,31)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	992.958.000,00	873.100.000,00	873.100.000,00	119.858.000,00	13,73
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.502.497.107,66	5.843.238.625,60	5.623.123.141,37	(2.120.626.033,71)	(37,71)
<i>Beban Cetak</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.297.277.823,00</i>	<i>(3.297.277.823,00)</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Beban Pengandaan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318.350.750,00</i>	<i>(318.350.750,00)</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Beban Foto Copy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>984.899.630,00</i>	<i>(984.899.630,00)</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Beban Bahan Pembersih</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>374.143.800,00</i>	<i>(374.143.800,00)</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.332.446.629,00</i>	<i>(1.332.446.629,00)</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Beban Bahan Percontohan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.250.000,00</i>	<i>(11.250.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Beban Bahan Dapur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.366.500,00</i>	<i>(51.366.500,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Obat-Obatan-Obat	51.131.615.554,76	5.600.619.326,37	0,00	(51.131.615.554,76)	0,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.098.110.260,71	8.563.966.336,24	8.541.462.521,24	(5.443.352.260,53)	(63,73)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	52.372.783.913,28	7.398.936.701,88	7.356.366.701,88	45.016.417.211,40	611,94
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.387.479.655,00	1.793.939.175,00	1.957.487.175,00	1.429.992.480,00	73,05
<i>Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.570.000,00</i>	<i>(42.570.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.139.340.925,00	0,00	0,00	3.139.340.925,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	10.129.124.500,00	10.558.901.788,00	8.959.193.688,00	1.169.930.812,00	13,06
<i>Beban Makanan dan Minuman Pelatihan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.589.030.100,00</i>	<i>(1.589.030.100,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.460.152.300,00	7.382.500.181,00	7.292.550.181,00	(832.397.881,00)	(11,41)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	240.592.400,00	1.132.041.500,00	1.132.041.500,00	(891.449.100,00)	(78,75)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	214.264.900,00	989.696.000,00	986.596.000,00	(772.331.100,00)	(78,28)
<i>Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai</i>	0,00	0,00	103.728.000,00	(103.728.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	143.600.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	68.900.000,00	92,24
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	197.300.000,00	84.250.000,00	84.250.000,00	113.050.000,00	134,18
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.750.000,00	615.800.000,00	615.800.000,00	(515.050.000,00)	(83,64)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	356.125.500,00	294.216.000,00	294.216.000,00	61.909.500,00	21,04
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	92.500.000,00	97.150.000,00	97.150.000,00	(4.650.000,00)	(4,79)
Beban Pakaian Siaga	27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	0,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	58.800.000,00	0,00	0,00	58.800.000,00	0,00
Beban Pakaian KORPRI	23.300.000,00	19.850.000,00	19.850.000,00	3.450.000,00	17,38
Beban Pakaian Adat Daerah	56.000.000,00	49.750.000,00	49.750.000,00	6.250.000,00	12,56
Beban Pakaian Batik Tradisional	445.490.000,00	569.800.000,00	569.800.000,00	(124.310.000,00)	(21,82)
Beban Pakaian Olahraga	146.650.000,00	140.440.000,00	140.440.000,00	6.210.000,00	4,42
Beban Pakaian Paskibraka	30.790.000,00	0,00	0,00	30.790.000,00	0,00
Beban Pakaian Jas/Safari	122.500.000,00	0,00	0,00	122.500.000,00	0,00
Beban Komponen-Komponen Peralatan	1.314.373.443,00	0,00	0,00	1.314.373.443,00	0,00
Beban Komponen-Komponen Lainnya	15.598.000,00	0,00	0,00	15.598.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>58.787.080.083,89</b>	<b>83.004.180.719,09</b>	<b>75.093.091.082,49</b>	<b>(16.306.010.998,60)</b>	<b>(21,71)</b>

Merupakan beban atas pemakaian aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau atas barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Beban persediaan selama Tahun Anggaran 2021 di Pemerintah Kabupaten Malinau perhitungannya menggunakan metode periodik. Beban barang tahun 2021 terdiri dari:

1. Beban barang pakai habis Selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp57.457.108.640,89, rincian disajikan pada **Tabel 5.50**.



Tabel 5.50 Beban Barang Pakai Habis Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2021
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	905.625.368,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	81.369.020,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.869.804.205,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	454.522.620,00
5	Beban Bahan-Barang dalam Proses	2.750.000,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	290.295.750,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	214.990.000,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	252.996.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.270.260.180,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	24.482.510,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	753.574.800,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	22.994.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	28.974.000,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	48.300.000,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7.000.000,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	155.666.400,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.135.190.199,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.815.361.069,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	456.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	323.283.500,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	54.192.000,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	32.416.713,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	333.546.400,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	68.764.000,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	3.600.000,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	992.958.000,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.502.497.107,66
28	Beban Obat-Obatan-Obat	-51.131.615.554,76
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.098.110.260,71
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	52.372.783.913,28
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.387.479.655,00
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.139.340.925,00
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10.129.124.500,00





NO.	URAIAN	TA 2021
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.460.152.300,00
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	240.592.400,00
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	214.264.900,00
37	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00
38	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	143.600.000,00
39	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	197.300.000,00
40	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.750.000,00
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	356.125.500,00
42	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00
43	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	92.500.000,00
44	Beban Pakaian Siaga	27.200.000,00
45	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	58.800.000,00
46	Beban Pakaian KORPRI	23.300.000,00
47	Beban Pakaian Adat Daerah	56.000.000,00
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	445.490.000,00
49	Beban Pakaian Olahraga	146.650.000,00
50	Beban Pakaian Paskibraka	30.790.000,00
51	Beban Pakaian Jas/Safari	122.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>57.457.108.640,89</b>

2. Beban barang tak habis pakai sebesar Rp1.329.971.443,00 rincian disajikan sebagai berikut:
- Beban komponen-komponen peralatan sebesar Rp1.314.373.443,00; dan
  - Beban komponen-komponen lainnya sebesar Rp15.598.000,00.

#### 5.2.2.2.2. Beban Jasa

**31 Desember 2021**  
Rp162.074.416.220,00

**31 Desember 2020**  
Rp210.429.102.514,96

Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp162.074.416.220,00 dan Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp210.429.102.514,96. Rincian beban jasa disajikan pada **Tabel 5.51**.

**Tabel 5.51 Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	637.250.000,00	2.384.198.829,00	2.384.198.829,00	(1.746.948.829,00)	(73,27)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.928.306.013,00	7.185.664.675,00	6.893.533.900,00	12.034.772.113,00	174,58
<i>Beban Honorarium PNS Lainnya - LO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347.430.775,00</i>	<i>(347.430.775,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.137.803.600,00	0,00	0,00	1.137.803.600,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	19.831.297.000,00	0,00	0,00	19.831.297.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	25.378.646.973,00	8.690.338.759,00	4.793.259.131,00	20.585.387.842,00	429,47
<i>Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.897.079.628,00</i>	<i>(3.897.079.628,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	144.000.000,00	20.059.200,00	20.059.200,00	123.940.800,00	617,88
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.297.930.000,00	0,00	0,00	6.297.930.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	18.095.300.000,00	0,00	0,00	18.095.300.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.370.300.000,00	0,00	0,00	4.370.300.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	2.942.400.000,00	0,00	0,00	2.942.400.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	401.000.000,00	0,00	0,00	401.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.166.160.350,00	0,00	0,00	7.166.160.350,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.638.775.000,00	106.123.042.209,00	0,00	2.638.775.000,00	0,00
<i>Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106.123.042.209,00</i>	<i>(106.123.042.209,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Jasa Tenaga Ahli	1.433.110.000,00	0,00	0,00	1.433.110.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.843.376.914,00	3.003.030.141,00	2.709.030.141,00	8.134.346.773,00	300,27
<i>Beban Jasa Kebersihan Taman</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>294.000.000,00</i>	<i>(294.000.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.124.913.312,00	720.000.000,00	720.000.000,00	404.913.312,00	56,24
Beban Jasa Tenaga Supir	461.600.000,00	0,00	0,00	461.600.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	369.200.000,00	0,00	0,00	369.200.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.690.814.500,00	2.061.920.638,00	986.305.124,00	704.509.376,00	71,43
Beban Jasa Tata Rias	209.992.900,00	0,00	0,00	209.992.900,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	30.410.000,00	0,00	0,00	30.410.000,00	0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.901.000,00	0,00	0,00	7.901.000,00	0,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	316.992.500,00	0,00	0,00	316.992.500,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	262.999.920,00	9.419.664.261,00	701.540.000,00	(438.540.080,00)	(62,51)
<i>Beban Uang Saku, Transportasi dan Akomodasi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.311.434.261,00</i>	<i>(8.311.434.261,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	179.985.000,00	0,00	0,00	179.985.000,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	142.400.000,00	0,00	0,00	142.400.000,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.293.900.000,00	0,00	406.690.000,00	887.210.000,00	218,15
Beban Tagihan Telepon	297.188.408,00	325.003.685,00	325.003.685,00	(27.815.277,00)	(8,56)
Beban Tagihan Air	903.044.235,00	1.508.459.745,00	1.508.459.745,00	(605.415.510,00)	(40,13)
Beban Tagihan Listrik	5.474.070.693,00	7.175.578.312,00	7.175.578.312,00	(1.701.507.619,00)	(23,71)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.120.000,00	4.559.328.998,00	4.559.328.998,00	(4.558.208.998,00)	(99,98)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.845.256.501,00	2.221.248.427,00	2.221.248.427,00	(375.991.926,00)	(16,93)
Beban Paket/Pengiriman	1.234.591.900,00	1.643.672.606,00	1.643.672.606,00	(409.080.706,00)	(24,89)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	86.999.733,00	0,00	187.428.259,00	(100.428.526,00)	(53,58)
Beban Medical Check Up	2.790.000,00	200.000.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	335.510.000,00	0,00	0,00	335.510.000,00	0,00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	2.755.197.336,00	0,00	0,00	2.755.197.336,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.111.200,00	0,00	0,00	30.111.200,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.249.530.453,00	11.332.961.594,00	11.284.210.295,00	965.320.158,00	8,55
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	118.468.500,00	3.303.421,00	252.054.720,00	(133.586.220,00)	(53,00)
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	52.000.000,00	0,00	81.800.000,00	(29.800.000,00)	(36,43)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	131.900.000,00	0,00	30.000.000,00	101.900.000,00	339,67
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.000.000,00	0,00	415.176.000,00	(408.176.000,00)	(98,31)
Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	199.990.000,00	0,00	20.000.000,00	179.990.000,00	899,95
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	0,00	214.620.787,00	(211.020.787,00)	(98,32)
Beban Sewa MOB	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	53.800.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	0,00
Beban Sewa Hotel	394.882.489,00	0,00	0,00	394.882.489,00	0,00
Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	69.300.000,00	82.341.612,00	0,00	69.300.000,00	0,00
Beban Jasa Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	1.485.617.457,00	(1.485.617.457,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	59.895.000,00	0,00	0,00	59.895.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	24.475.000,00	0,00	0,00	24.475.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	36.550.000,00	0,00	0,00	36.550.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	6.969.000,00	46.927.000,00	0,00	6.969.000,00	0,00
<i>Beban Jasa Konsultansi Penelitian</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.100.000,00</i>	<i>(43.100.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	49.390.000,00	0,00	0,00	49.390.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	59.565.000,00	0,00	0,00	59.565.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	12.419.000,00	0,00	0,00	12.419.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	39.696.000,00	0,00	0,00	39.696.000,00	0,00
<i>Beban Jasa Konsultansi Perencanaan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201.971.612,00</i>	<i>(201.971.612,00)</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Beban Jasa Konsultansi Pengawasan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.530.797,00</i>	<i>(51.530.797,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	18.750.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	78.425.000,00	0,00	0,00	78.425.000,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	569.900.000,00	378.250.000,00	248.000.000,00	321.900.000,00	129,80
<i>Beban Beasiswa Tugas Belajar S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.250.000,00</i>	<i>(130.250.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	1.185.800.000,00	1.969.550.000,00	1.969.550.000,00	(783.750.000,00)	(39,79)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	200.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	140.000.000,00	233,33
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	5.979.092.400,00	2.592.807.804,00	2.592.807.804,00	3.386.284.596,00	130,60
Beban Bimbingan Teknis	812.662.167,00	0,00	0,00	812.662.167,00	0,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.561.223,00	187.428.259,00	0,00	1.561.223,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	1.213.811.140,00	517.031.140,00	(517.031.140,00)	(100,00)
<i>Beban Kontribusi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>671.780.000,00</i>	<i>(671.780.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Beban Iuran APKASI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>(25.000.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Beban Lembur	0,00	962.501.250,00	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	415.176.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	181.440.000,00	181.440.000,00	(181.440.000,00)	(100,00)
Beban Sewa General Laboratory Tool	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	214.620.787,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	109.230.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	4.603.797,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	43.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sosialisasi	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(100,00)
Beban Barang Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00	0,00	4.885.127.047,60	(4.885.127.047,60)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	7.151.316.079,69	(7.151.316.079,69)	(100,00)
Beban Barang Dana BOS	0,00	0,00	16.361.986.845,67	(16.361.986.845,67)	(100,00)
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	5.263.413.700,00	(5.263.413.700,00)	(100,00)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0,00	0,00	81.395.000,00	(81.395.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>162.074.416.220,00</b>	<b>177.189.763.149,00</b>	<b>210.429.102.514,96</b>	<b>(48.354.686.294,96)</b>	<b>(22,98)</b>

Beban jasa terdiri dari:

1. Beban jasa kantor sebesar Rp139.349.345.011,00 rincian beban jasa disajikan pada **Tabel 5.52**.

**Tabel 5.52 Beban Jasa Kantor Tahun 2021**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2021
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	637.250.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.928.306.013,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.250.000,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.137.803.600,00
5	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	19.831.297.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	25.378.646.973,00
7	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	144.000.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.297.930.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	18.095.300.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.370.300.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	2.942.400.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	401.000.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	70.000.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.166.160.350,00
15	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.638.775.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.433.110.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.843.376.914,00
18	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.124.913.312,00
19	Beban Jasa Tenaga Supir	461.600.000,00
20	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.561.223,00
21	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	369.200.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.690.814.500,00
23	Beban Jasa Tata Rias	209.992.900,00
24	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	30.410.000,00
25	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.901.000,00
26	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	316.992.500,00
27	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	262.999.920,00
28	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	179.985.000,00
29	Beban Jasa Pengolahan Sampah	142.400.000,00





NO.	URAIAN	TA 2021
30	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.293.900.000,00
31	Beban Tagihan Telepon	297.188.408,00
32	Beban Tagihan Air	903.044.235,00
33	Beban Tagihan Listrik	5.474.070.693,00
34	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.120.000,00
35	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.845.256.501,00
36	Beban Paket/Pengiriman	1.234.591.900,00
37	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	86.999.733,00
38	Beban Medical Check Up	2.790.000,00
39	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	335.510.000,00
40	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	2.755.197.336,00
	<b>Jumlah</b>	<b>139.349.345.011,00</b>

2. Beban iuran jaminan/asuransi sebesar Rp12.398.110.153,00; dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.53**.

**Tabel 5.53 Beban iuran Jaminan/Asuransi TA 2021**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2021
1	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.111.200,00
2	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.249.530.453,00
3	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	118.468.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.398.110.153,00</b>

3. Beban sewa tanah sebesar Rp52.000.000,00, beban sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
4. Beban sewa peralatan dan mesin sebesar Rp506.390.000,00 dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.54**.

**Tabel 5.54 Beban Sewa Peralatan dan Mesin TA 2021**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2021
1	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	131.900.000,00
2	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.000.000,00
3	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik	4.400.000,00
4	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	132.000.000,00
5	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	199.990.000,00
6	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.600.000,00
7	Beban Sewa MOB	27.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>506.390.000,00</b>

5. Beban sewa gedung dan bangunan sebesar Rp477.382.489,00 rincian beban jasa disajikan pada **Tabel 5.55**.





Tabel 5.55 Beban Sewa Gedung dan Bangunan TA 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2021
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	32.500.000,00
3	Beban Sewa Hotel	394.882.489,00
	<b>Jumlah</b>	<b>477.382.489,00</b>

6. Beban sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp4.000.000,00 yakni berupa beban sewa jaringan dengan media udara.
7. Beban jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp 433.259.000,00 rincian beban jasa konsultasi konstruksi disajikan pada **Tabel 5.56**.

Tabel 5.56 Beban Jasa Konsultasi Konstruksi TA 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2021
1	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	75.000.000,00
2	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	69.300.000,00
3	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	59.895.000,00
4	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	24.475.000,00
5	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	36.550.000,00
6	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	6.969.000,00
7	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	49.390.000,00
8	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	59.565.000,00
9	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	12.419.000,00
10	Beban Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	39.696.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>433.259.000,00</b>

8. Beban jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebesar Rp106.475.000,00; rincian beban jasa ketersediaan layanan (availability payment) disajikan pada **Tabel 5.57**.

Tabel 5.57 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) TA 2021

NO.	URAIAN	TA 2021
1	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	18.750.000,00
2	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	78.425.000,00
3	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	9.300.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>106.475.000,00</b>

9. Beban beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp1.955.700.000,00; rincian beban Beasiswa Pendidikan PNS disajikan pada **Tabel 5.58**.





Tabel 5.58 Beasiswa Pendidikan PNS TA 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2021
1	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	569.900.000,00
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	1.185.800.000,00
3	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	200.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.955.700.000,00</b>

10. Beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp6.791.754.567,00; terdiri dari:

- Beban kursus singkat/pelatihan sebesar Rp5.979.092.400,00; dan
- Beban bimbingan teknis sebesar Rp812.662.167,00.

**5.2.2.2.3. Beban Pemeliharaan**

**31 Desember 2021**  
**Rp7.872.934.824,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp9.157.174.338,00**

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp7.872.934.824,00 dan Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.157.174.338,00. Rincian beban pemeliharaan disajikan pada **Tabel 5.59**.

Tabel 5.59 Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	0,00	567.536.500,00	567.536.500,00	(567.536.500,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	758.847.500,00	150.559.300,00	1.387.740.540,00	(628.893.040,00)	(45,32)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.516.700,00	2.950.000,00	0,00	15.516.700,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	47.325.000,00	0,00	0,00	47.325.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.671.306.240,00	0,00	0,00	1.671.306.240,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	400.852.475,00	1.317.165.340,00	0,00	400.852.475,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	174.219.250,00	1.523.892.657,00	0,00	174.219.250,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	578.313.292,00	0,00	0,00	578.313.292,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	144.413.000,00	0,00	0,00	144.413.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	42.672.500,00	0,00	0,00	42.672.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	346.920.195,00	0,00	0,00	346.920.195,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	197.000.000,00	0,00	0,00	197.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	63.550.000,00	0,00	0,00	63.550.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	197.714.193,00	0,00	0,00	197.714.193,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	77.320.000,00	0,00	0,00	77.320.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	216.520.000,00	0,00	0,00	216.520.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	105.824.580,00	0,00	0,00	105.824.580,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	17.816.000,00	0,00	0,00	17.816.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	549.049.623,00	1.739.835.668,00	2.082.767.933,00	(1.533.718.310,00)	(73,64)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	752.765.118,00	0,00	0,00	752.765.118,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	99.963.358,00	0,00	0,00	99.963.358,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	749.719.000,00	0,00	0,00	749.719.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	342.932.265,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	31.904.986,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi	0,00	668.388.976,00	668.388.976,00	(668.388.976,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	229.259.800,00	0,00	31.904.986,00	197.354.814,00	618,57
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	348.125.000,00	0,00	0,00	348.125.000,00	0,00
Beban Jasa Service	0,00	0,00	1.078.565.514,00	(1.078.565.514,00)	(100,00)
Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	2.509.956.853,00	(2.509.956.853,00)	(100,00)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	679.553.736,00	(679.553.736,00)	(100,00)
Beban Jasa KIR	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	90.722.100,00	(90.722.100,00)	(100,00)
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00	59.837.200,00	(59.837.200,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>7.872.934.824,00</b>	<b>6.377.965.692,00</b>	<b>9.157.174.338,00</b>	<b>(1.284.239.514,00)</b>	<b>14,02%</b>

Beban pemeliharaan diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 adalah beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan dan beban pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Rincian beban pemeliharaan peralatan dan mesin disajikan pada **Tabel 5.60**.

**Tabel 5.60 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2021**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2021
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	758.847.500,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.516.700,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	47.325.000,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.671.306.240,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	400.852.475,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	8.000.000,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	68.000.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	174.219.250,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	578.313.292,00







**Tabel 5.63 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	76.188.507.243,00	42.866.268.017,00	42.740.128.017,00	33.448.379.226,00	78,26
Beban Perjalanan Dinas Tetap	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	44.460.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.029.864.000,00	35.632.547.831,00	35.803.147.831,00	(34.773.283.831,00)	(97,12)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64.864.000,00	0,00	0,00	64.864.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.463.235.243,00</b>	<b>78.543.275.848,00</b>	<b>78.543.275.848,00</b>	<b>(1.080.040.605,00)</b>	<b>(1,38)</b>

**5.2.2.2.5. Beban Uang dan/atau Jasa  
untuk Diberikan kepada  
Pihak Ketiga/Pihak  
Lain/Masyarakat**

31 Desember 2021  
Rp13.104.585.422,00

31 Desember 2020  
Rp0,00

Beban uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp13.104.585.422,00 dan beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00. Rincian beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat disajikan pada **Tabel 5.64**.

**Tabel 5.64 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	61.400.000,00	0,00	0,00	61.400.000,00	0,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	53.250.000,00	0,00	0,00	53.250.000,00	0,00
Beban Beasiswa	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.009.734.400,00	0,00	0,00	6.009.734.400,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.936.176.022,00	163.548.000,00	0,00	6.936.176.022,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	9.025.000,00	0,00	0,00	9.025.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.104.585.422,00</b>	<b>163.548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104.585.422,00</b>	<b>0,00</b>





**5.2.2.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp25.323.843.763,00 Rp16.361.986.845,67

Beban barang dan jasa bos Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp25.323.843.763,00 dan beban barang dan jasa bos Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.361.986.845,67. Rincian beban barang dan jasa bos disajikan pada **Tabel 5.65**.

**Tabel 5.65 Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Barang dan Jasa BOS	25.323.843.763,00	16.361.986.845,67	16.361.986.845,67	8.961.856.917,33	54,77
<b>Jumlah</b>	<b>25.323.843.763,00</b>	<b>16.361.986.845,67</b>	<b>16.361.986.845,67</b>	<b>8.961.856.917,33</b>	<b>54,77</b>

**5.2.2.2.7. Beban Barang dan Jasa BLUD** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp26.356.998.431,90 Rp7.151.316.079,69

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp26.356.998.431,90 dan Beban Barang Dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.151.316.079,69. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD disajikan pada **Tabel 5.66**.

**Tabel 5.66 Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban LO 2021	Beban LO 2020	Beban LO 2020		
Beban Barang dan Jasa BLUD	26.356.998.431,90	7.151.316.080,69	7.151.316.080,69	19.205.682.352,21	268,56
<b>Jumlah</b>	<b>26.356.998.431,90</b>	<b>7.151.316.079,69</b>	<b>7.151.316.079,69</b>	<b>19.205.682.352,21</b>	<b>268,56</b>

**5.2.2.3. Beban Subsidi** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp2.393.507.500,00 Rp1.881.918.000,00

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.393.507.500,00. Jika dibandingkan dengan Beban Subsidi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.881.918.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp511.589.500,00 atau 27,18%. Rincian beban subsidi disajikan pada **Tabel 5.67**.

**Tabel 5.67 Beban Subsidi Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban LO 2021 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)	Beban LO 2020 (Rp)		
Beban Subsidi kepada BUMD	2.393.507.500,00	1.881.918.000,00	1.881.918.000,00	511.589.500,00	27,18
<b>Jumlah</b>	<b>2.393.507.500,00</b>	<b>1.881.918.000,00</b>	<b>1.881.918.000,00</b>	<b>511.589.500,00</b>	<b>27,18</b>



Beban subsidi diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

#### 5.2.2.4. Beban Hibah

**31 Desember 2021**  
Rp21.718.178.702,00

**31 Desember 2020**  
Rp87.825.444.881,33

Beban Hibah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp21.718.178.702,00. Jika dibandingkan dengan Beban Hibah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp87.825.444.881,33 terjadi penurunan sebesar Rp66.107.266.179,33 atau (75,27%). Rincian Beban Hibah disajikan pada **Tabel 5.68**.

**Tabel 5.68 Beban Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	0,00	3.853.221.145,33	(3.053.221.145,33)	(79,24)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	3.853.221.145,33	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.870.236,00	0,00	0,00	7.808.870.236,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.087.634.000,00	66.296.319.000,00	3.936.748.000,00	8.150.886.000,00	207,05
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	367.500.000,00	1.318.754.567,00	76.189.400.541,00	(75.821.900.541,00)	(99,52)
Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	12.511.074.974,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	368.560.500,00	0,00	0,00	368.560.500,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	3.579.900.000,00	3.579.900.000,00	(3.579.900.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	285.613.966,00	266.175.195,00	266.175.195,00	19.438.771,00	7,30
<b>Jumlah</b>	<b>21.718.178.702,00</b>	<b>87.825.444.881,33</b>	<b>87.825.444.881,33</b>	<b>(66.107.266.179,33)</b>	<b>(75,27)</b>

Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

#### 5.2.2.5. Beban Bantuan Sosial

**31 Desember 2021**  
Rp2.694.382.502,00

**31 Desember 2020**  
Rp3.857.590.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.694.382.502,00. Jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2020



sebesar Rp3.857.590.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.163.207.498,00 atau 30,15%. Rincian Beban Bantuan Sosial disajikan pada **Tabel 5.69**.

**Tabel 5.69 Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban 2021	Beban 2020	Beban 2020		
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.159.324.721,00	2.339.000.000,00	0,00	2.159.324.721,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa Kurang Mampu	0,00	0,00	2.339.000.000,00	(2.339.000.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Biaya Berobat kepada Keluarga Miskin	0,00	0,00	18.590.000,00	(18.590.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang Kena Musibah	0,00	0,00	57.500.000,00	(57.500.000,00)	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Mengalami Musibah Dukacita	0,00	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Baru Masyarakat Kurang Mampu Swadaya (DAK AFIRMASI)	0,00	0,00	1.312.500.000,00	(1.312.500.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	535.057.781,00	206.090.000,00	50.000.000,00	485.057.781,00	970,12
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.312.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.694.382.502,00</b>	<b>3.857.590.000,00</b>	<b>3.857.590.000,00</b>	<b>(1.163.207.498,00)</b>	<b>(30,15)</b>

Beban bantuan sosial diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

#### 5.2.2.6. Beban Penyisihan Piutang

**31 Desember 2021**  
Rp1.187.012.560,86

**31 Desember 2020**  
Rp1.734.227.235,57

Beban penyisihan piutang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.187.012.560,86. Jika dibandingkan dengan beban penyisihan piutang pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.734.227.235,57 terjadi penurunan sebesar Rp547.214.674,71 atau 31,55%. Rincian beban penyisihan piutang disajikan pada **Tabel 5.70**.

**Tabel 5.70 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban LO 2021	Beban LO 2020	Beban LO 2020		
Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	95.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	59.864,09	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	42.800,00	5.950,00	0,00	42.800,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	993.610,00	278.365,00	0,00	993.610,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	265.970,50	56.006,00	0,00	265.970,50	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban LO 2021	Beban LO 2020	Beban LO 2020		
Beban Penyisihan Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	280.000,00	66.500,00	0,00	280.000,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	1.343.545,50	6.575.255,00	0,00	1.343.545,50	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Kain	205.645,50	425.020,00	0,00	205.645,50	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	585.978,21	93.341,03	0,00	585.978,21	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	149.591,90	16.060,00	0,00	149.591,90	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Liat	37.032,50	6.570,00	0,00	37.032,50	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	128.883,40	118.456,00	0,00	128.883,40	0,00
Beban Penyisihan Piutang PBBP2	1.180.126.527,68	921.478.355,39	0,00	1.180.126.527,68	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak			929.184.742,51	(929.184.742,51)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	25.521.877,50	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	300.150,00	0,00	0,00	300.150,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	25.521.877,50	(25.521.877,50)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame		379,56	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	379,56	(379,56)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	778,42	0,00	0,00	778,42	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	2.457.047,25	779.520.236,00	0,00	2.457.047,25	0,00
Dst.....	0,00	0,00	779.520.236,00	(779.520.236,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.187.012.560,86</b>	<b>1.734.227.235,57</b>	<b>1.734.227.235,57</b>	<b>(547.214.674,71)</b>	<b>(31,55)</b>

Beban penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Malinau ditujukan untuk menyisihkan nilai piutang terhadap piutang yang tidak tertagih atau tidak diterima sebesar persentase di Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2019.

Beban penyisihan piutang diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang tidak terbayar oleh pihak ketiga. Penyisihan piutang dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2019 Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar nihil dikarenakan umur piutang UMKM sesuai dengan perhitungan penyisihan piutang dikategorikan macet.





### 5.2.2.7. Beban Lain-lain

**31 Desember 2021**  
**Rp628.262.643,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp0,00**

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp628.262.643,00 dan Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

### 5.2.2.8. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

**31 Desember 2021**  
**Rp32.992.781.888,42**

**31 Desember 2020**  
**Rp32.740.435.493,76**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp32.992.781.888,42. Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp32.740.435.493,76 terjadi peningkatan sebesar Rp252.346.394,66 atau 0,77%. Rincian beban penyusutan peralatan dan mesin disajikan pada **Tabel 5.71**.

**Tabel 5.71 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	3.393.767.580,00	2.927.850.608,00	2.927.850.608,00	465.916.972,00	15,91
Beban Penyusutan Alat Besar Apung	9.310.606,00	16.199.160,00	16.199.160,00	(6.888.554,00)	(42,52)
Beban Penyusutan Alat Bantu	632.109.075,00	554.917.534,00	554.917.534,00	77.191.541,00	13,91
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.083.693.428,00	4.891.402.465,00	4.891.402.465,00	(807.709.037,00)	(16,51)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.520.833,00	3.666.666,00	3.666.666,00	(2.145.833,00)	(58,52)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	268.628.491,00	298.199.531,00	298.199.531,00	(29.571.040,00)	(9,92)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	15.258.889,00	120.738.886,00	120.738.886,00	(105.479.997,00)	(87,36)
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	99.495.528,00	95.766.543,00	95.766.543,00	3.728.985,00	3,89
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	2.088.832,00	10.516.597,00	10.516.597,00	(8.427.765,00)	(80,14)
Beban Penyusutan Alat Ukur	114.135.048,00	157.248.653,00	158.548.653,00	(44.413.605,00)	(28,01)
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	826.932.867,00	819.584.707,00	819.134.707,00	7.798.160,00	0,95
Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor	932.751.950,00	1.069.500.392,00	1.069.500.392,00	(136.748.442,00)	(12,79)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	5.301.886.048,00	5.588.837.999,00	5.588.837.999,00	(286.951.951,00)	(5,13)
Beban Penyusutan Komputer	0,00	0,00	285.736.932,00	(285.736.932,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	238.622.602,00	324.901.509,00	324.901.509,00	(86.278.907,00)	(26,56)
Beban Penyusutan Alat Studio	800.353.730,90	808.559.604,00	808.559.604,00	(8.205.873,10)	(1,01)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	357.119.176,00	360.799.175,00	360.799.175,00	(3.679.999,00)	(1,02)
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	138.423.164,00	114.524.019,00	114.524.019,00	23.899.145,00	20,87





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi	992.580,00	0,00	0,00	992.580,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	5.230.362.578,92	5.698.013.484,76	5.698.013.484,76	(467.650.905,84)	(8,21)
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	569.621.137,00	218.756.288,00	218.756.288,00	350.864.849,00	160,39
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	3.180.852.878,60	3.445.468.274,00	3.445.321.808,00	(264.468.929,40)	(7,68)
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	20.952.670,00	19.710.170,00	19.710.170,00	1.242.500,00	6,30
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	315.294.044,00	338.608.362,00	343.408.362,00	(28.114.318,00)	(8,19)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	40.407.638,00	37.021.536,00	37.021.536,00	3.386.102,00	9,15
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	79.004.838,00	230.603.247,00	230.603.246,00	(151.598.408,00)	(65,74)
Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	336.600,00	336.600,00	336.600,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	169.771.394,00	153.418.411,00	153.418.412,00	16.352.982,00	10,66
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	111.536.108,00	49.682.240,00	49.828.706,00	61.707.402,00	123,84
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	7.292.083,00	10.938.125,00	10.938.125,00	(3.646.042,00)	(33,33)
Beban Penyusutan Komputer Unit	3.851.007.118,00	2.703.709.576,00	2.417.847.645,00	1.433.159.473,00	59,27
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	1.614.232.685,00	1.263.449.239,00	1.263.574.238,00	350.658.447,00	27,75
Beban Penyusutan Alat Pelindung	27.461.166,00	29.987.887,00	5.185.500,00	22.275.666,00	429,58
Beban Penyusutan Peralatan Non Senjata Api	0,00	0,00	23.102.387,00	(23.102.387,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Senjata Sinar	0,00	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat SAR	485.328.334,00	368.484.986,00	368.484.986,00	116.843.348,00	31,71
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	64.740.242,00	2.616.875,00	2.616.875,00	62.123.367,00	2.373,95
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	7.489.946,00	316.145,00	316.145,00	7.173.801,00	2.269,15
Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>32.992.781.888,42</b>	<b>32.738.835.493,76</b>	<b>32.740.435.493,76</b>	<b>252.346.394,66</b>	<b>0,77</b>

**5.2.2.9. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**Rp35.488.517.229,00**      **Rp34.288.388.141,00**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp35.488.517.229,00. Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan Gedung dan





Bangunan Tahun pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp34.288.388.141,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.200.129.088,00 atau 3,50%. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan disajikan pada **Tabel 5.72**.

**Tabel 5.72 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban LO 2021	Beban LO 2020	Beban LO 2020		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.771.194.266,00	28.721.253.437	28.679.856.750	1.091.337.516,00	3,81
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	4.996.565.932,00	4.858.128.533	4.899.525.220	97.040.712,00	1,98
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	1.920.000	(1.920.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	285.881.170,00	285.881.170	285.881.170	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	398.336.475,00	398.336.475	398.336.475	0,00	0,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	36.539.386,00	24.788.526	22.868.526	13.670.860,00	59,78
<b>Jumlah</b>	<b>35.488.517.229,00</b>	<b>34.288.388.141,00</b>	<b>34.288.388.141,00</b>	<b>1.200.129.088,00</b>	<b>3,50</b>

**5.2.2.10. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

**31 Desember 2021**  
**Rp128.616.023.771,10**

**31 Desember 2020**  
**Rp137.069.695.657,07**

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp128.616.023.771,10. Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp137.069.695.657,07 terjadi penurunan sebesar Rp8.453.671.885,97 atau 6,17%. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi disajikan pada **Tabel 5.73**.

**Tabel 5.73 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Penyusutan Jalan	97.160.520.788,10	93.944.165.109,07	93.944.165.109,07	3.216.355.679,03	3,42
Beban Penyusutan Jembatan	8.530.688.565,00	8.527.744.495,00	8.527.744.495,00	2.944.070,00	0,03
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	1.473.920.571,00	1.472.742.974,00	1.472.742.974,00	1.177.597,00	0,08
Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	644.135.147,00	644.135.147,00	644.135.147,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	88.571.304,00	88.571.304,00	88.571.304,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	13.744.834.656,00	26.010.845.019,00	26.010.845.019,00	(12.266.010.363,00)	(47,16)
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	244.281.154,00	48.825.248,00	48.825.248,00	195.455.906,00	400,32
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.091.461.062,00	763.476.113,00	763.476.113,00	327.984.949,00	42,96



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban 2021 (Rp)	Beban 2020 (Rp)	Beban 2020 (Rp)		
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	53.556.525,00	53.556.525,00	53.556.525,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.779.290.363,00	2.791.306.554,00	2.791.306.554,00	(12.016.191,00)	(0,43)
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	57.070.000,00	57.070.000,00	57.070.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	1.786.200,00	26.095.367,00	26.095.367,00	(24.309.167,00)	(93,16)
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	157.894.556,00	70.120.406,00	70.120.406,00	87.774.150,00	125,18
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	44.670.875,00	40.341.083,00	40.341.083,00	4.329.792,00	10,73
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	14.325.000,00	14.325.000,00	14.325.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	1.685.494.770,00	1.673.012.245,00	1.673.012.245,00	12.482.525,00	0,75
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	93.987.732,00	93.987.732,00	93.987.732,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	749.534.503,00	749.375.336,00	749.375.336,00	159.167,00	0,02
<b>Jumlah</b>	<b>128.616.023.771,10</b>	<b>137.069.695.657,07</b>	<b>137.069.695.657,07</b>	<b>(8.453.671.885,97)</b>	<b>(6,17)</b>

Beban penyusutan dan amortisasi diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan yang sifatnya sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

**5.2.2.11. Beban Penyusutan Aset Lainnya** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp168.197.465,00 Rp0,00

Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp168.197.465,00 dan Beban Penyusutan Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

**5.2.2.12. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp973.658.601,09 Rp935.807.572,22

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp973.658.601,09. Jika dibandingkan dengan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp935.807.572,22 terjadi peningkatan sebesar Rp37.851.028,87 atau 4,04 %.

**5.2.2.13. Beban Bantuan Keuangan** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp155.633.736.000,00 Rp155.633.738.000,00

Beban bantuan keuangan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp155.633.736.000,00. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan



Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp155.633.738.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.000,00.

### 5.2.3. Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya –LO pada per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

### 5.2.4. Pos Luar Biasa

<b>5.2.4.1. Beban Tak Terduga</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp24.487.056.887,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp45.926.169.949,36
-----------------------------------	--	--

Beban tak terduga merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian tak terduga pada tahun 2021 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Beban tak terduga Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah sebesar Rp24.487.056.887,00 dan beban tak terduga tahun 2020 adalah sebesar Rp45.926.169.949,36. Terjadi penurunan pada beban tak terduga sebesar Rp21.439.113.062,36 atau 46,68% Beban tak terduga merupakan belanja dari belanja tak terduga untuk penanganan Covid-19.

<b>5.2.5. Surplus/Defisit Laporan Operasional</b>	<u>31 Desember 2021</u> (Rp67.732.851.671,62)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp120.058.931.546,28)
---	--	---

Berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diperoleh Defisit LO sebesar Rp67.732.851.671,62 atau turun sebesar Rp52.326.079.874,66 atau 43,58% bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp120.058.931.546,28.





### 5.3. Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca

Neraca Kabupaten Malinau per 31 Desember 2021 menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021.

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang;
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah; dan
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Komposisi Neraca Kabupaten Malinau per 31 Desember 2021 meliputi: Aset sebesar Rp4.646.632.706.352,17; Kewajiban sebesar Rp39.556.860.398,90; dan Ekuitas Dana sebesar Rp4.607.075.845.953,27.

<b>5.3.1. Aset</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp4.646.632.706.352,17	<u>31 Desember 2020</u> Rp4.798.605.921.169,52
--------------------	---	---

Jumlah Aset sebesar Rp4.646.632.706.352,17 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp220.768.607.560,90; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp117.826.468.355,30; Aset Tetap sebesar Rp4.206.146.899.449,22; dan Aset Lainnya sebesar Rp101.890.730.986,75.

<b>5.3.1.1. Aset Lancar</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp220.768.607.560,90	<u>31 Desember 2020</u> Rp214.801.975.590,59
-----------------------------	---	---

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

<b>5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp153.165.831.397,10	<u>31 Desember 2020</u> Rp92.914.312.006,69
-------------------------------------	---	--

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas di Rekening Giro Bank Kaltimara Cabang Malinau. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp153.165.831.397,10 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp92.914.312.006,69 maka terdapat peningkatan saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp60.251.519.390,41 atau 64,85%. Saldo Kas di Kas Daerah disajikan pada **Tabel 5.74**.





**Tabel 5.74 Rincian Kas di Kas Daerah TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)
Kas Umum Daerah	152.813.870.813,56	Kas Umum Daerah	91.017.190.446,49
Pengakuan kas di kasda atas reklasifikasi sisa kas JKN per 31 Desember 2021 berdasarkan Perpres 32Tahun 2014 pasal 6 ayat (2)	351.960.583,54	Pengakuan kas di kasda atas reklasifikasi sisa kas JKN per 31 Desember 2020 berdasarkan Perpres 32Tahun 2014 pasal 6 ayat (2)	1.897.121.560,20
<b>JUMLAH</b>	<b>153.165.831.397,10</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>92.914.312.006,69</b>

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp153.165.831.397,10 tersebut tidak sama dengan nilai di rekening koran Kas Daerah sebesar Rp152.813.870.813,56, bahwa terdapat SiLPA Dana JKN sebesar Rp351.960.583,54 sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2) dimana dana JKN per akhir periode dicatat di BUD Kabupaten Malinau.

**5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp2.518.000,00 Rp97.229.350,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.518.000,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp97.229.350,00 maka terdapat penurunan saldo kas di Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp94.711.350,00 atau 97,41%.

Saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.518.000,00 berada di Bendahara Penerimaan diantaranya PKM Data Dian, PKM Long Loreh, UPTD Puskesmas Long Ampung, PKM Long Loreh, PKM Pujungan, dan PKM Long Alango. Berikut rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan disajikan pada **Tabel 5.75**.

**Tabel 5.75 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 dan TA 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	Uraian	31 Desember 2020
Ret. PKM Data Dian	625.000,00	Retribusi pasien umum dan ambulance RS Pratama Langap bulan September S/D Desember 2020	35.075.850,00
Ret. PKM Long Loreh	601.000,00	PKM Long Nawang, Long Loreh	392.000,00
Ret. UPTD Puskesmas Long Ampung	50.000,00	-	0,00
Ret. PKM Long Loreh	47.000,00	-	0,00
Ret. PKM Pujungan	1.020.000,00	-	0,00
Ret. PKM Long Alango	175.000,00	Retribusi rumah sakit Pratama Long Ampung thn 2020	61.761.500,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>97.229.350,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 pada **Tabel 5.76** telah disetor ke rekening RKUD, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.76 Rincian Pengembalian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021  
Ke Rekening Kas Umum Daerah**

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal setor	No. bukti	Jumlah
Ret. PKM Data	03-Jan-22	DINA/118	625.000,00
Ret. PKM Long Loreh	04-Jan-22	ITA/057	601.000,00
Ret. UPTD Puskesmas Long Ampung	05-Jan-22	AMSAL/013	50.000,00
Ret. PKM Long Loreh	18-Jan-21	ITA/020	47.000,00
Ret. PKM Pujungan	08-Mar-22	DEDE/104	1.020.000,00
Ret. PKM Long Alango	09-Mar-22	DINA/041	175.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.518.000,00</b>

Retribusi PKM Pujungan dan Retribusi PKM Long Alango belum melakukan penyetoran ke RKUD Kabupaten Malinau sampai dengan tanggal 07 Maret 2021 dikarenakan terkendala masalah transportasi.

**5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran**

**31 Desember 2021**  
**Rp216.256.900,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp366.037.939,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp216.256.900,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp366.037.939,00 maka terdapat penurunan saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp149.781.039,00 atau 40,92%. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang atas uang pengembalian belanja yang belum dikembalikan atau disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2021. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada OPD per 31 Desember 2021, sebagaimana tersaji dalam **Tabel 5.77**.

**Tabel 5.77 Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran**

Nama OPD	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran TA. 2020	Nama OPD	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran TA. 2020
	(Rp)		(Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	18.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	-
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.072.900,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	-
Dinas Pertanian	20.000.000,00	Dinas Pertanian	-
Kec. Malinau Utara	1.200.000,00	Kec. Malinau Utara	6.353.939,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	359.684.000,00
Bagian Kesra	74.984.000,00		-
<b>Jumlah</b>	<b>216.256.900,00</b>	<b>Jumlah</b>	<b>366.037.939,00</b>





Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 telah disetor ke rekening RKUD, dengan rincian pada **Tabel 5.78**.

**Tabel 5.78 Rincian Pengembalian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 Ke Rekening Kas Umum Daerah**

OPD	Uraian	Tanggal Setor	No. Bukti	Jumlah (Rp)
Kec. Malinau Utara	Pengembalian Honorarium Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Tahun Anggaran 2021 (Keg.02.02) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	05-Jan-22	DINA/084	1.200.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Set. Kelebihan Pencairan Dana Transfer Untuk RT DESA LONG GAFID No. Sp2D; 3179/360/LS/BPKD/PPKD/IX/2021 (Dana Desa)	06-Jan-22	VERRA/023	100.000.000,00
Dinas Pertanian	Set. Pengembalian Dana Insentif PPL Non PNS Bln Agustus, Sept dan Okt TA 2021 SP2D No. 4487,4940, 4941 dan 4942	13-Jan-22	VERRA/018	20.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Pengembalian Dana Belanja BBM SPM 219 TA 2021 kelebihan bayar Keg. Sarana dan Prasarana Persampahan	17-Jan-22	SELLA/061	18.000.000,00
Bagian Kesra	pengembalian sisa dana hibah PPIH kab.malinau tahun 2021/Abdurahman, A.md	25-Jan-22	AYLIN/025	74.984.000,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pengembalian Sisa dana Hibah/Bansos Koni APBD Kab. Malinau/No. 260/61/Dispora/Dwi Novela	07-Feb-22	VERRA/023	1.890.900,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pengembalian Sisa dana Hibah/Bansos Koni APBD-P Kab. Malinau/No. 900/61/Dispora/Dwi Novela	07-Feb-22	VERRA/022	182.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>216.256.900,00</b>

**5.3.1.1.4. Kas di RSUD-BLUD**

**31 Desember 2021**  
**Rp10.380.231.254,81**

**31 Desember 2020**  
**Rp6.367.029.845,00**

Kas di Kas di RSUD-BLUD per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.380.231.254,81 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.367.029.845,00 maka terdapat peningkatan saldo Kas di RSUD-BLUD sebesar Rp4.013.201.409,81 atau 63,03%.

Kas tersebut merupakan sisa kas pada Kas di RSUD-BLUD Kabupaten Malinau yang pengelolaan keuangannya terpisah dari kas daerah dan termasuk dalam jumlah SILPA dan kas RSUD-BLUD yang akan digunakan langsung untuk operasional RSUD-BLUD.

**5.3.1.1.5. Kas Dana BOS**

**31 Desember 2021**  
**Rp76.639.000,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp0,00**

Kas di Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76.639.000,00 yang merupakan reklas dari Kas Lainnya. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.321.415.338,00 maka terdapat penurunan saldo Kas Dana BOS sebesar Rp1.244.776.338,00 atau 94,20%. Rincian Kas lainnya per 31 Desember 2021, sebagaimana tersaji pada **Tabel 5.79**.





**Tabel 5.79 Rincian Saldo Rekening Kas Dana BOS**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Reklas dari Kas Lainnya)	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
Sisa Dana BOS TA 2021	0,00	0,00	17.015.254.000,00	16.938.615.000,00	76.639.000,00
Sisa Dana BOS TA 2020	197.376.501,00	0,00	0,00	197.376.501,00	0,00
Sisa Dana BOS TA 2019	83.740.000,00	0,00	0,00	83.740.000,00	0,00
Sisa Dana BOS TA 2018	40.778.090,00	14.094.000,00	0,00	26.684.090,00	0,00
Sisa Dana BOS TA 2017	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00
Dana Afiriasi	595.730.000,00	414.994.000,00	1.020.000.000,00	1.200.736.000,00	0,00
Sisa Dana BOS SDN 2 Malkot (2010-2014)	390.990.747,00	0,00	0,00	390.990.747,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.321.415.338,00</b>	<b>429.088.000,00</b>	<b>18.035.254.000,00</b>	<b>18.850.942.338,00</b>	<b>76.639.000,00</b>

Koreksi saldo awal kas dana BOS 2021 merupakan koreksi atas terlambatnya laporan penggunaan dana BOS masuk ke Dinas Pendidikan disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Sekolah serta kesalahan pelaporan oleh Tim BOS sehingga kurang catat pada realisasi belanja. Rincian sekolah-sekolah yang terdapat dalam koreksi saldo awal tersaji pada **Tabel 5.80**.

**Tabel 5.80 Rincian Koreksi Saldo Awal di Sekolah-sekolah**

No	Nama Sekolah	Tahun	Saldo Awal yang Dikoreksi (Rp)	Keterangan
1	SDN 006 MENTARANG	2019	9.460.000,00	Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2019, dinyatakan melalui Surat Pernyataan
2	SDN 003 MENTARANG	2019	4.634.000,00	Terlambat mengantar laporan ke DISDIK sudah di SPJ pada Tahun 2019, dinyatakan melalui Surat Pernyataan
3	SDN 008 MENTARANG HULU	2020	1.170.000,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Bos Afiriasi Tahun 2020, dinyatakan dalam BA
4	SDN 001 MALINAU SELATAN	2020	9.268.000,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Bos Afiriasi Tahun 2020, dinyatakan dalam BA
5	SMPN 2 M. SELATAN HULU	2020	10.590.000,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Bos Afiriasi Tahun 2020, dinyatakan dalam BA
6	SDN 006 MALINAU KOTA	2019	91.966.000,00	Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2019 (Afiriasi), dinyatakan melalui Surat Pernyataan
7	SDN 001 MENTARANG HULU	2019	62.000.000,00	Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2019 (Afiriasi), dinyatakan melalui Surat Pernyataan
8	SDN 001 MENTARANG HULU	2020	60.000.000,00	Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020 (Afiriasi), dinyatakan melalui Surat Pernyataan
9	SDN 002 SUNGAI BOH	2020	60.000.000,00	Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020 (Afiriasi), dinyatakan melalui Surat Pernyataan
10	SDN 004 SUNGAI BOH	2020	60.000.000,00	Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020 (Afiriasi), dinyatakan melalui Surat Pernyataan
11	SMPN 1 SUNGAI BOH	2020	60.000.000,00	Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020 (Afiriasi), dinyatakan melalui Surat Pernyataan
<b>Jumlah</b>			<b>429.088.000,00</b>	





Sisa kas Dana BOS TA 2021 sebesar Rp76.639.000,00 yang masih terdapat di rekening sekolah, adapun rincian dari sisa Dana BOS TA 2021 pada **Tabel 5.81**.

**Tabel 5.81 Sisa Dana BOS TA 2021**

(dalam rupiah)

NO	SEKOLAH	KETERANGAN	Sisa Dana		
			Tunai	Bank	JUMLAH
1	SDN 001 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.968.000,00	2.968.000,00
2	SDN 002 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	3.922.000,00	3.922.000,00
3	SDN 003 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
4	SDN 004 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.696.000,00	1.696.000,00
5	SDN 005 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	3.922.000,00	3.922.000,00
6	SDN 006 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
7	SDN 008 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
8	SDN 010 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
9	SDN 011 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.332.000,00	2.332.000,00
10	SDN 001 MALINAU UTARA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00
11	SDN 003 MALINAU UTARA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.696.000,00	1.696.000,00
12	SDN 006 MALINAU UTARA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	636.000,00	636.000,00
13	SDN 009 MALINAU UTARA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.696.000,00	1.696.000,00
14	SDN 012 MALINAU UTARA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
15	SDN 013 MALINAU UTARA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	636.000,00	636.000,00
16	SDN 001 MALINAU BARAT	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.696.000,00	1.696.000,00
17	SDN 002 MALINAU BARAT	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
18	SDN 003 MALINAU BARAT	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
19	SDN 005 MALINAU BARAT	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
20	SDN 001 MENTARANG	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00
21	SDN 002 MENTARANG	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	636.000,00	636.000,00
22	SDN 003 MENTARANG	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23	SDN 004 MENTARANG	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	636.000,00	636.000,00
24	SDN 005 MENTARANG	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
25	SDN 001 MENTARANG HULU	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	318.000,00	318.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

NO	SEKOLAH	KETERANGAN	Sisa Dana		
			Tunai	Bank	JUMLAH
26	SDN 001 MALINAU SELATAN	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.696.000,00	1.696.000,00
27	SDN 002 MALINAU SELATAN	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
28	SDN 006 MALINAU SELATAN	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	318.000,00	318.000,00
29	SDN 005 PUJUNGAN	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	318.000,00	318.000,00
30	SDN 003 KAYAN HILIR	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	636.000,00	636.000,00
31	SDN 001 SUNGAI BOH	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	636.000,00	636.000,00
32	SMPN 1 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00
33	SMPN 2 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00
34	SMPN 3 MALINAU KOTA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	810.000,00	810.000,00
35	SMPN 1 MALINAU UTARA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00
36	SMPN 2 MALINAU UTARA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
37	SMPN 4 MALINAU UTARA	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
38	SMPN 1 MALINAU BARAT	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
39	SMPN 3 MALINAU BARAT	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
40	SMPN 1 MENTARANG	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
41	SMPN 1 MALINAU SELATAN	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
42	SMPN 1 M. SELATAN HULU	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	810.000,00	810.000,00
43	SMPN 1 KAYAN HULU	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
44	SMPN 2 KAYAN HULU	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	405.000,00	405.000,00
45	SMPN 2 SUNGAI BOH	Sisa Dana Bosnas TA 2021 yg belum di SPJ	0,00	405.000,00	405.000,00
Jumlah			0,00	76.639.000,00	76.639.000,00

Saldo Kas Dana BOS sebesar Rp76.639.000,00 merupakan Dana BOS kurang salur tahap 2, yang baru masuk ke rekening sekolah-sekolah pada awal bulan Desember 2021 dan pihak sekolah baru mengetahui dana tersebut masuk pada tanggal 28 Desember 2021 pada nomor rekening sekolah yang baru. Tahun 2021 semua sekolah mengganti nomor rekening untuk penyaluran dana BOS sesuai standar yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan





Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

**5.3.1.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP** 31 Desember 2021  
Rp0,00 31 Desember 2020  
Rp0,00

Kas di Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Tahun 2021 telah dilakukan reklas dari kas lainnya Kas Dana Kapitasi pada FKTP. Per 31 Desember 2021 pengakuan saldo Dana Kapitasi pada FKTP di reklas ke Kas di Kas Daerah berdasarkan Perpres 32 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2). Rincian Kas lainnya per 31 Desember 2021, sebagaimana tersaji dalam **Tabel 5.82**.

**Tabel 5.82 Rincian Saldo Rekening Kas Dana Kapitasi pada FKTP**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Reklas dari Kas Lainnya)	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
Dana JKN	2.107.854,00	58.755.781,00	6.376.205.567,20	6.319.557.640,20	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.107.854,00</b>	<b>58.755.781,00</b>	<b>6.376.205.567,20</b>	<b>6.319.557.640,20</b>	<b>0,00</b>

Koreksi saldo awal merupakan koreksi atas kurang catat di saldo akhir 2020 Dana Kapitasi Jasa Pelayanan Bulan Okotember sampai dengan Desember 2020 pada PKM Long Loreh Senilai Rp58.755.780,00 dan lebih catat di PKM Malinau seberang Seberang Rp1,00 yang tertuang dalam Berta Acara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 12 Januari 2021.

**5.3.1.1.7. Kas Lainnya** 31 Desember 2021  
Rp55.501,00 31 Desember 2020  
Rp1.323.578.693,00

Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 55.501,00. Tahun 2021 telah dilakukan reklas dari kas lainnya ke Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP.

Rincian Kas lainnya per 31 Desember 2021, sebagaimana tersaji dalam **Tabel 5.83**.

**Tabel 5.83 Rincian Saldo Rekening Kas Lainnya**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Reklas		Saldo Akhir
		Kas Dana BOS	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	
Dana Kapitasi JKN	1.321.601,00	-	1.321.601,00	-
Bunga Kapitasi	786.253,00	-	786.253,00	-
Sisa Dana Hibah/Bansos 2015	55.501,00	-	-	55.501,00
Sisa Dana BOS TA 2020	197.376.501,00	197.376.501,00	-	-
Sisa Dana BOS TA 2019	83.740.000,00	83.740.000,00	-	-





Uraian	Saldo Awal	Reklas		Saldo Akhir
		Kas Dana BOS	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	
Sisa Dana BOS TA 2018	40.778.090,00	40.778.090,00	-	-
Sisa Dana BOS TA 2017	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-
Dana Afirmasi	595.730.000,00	595.730.000,00	-	-
Sisa Dana BOS SDN 2 Malkot (2010-2014)	390.990.747,00	390.990.747,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.323.578.693,00</b>	<b>1.321.415.338,00</b>	<b>2.107.854,00</b>	<b>55.501,00</b>

Kas lainnya atas Jagir dari dana hibah/bansos tahun 2015 sebesar Rp55.501,00 yang masih terdapat di rekening sekolah, adapun rincian dari sisa dana hibah/bansos Tahun 2015 pada **Tabel 5.84**.

**Tabel 5.84 Sisa Dana Hibah/Bansos Tahun 2015**

(dalam rupiah)

NO	SEKOLAH	KETERANGAN	JUMLAH
1	SMPN 1 MALINAU SELATAN HULU	Bunga Bank	55.501,00
<b>TOTAL</b>			<b>55.501,00</b>

#### 5.3.1.1.8. Piutang Pajak Daerah

**31 Desember 2021**  
Rp9.490.795.798,00

**31 Desember 2020**  
Rp8.550.805.670,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.490.795.798,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.550.805.670,00 maka terdapat peningkatan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp939.990.128,00 atau 10,99%. Piutang Pajak merupakan tagihan pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran, rincian mutasi Piutang Pajak disajikan pada **Tabel 5.85**.

**Tabel 5.85 Rincian Piutang Pajak TA 2021**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Awal Pajak Per 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Pajak Per 31 Desember 2021
Penginapan	1.866.700,00	-	-	1.866.700,00
Rumah Kost	570.000,00	-	-	570.000,00
Rumah Makan Dan Sejenisnya	1.000.000,00	150.000,00	-	1.150.000,00
Kafetaria Dan Sejenisnya	11.972.818,00	1.400.000,00	11.972.818,00	1.400.000,00
Kantin Dan Sejenisnya	2.440.500,00	-	-	2.440.500,00
Warung Dan Sejenisnya	8.934.300,00	850.000,00	-	9.784.300,00
Jasa Boga/Katering Dan Sejenisnya	8.021.900,00	16.566.900,00	4.679.800,00	19.909.000,00
Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	910.000,00	-	-	910.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Jenis Pajak	Saldo Awal Pajak Per 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Pajak Per 31 Desember 2021
Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	162.521.089,00	-	-	162.521.089,00
Reklame Kain	5.025.125,00	5.833.100,00	-	10.858.225,00
Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.398.026,00	10.015.572,00	367.611,00	13.045.987,00
Penerangan Jalan Sumber Lain	150.602.837,00	152.474.803,00	150.602.837,00	152.474.803,00
Pasir Dan Kerikil	17.630.180,00	9.219.240,00	5.182.200,00	21.667.220,00
Tanah Liat	2.225.000,00	2.595.670,00	8.800,00	4.811.870,00
Mineral Bukan Logam Dan Batuan Lainnya	437.030.763,00	7.490.825,00	380.719.975,00	63.801.613,00
PBBP2	7.723.274.032,00	1.553.188.922,00	266.260.863,00	9.010.202.091,00
Bphtb-Pemberian Hak Baru	13.382.400,00	-	-	13.382.400,00
<b>JUMLAH</b>	<b>8.550.805.670,00</b>	<b>1.759.785.032,00</b>	<b>819.794.904,00</b>	<b>9.490.795.798,00</b>

**5.3.1.1.8.1. Penyisihan Piutang Pajak**

**31 Desember 2021**  
**(Rp4.589.091.529,69)**

**31 Desember 2020**  
**(Rp3.404.896.808,59)**

Penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp4.589.091.529,69) dan jika dibandingkan dengan piutang pajak per 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp3.404.896.808,59), maka terdapat peningkatan penyisihan piutang pajak sebesar Rp1.184.194.721,09 atau 34,78%. Perhitungan penyisihan piutang pajak pada **Lampiran 4** dan rincian penyisihan piutang pajak disajikan pada **Tabel 5.86**.

**Tabel 5.86 Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2021**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Penyisihan Piutang
Penginapan	1.866.700,00
Rumah Kost	570.000,00
Rumah Makan Dan Sejenisnya	100.000,00
Kafetaria Dan Sejenisnya	-
Kantin Dan Sejenisnya	2.199.500,00
Warung Dan Sejenisnya	5.987.750,00
Jasa Boga/Katering Dan Sejenisnya	418.970,50
Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	560.000,00
Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	148.817.334,50
Reklame Kain	4.502.790,50
Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	700.584,68
Penerangan Jalan Sumber Lain	-
Pasir Dan Kerikil	166.351,90
Tanah Liat	43.602,50
Mineral Bukan Logam Dan Batuan Lainnya	36.035.131,40
PBBP2	4.380.431.613,71
BPHTB-Pemberian Hak Baru	6.691.200,00
<b>JUMLAH</b>	<b>4.589.091.529,69</b>





Penyisihan piutang pajak merupakan penyisihan atas piutang pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2016.

**5.3.1.1.8.2. Piutang Pajak Netto** 31 Desember 2021  
Rp4.901.704.268,32 31 Desember 2020  
Rp5.145.908.861,41

Jumlah Piutang pajak *netto* per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.901.704.268,32 adalah nilai Piutang per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp9.490.795.798,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp4.589.091.529,69 dan piutang pajak *netto* per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.901.704.268,32, rincian piutang pajak *netto* disajikan pada **Tabel 5.87**.

**Tabel 5.87 Rincian Piutang Pajak Netto TA 2021**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang	Piutang Netto (Setelah Penyisihan)
Penginapan	1.866.700,00	1.866.700,00	-
Rumah Kost	570.000,00	570.000,00	-
Rumah Makan Dan Sejenisnya	1.150.000,00	100.000,00	1.050.000,00
Kafetaria Dan Sejenisnya	1.400.000,00	-	1.400.000,00
Kantin Dan Sejenisnya	2.440.500,00	2.199.500,00	241.000,00
Warung Dan Sejenisnya	9.784.300,00	5.987.750,00	3.796.550,00
Jasa Boga/Katering Dan Sejenisnya	19.909.000,00	418.970,50	19.490.029,50
Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	910.000,00	560.000,00	350.000,00
Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	162.521.089,00	148.817.334,50	13.703.754,50
Reklame Kain	10.858.225,00	4.502.790,50	6.355.434,50
Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.045.987,00	700.584,68	12.345.402,33
Penerangan Jalan Sumber Lain	152.474.803,00	-	152.474.803,00
Pasir Dan Kerikil	21.667.220,00	166.351,90	21.500.868,10
Tanah Liat	4.811.870,00	43.602,50	4.768.267,50
Mineral Bukan Logam Dan Batuan Lainnya	63.801.613,00	36.035.131,40	27.766.481,60
PBBP2	9.010.202.091,00	4.380.431.613,71	4.629.770.477,29
BPHTB-Pemberian Hak Baru	13.382.400,00	6.691.200,00	6.691.200,00
<b>JUMLAH</b>	<b>9.490.795.798,00</b>	<b>4.589.091.529,69</b>	<b>4.901.704.268,32</b>

**5.3.1.1.9. Piutang Retribusi** 31 Desember 2021  
Rp302.271.005,00 31 Desember 2020  
Rp362.815.005,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp302.271.005,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar



Rp362.815.005,00 maka terdapat penurunan Piutang Retribusi sebesar Rp60.544.000,00 atau 16,69%. Rincian mutasi Piutang Retribusi disajikan pada **Tabel 5.88**.

**Tabel 5.88 Rincian Mutasi Piutang Retribusi TA 2021**

(dalam rupiah)

Jenis Retribusi	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Per 1 Januari 2021			Per 31 Desember 2021
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	257.069.000,00	143.990.000,00	204.534.000,00	196.525.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	67.377.655,00	0,00	0,00	67.377.655,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.035.500,00	0,00	0,00	2.035.500,00
Retribusi Pelataran	26.741.850,00	0,00	0,00	26.741.850,00
Retribusi Pemakaian Alat	9.216.000,00	0,00	0,00	9.216.000,00
Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>362.815.005,00</b>	<b>143.990.000,00</b>	<b>204.534.000,00</b>	<b>302.271.005,00</b>

Piutang Retribusi merupakan tagihan retribusi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran.

**5.3.1.1.9.1. Penyisihan Piutang Retribusi**

**31 Desember 2021**  
(Rp167.077.755,00)

**31 Desember 2020**  
(Rp183.939.255,00)

Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp167.077.755,00) dan jika dibandingkan dengan piutang retribusi per 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp183.939.255,00), maka terdapat penurunan penyisihan piutang retribusi sebesar Rp16.861.500,00 atau 9,17%. Perhitungan penyisihan piutang retribusi pada **Lampiran 5** dan rincian penyisihan piutang retribusi disajikan pada **Tabel 5.89**.

**Tabel 5.89 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi TA 2021**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Penyisihan Piutang
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	61.331.750,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	67.377.655,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.035.500,00
Retribusi Pelataran	26.741.850,00
Retribusi Pemakaian Alat	9.216.000,00
Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	375.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>167.077.755,00</b>





Berdasarkan tabel di atas metode penyisihan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada Tahun 2021. Piutang retribusi penyisihan atas piutang retribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 (LKPD Aktual pada Pemerintah Daerah) merupakan turunan dari PP 71 Tahun 2010 (SAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2016.

**5.3.1.1.9.2. Piutang Retribusi *Netto*** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp135.193.250,00** **Rp178.875.750,00**

Jumlah Piutang Retribusi *netto* per 31 Desember 2021 sebesar Rp135.193.250,00 adalah nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah yang berasal dari nilai *bruto* sebesar Rp302.271.005,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp167.077.755,00 dan Piutang Retribusi *netto* per 31 Desember 2020 sebesar Rp178.875.750,00, dengan rincian sebagai berikut, Piutang Retribusi disajikan pada **Tabel 5.90**.

**Tabel 5.90 Rincian Piutang Retribusi *Netto* TA 2021**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang	Piutang Netto (Setelah Penyisihan)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	196.525.000,00	61.331.750,00	135.193.250,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	67.377.655,00	67.377.655,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.035.500,00	2.035.500,00	0,00
Retribusi Pelataran	26.741.850,00	26.741.850,00	0,00
Retribusi Pemakaian Alat	9.216.000,00	9.216.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	375.000,00	375.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>302.271.005,00</b>	<b>167.077.755,00</b>	<b>135.193.250,00</b>

**5.3.1.1.10. Piutang Lain-lain PAD yang Sah** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
**Rp9.987.553.491,00** **Rp293.746,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.987.553.491,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp293.746,00 maka terdapat peningkatan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9.987.259.745,00. Tingginya nilai peningkatan Piutang Lain-lain PAD yg sah disebabkan beberapa piutang beserta penyisihan piutang yang terdapat pada Piutang Lainnya di reklas ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Hasil Keputusan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Adapun piutang lainnya yang telah dilakukan reklas ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah tercerminkan pada Tabel 5.91. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan tagihan Lain-lain PAD yang Sah yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Lain-lain PAD yang Sah yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun





anggaran, rincian mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada **Tabel 5.91**.

**Tabel 5.91 Rincian Mutasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021**

*(dalam rupiah)*

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal	Reklas dari Piutang Lainnya	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		Per 1 Januari 2021				Per 31 Desember 2021
1	Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	293.746,00	-	-	-	293.746,00
2	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	60.030.000,00	-	60.030.000,00
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.615.672.300,00	-	1.615.672.300,00	-
4	Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	228.259,00	-	-	228.259,00
5	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	-	151.504,00	-	-	151.504,00
6	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	298.840.000,00	-	-	298.840.000,00
7	Piutang Pendapatan BLUD	-	5.808.215.744,00	38.746.618.048,00	34.926.823.810,00	9.628.009.982,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>293.746,00</b>	<b>7.723.107.807,00</b>	<b>38.806.648.048,00</b>	<b>36.542.496.110,00</b>	<b>9.987.553.491,00</b>

Piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain merupakan piutang atas pengembalian kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan pembangunan jalan Pusat Pemerintahan - Tg. Keranjang dengan kontrak nomor : 03/MY/PPTK-PJPP.TK/DPU-BM/G7/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan add. Kontrak No. 07.1/MY/ADD-PJPP.TK/DPU-BG/G7/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang telah dilakukan pelunasan pada tanggal 1 Desember 2021 melalui RKUD Kabupaten Malinau.

**5.3.1.1.10.1. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**      31 Desember 2021      31 Desember 2020  
(Rp1.081.233.809,90)      (Rp1.468,73)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp1.081.233.809,90) dan jika dibandingkan dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp1.468,73), maka terdapat peningkatan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.081.232.341,17. Perhitungan penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada **Lampiran 6** dan rincian penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada **Tabel 5.92**.





**Tabel 5.92 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah TA 2021**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Penyisihan Piutang
Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.468,73
Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.150,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00
Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	114.129,50
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	778,42
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	298.840.000,00
Piutang Pendapatan BLUD	781.977.283,25
<b>JUMLAH</b>	<b>1.081.233.809,90</b>

Merupakan penyisihan atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 (LKPD Akruar pada Pemerintah Daerah) merupakan turunan dari PP 71 Tahun 2010 (SAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2016.

**5.3.1.1.10.2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp8.906.319.681,11 Rp292.277,27

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang sah *netto* per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.906.319.681,11 adalah nilai Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah yang berasal dari nilai *bruto* sebesar Rp9.987.553.491,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1.081.233.809,90 dan piutang Lain-lain PAD yang sah *netto* per 31 Desember 2020 sebesar Rp292.277,27, dengan rincian sebagai berikut, piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada **Tabel 5.93**.

**Tabel 5.93 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto TA 2021**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang setelah reklas	Piutang Netto (Setelah Penyisihan)
Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	293.746,00	1.468,73	292.277,27
Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.030.000,00	300.150,00	59.729.850,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	228.259,00	114.129,50	114.129,50
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	151.504,00	778,42	150.725,59
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	298.840.000,00	298.840.000,00	0,00



Jenis Pajak	Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang setelah reklas	Piutang Netto (Setelah Penyisihan)
Piutang Pendapatan BLUD	9.628.009.982,00	781.977.283,25	8.846.032.698,75
<b>JUMLAH</b>	<b>9.987.553.491,00</b>	<b>1.081.233.809,90</b>	<b>8.906.319.681,11</b>

**5.3.1.1.11. Piutang Transfer Pemerintah Pusat** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp708.555.139,00 Rp36.441.808.827,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp708.555.139,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp36.441.808.827,00 maka terdapat penurunan transfer pemerintah pusat sebesar Rp35.733.253.688,00 atau 98,06%.

**5.3.1.1.11.1. Piutang Dana Bagi Hasil** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp56.500,00 Rp36.441.808.827,00

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp56.500,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp36.441.808.827,00 maka terdapat penurunan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp36.441.752.327,00 atau 99,99%. Piutang dana bagi hasil pajak terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Mutasi piutang dana bagi hasil disajikan pada **Tabel 5.94**.

**Tabel 5.94 Rincian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil TA 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Piutang Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal Berdasarkan PMK 25 & 129 TA 2021	Mutasi		Pemotongan KB melalui LB	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2021 (Unaudited)
			Tambah	Kurang		
<b>Piutang Bagi Hasil Pajak</b>						
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	0,00	2.018.983.421,00	4.116.293.000,00	5.071.335.400,00	1.063.941.021,00	0,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	1.009.623.500,00	(833.287.548,00)	205.490.000,00	260.071.100,00	121.754.852,00	0,00
DBH PBB Bagi Rata	1.419.343.317,00	1.726.270.298,00	2.913.675.000,00	4.067.328.617,00	1.991.959.998,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	1.622.612.396,00	0,00	0,00	1.622.612.396,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	1.854.534.300,00	0,00	6.280.901.000,00	6.659.965.329,00	1.475.469.971,00	0,00
Bagi Hasil PBB Migas	504.247.663,00	490.896.917,00	4.430.375.000,00	4.430.375.000,00	995.144.580,00	0,00
Bagi Hasil PBB Non Migas Lainnya	13.463.906.115,00	13.676.126.004,00	4.148.227.000,00	17.034.121.601,00	14.254.137.518,00	0,00
Bagian Daerah Sektor Lainnya	94.560.418,00	206.994.707,00	61.505.000,00	363.060.125,00	0,00	0,00
Biaya Pungut PBB Perkebunan	87.001.776,00	0,00	0,00	87.001.776,00	0,00	0,00
Biaya Pungut PBB Kehutanan	77.267.700,00	0,00	261.704.000,00	338.971.700,00	0,00	0,00
Biaya Pungut PBB Migas	17.922.524,00	17.045.032,00	153.832.000,00	167.836.600,00	20.962.956,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Piutang Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal Berdasarkan PMK 25 & 129 TA 2021	Mutasi		Pemotongan KB melalui LB	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2021 (Unaudited)
			Tambah	Kurang		
Biaya Pungut PBB Non Migas Lainnya	506.334.044,00	474.585.559,00	144.036.000,00	1.124.955.603,00	0,00	0,00
BP Sektor Lainnya	3.590.731,00	7.187.224,00	2.135.000,00	12.912.955,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.660.944.484,00</b>	<b>17.784.801.614,00</b>	<b>22.718.173.000,00</b>	<b>41.240.548.202,00</b>	<b>19.923.370.896,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>						
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	179.883.300,00	0,00	902.406.000,00	1.082.289.300,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	3.329.700,00	0,00	119.833.000,00	123.162.700,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	86.096.225,00	0,00	638.478.000,00	724.574.225,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	11.378.192.878,00	(2.094.838.503,00)	110.122.362.000,00	119.405.716.375,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	986.324.050,00	0,00	2.546.160.000,00	3.532.484.050,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.600.857.040,00	180.208.499,00	14.291.080.000,00	17.072.145.539,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	546.181.150,00	0,00	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	316.881.000,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	113.000,00	56.500,00	0,00	56.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.780.864.343,00</b>	<b>(1.914.630.004,00)</b>	<b>129.748.751.000,00</b>	<b>143.298.047.839,00</b>	<b>316.881.000,00</b>	<b>56.500,00</b>
<b>Total</b>	<b>36.441.808.827,00</b>	<b>15.870.171.610,00</b>	<b>152.466.924.000,00</b>	<b>184.538.596.041,00</b>	<b>20.240.251.896,00</b>	<b>56.500,00</b>

Koreksi saldo awal piutang transfer bagi hasil pajak merupakan penyesuaian saldo awal piutang berdasarkan PMK nomor 25/PMK.07 2021 dan 129/PMK.07 2021 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2021. (Lampiran 3)

**5.3.1.1.11.2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)**

**31 Desember 2021**  
**Rp708.498.639,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp0,00**

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp708.498.639,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp0,00. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan total Dana Alokasi Umum susulan untuk bulan Juni, Juli, Agustus, dan September 2021 yang telah di salurkan ke RKUD Kabupaten Malinau pada tanggal 20 Desember 2021, namun hingga tanggal 31 Desember 2021 dana tersebut tidak masuk ke RKUD Kabupaten Malinau (bukti salur berdasarkan aplikasi SIMTRADA). Dana Alokasi Umum susulan tersebut diketahui masuk ke RKUD Kabupaten Malinau pada tanggal 6 Januari 2022 rekening koran yang disampaikan oleh Bankaltimtara kepada Pemda Malinau. Berdasarkan surat dari PT. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara nomor 008/C-1/BPD-MLN/I/2022 keterlambatan ini terjadi karena



gangguan sistem pada tanggal 20 Desember 2021, sehingga transaksi tidak terjurnal secara otomatis. Mutasi piutang Dana Alokasi Umum disajikan pada **Tabel 5.95**.

**Tabel 5.95 Rincian Mutasi Piutang Dana Alokasi Umum TA 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	Piutang Per 31 Desember 2020	Mutasi		Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2021
		Tambah	Kurang	
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	780.635.100.000,00	779.926.601.361	708.498.639,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>780.635.100.000,00</b>	<b>779.926.601.361,00</b>	<b>708.498.639,00</b>

**5.3.1.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah** 31 Desember 2021  
Rp5.434.760.152,00 31 Desember 2020  
Rp12.889.211.138,80

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.434.760.152,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp12.889.211.138,80 maka terdapat penurunan Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp7.454.450.986,80 atau 57,83%. Piutang Transfer Antar Daerah merupakan piutang atas bagi hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Malinau. Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah disajikan pada **Tabel 5.96**.

**Tabel 5.96 Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
Pendapatan Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.160.553.358,73	0,00	29.052.736.825,00	34.858.331.924,73	4.354.958.259,00
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	65.279.717,16	0,00	169.224.410,00	213.746.014,16	20.758.113,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.245.960.418,32	0,10	3.305.144.683,00	4.000.094.340,42	551.010.761,00
Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.417.417.644,59	0,00	3.990.119.534,00	4.899.504.159,59	508.033.019,00
Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	4.659.873.501,00	4.659.873.501,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

URAIAN	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
Dari Pajak Rokok					
<b>JUMLAH</b>	<b>12.889.211.138,80</b>	<b>0,10</b>	<b>41.177.098.953,00</b>	<b>48.631.549.939,90</b>	<b>5.434.760.152,00</b>

Koreksi saldo awal piutang menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.140/2021 tentang Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 Dan Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020.

**5.3.1.1.13. Piutang Lainnya** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp488.862.281,00 Rp8.199.970.088,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp488.862.281,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.199.970.088,00 maka terdapat penurunan Piutang Lainnya sebesar Rp7.711.107.807,00. Tingginya nilai penurunan Piutang Lainnya disebabkan beberapa piutang beserta penyisihan piutang yang terdapat pada Piutang Lainnya direklas ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Hasil Keputusan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Piutang Lainnya disajikan pada **Tabel 5.97**.

**Tabel 5.97 Rincian Piutang Lainnya Tahun 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Permendagri 90 Th 2019		Permendagri 64 Th 2013	Kenaikan/ Penurunan
	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2020	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	37.937.312,00	37.937.312,00	37.937.312,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	50.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	12.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	400.196.000,00	400.196.000,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	728.969,00	880.473,00	0,00	(151.504,00)
Panjar Kegiatan	0,00	1.615.900.559,00	0,00	(1.615.900.559,00)
Uang Muka Operasional	0,00	6.107.055.744,00	0,00	(6.107.055.744,00)
<i>Piutang Lain-Lainnya</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.124.032.776,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Jumlah</b>	<b>488.862.281,00</b>	<b>8.199.970.088,00</b>	<b>8.199.970.088,00</b>	<b>(7.711.107.807,00)</b>





Tabel 5.98 Rincian Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Reklas ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir setelah direklas
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	37.937.312,00	0,00	0,00	0,00	37.937.312,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	38.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	400.196.000,00	0,00	0,00	0,00	400.196.000,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	880.473,00	(151.504,00)	0,00	0,00	728.969,00
Panjar Kegiatan	1.615.900.559,00	(1.615.900.559,00)	0,00	0,00	0,00
Uang Muka Operasional	6.107.055.744,00	(6.107.055.744,00)	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.199.970.088,00</b>	<b>(7.723.107.807,00)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.862.281,00</b>

**5.3.1.1.13.1. Penyisihan Piutang Lainnya** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
(Rp400.196.000,00) (Rp2.143.287.793,80)

Penyisihan piutang lainnya yang sah tak tertagih sebesar per 31 Desember 2021 sebesar (Rp400.196.000,00) dan penyisihan piutang lainnya yang sah tak tertagih sebesar per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.143.287.793,80.

**5.3.1.1.13.2. Piutang Lainnya Netto** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp88.666.281,00 Rp5.980.744.982,20

Jumlah piutang lainnya netto per 31 Desember 2021 sebesar Rp88.666.281,00 adalah nilai Piutang Lain-lainnya per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp488.862.281,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp400.196.000,00 dan Jumlah piutang lainnya netto per 31 Desember 2021 sebesar Rp88.666.281,00.

**5.3.1.1.14. Persediaan** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp36.751.876.736,58 Rp53.021.122.738,22

Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.751.876.736,58 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp53.021.122.738,22 maka terdapat penurunan Persediaan sebesar Rp16.269.246.001,64 atau 30,68%.

Persediaan per 31 Desember 2021 merupakan nilai persediaan berdasarkan laporan *stock opname* barang persediaan pada OPD disajikan pada **Tabel 5.99**.





**Tabel 5.99 Persediaan Per OPD TA 2021 dan TA 2020**

(dalam rupiah)

No	OPD	Persediaan 2021	Persediaan 2020
1	Dinas Pendidikan	0,00	2.871.435.655,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23.278.450.463,58	21.347.331.291,94
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.379.521.003,00	25.347.778.730,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	874.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.738.000,00	812.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.571.340,00	1.074.627.756,28
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	4.331.000,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	4.916.000,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.750.000,00	46.193.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.960.000,00	4.612.600,00
11	Dinas Perhubungan	24.214.000,00	31.210.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja	6.367.000,00	0,00
13	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.566.000,00	0,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.848.000,00	0,00
15	Dinas Perikanan	19.901.200,00	340.000,00
16	Dinas Pertanian	8.375.000,00	57.734.020,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	800.000,00
18	Bagian Ekonomi	0,00	1.495.600,00
19	Bagian Umum	1.740.671.730,00	1.931.109.085,00
20	Bagian Pembangunan	9.108.000,00	0,00
21	Bagian Perencanaan Keuangan	796.000,00	1.742.000,00
22	Bagian Pengelola Perbatasan Negara	1.260.000,00	7.549.000,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	58.856.000,00
24	Kec. Malinau barat	2.319.000,00	940.000,00
25	Kec. Mentarang Hulu	88.000,00	1.010.000,00
26	Kec. Kayan Hulu	0,00	500.000,00
27	Kec. Malinau Selatan Hilir	995.000,00	560.000,00
28	Inspektorat	550.000,00	2.061.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	117.580.000,00	231.551.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.751.876.736,58</b>	<b>53.021.122.738,22</b>





Rincian Persediaan sebesar Rp36.751.876.736,58 berdasarkan OPD dan jenis persediaan disajikan pada **Lampiran 7**.

**Tabel 5.100 Rincian Mutasi Persediaan TA 2021**

(dalam rupiah)

Kategori Persediaan	Saldo Awal per 31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Persediaan Per 31 Desember 2021
Alat Tulis Kantor (ATK)	1.386.946.492,00	6.707.552.844,00	6.872.873.988,00	1.221.625.348,00
Alat Listrik	14.502.000,00	336.043.960,00	337.438.560,00	13.107.400,00
Benda Pos	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	134.641.970,00	266.020.910,00	283.362.326,00	117.300.554,00
Bahan Bakar dan Pelumas	859.988.520,00	6.130.635.150,00	6.166.493.940,00	824.129.730,00
Pengisian Tabung Gas	21.635.000,00	971.749.400,00	982.440.900,00	10.943.500,00
Alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata	0,00	893.958.000,00	893.958.000,00	0,00
Bahan Kimia	57.169.020,00	450.996.000,00	508.165.020,00	0,00
Bahan/Bibit Ternak/bibit ikan	0,00	58.840.000,00	58.840.000,00	0,00
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	289.006.750,00	289.006.750,00	0,00
Obat Obatan	7.079.882.775,13	8.749.506.579,41	7.965.831.933,13	7.863.557.421,41
Obat-obat lainnya	7.712.143.318,47	9.934.052.777,58	9.977.510.373,43	7.668.685.722,62
Perlengkapan Dinas	175.720.378,00	151.827.500,00	275.526.733,00	52.021.145,00
Bahan lainnya	3.280.000,00	256.537.500,00	259.817.500,00	0,00
Suku Cadang Alat Angkutan	24.482.510,00	0,00	24.482.510,00	0,00
Bahan Cetak	898.426.070,00	3.778.517.820,00	4.048.219.999,00	628.723.891,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	40.135.000,00	173.742.150,00	186.127.150,00	27.750.000,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.310.572.015,00	22.500.000,00	2.941.750.655,00	391.321.360,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	31.301.141.669,62	20.619.442.057,19	33.987.873.062,26	17.932.710.664,55
<b>Jumlah</b>	<b>53.021.122.738,22</b>	<b>59.790.929.398,18</b>	<b>76.060.175.399,82</b>	<b>36.751.876.736,58</b>

Sumber: Persediaan berdasarkan kertas kerja rekonsiliasi SIBAPA.

Persediaan Obat merupakan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pelayanan. Jumlah persediaan obat per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.863.557.421,41 adalah persediaan yang dikuasai Dinas Kesehatan, BLUD-RSUD, dan Dinas Pertanian. Rincian persediaan obat disajikan pada **Tabel 5.101**.

**Tabel 5.101 Rincian Persediaan obat yang dikuasai Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan BLUD-RSUD dan Dinas Pertanian**

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.957.890.598,72
	PKM Sehati	19.893.620,95
	PKM Malinau Kota	70.060.791,80
	PKM Malinau Seberang	75.177.842,27





- Dana bergulir kategori lancar yang dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
- Dana bergulir kurang lancar dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
- Dana bergulir diragukan dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
- Dana bergulir tidak dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan melebihi 5 (lima) tahun setelah tanggal jatuh tempo.

Rincian Dana Bergulir berdasarkan bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) disajikan pada **Tabel 5.102**.

**Tabel 5.102 Nilai Bersih Dana Bergulir**

(dalam rupiah)

Kualitas	Saldo Per 31 Desember 2021	Persentase Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Saldo Dana Bergulir Setelah Penyisihan (NRV)
Saldo Bank	309.178.776,00		0,00	309.178.776,00
Lancar	0,00	0,50%	0,00	0,00
Kurang Lancar	522.710.667,00	10,00%	(52.271.066,70)	470.439.600,30
Diragukan	0,00	50,00%	0,00	0,00
Macet	1.880.633.644,00	100,00%	(1.880.633.644,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.712.523.087,00</b>		<b>(1.932.904.710,70)</b>	<b>779.618.376,30</b>

Kredit Usaha Ekonomi Kerakyatan (KEK) adalah program dana bergulir kepada pengusaha kecil di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan koperasi bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian No.05/Prop.5.1/Perindagkop/ VIII/2002 dan No.96/B0,002/BPD-MLN/VII/2002 tanggal 30 Agustus 2002 dan belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Investasi Non-Permanen berupa pemberian Kredit Bergulir bagi masyarakat/pengusaha kecil dalam bentuk KEK penyaluran/pendistribusiannya telah dilakukan sejak tahun 2002 namun sampai dengan per 31 Desember 2021 nilai pokok kredit yang disalurkan belum lunas seluruhnya.

Dana Bergulir UMKM merupakan program pinjaman dalam bentuk dan penguatan modal bagi UMKM yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penyaluran/pendistribusian Dana Bergulir UMKM telah dilakukan sejak tahun 2013 namun sampai dengan per 31 Desember 2021 nilai pokok kredit yang disalurkan belum lunas seluruhnya.

Rincian penyisihan dana bergulir tersaji pada **Lampiran 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4**.





**5.3.1.2.2 Investasi Permanen  
Penyertaan Modal  
Daerah**

**31 Desember 2021**  
**Rp117.046.849.979,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp115.201.087.829,00**

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Desember 2021 sebesar Rp117.046.849.979,00 merupakan nilai penyertaan modal daerah sampai dengan 31 Desember 2021. Rincian investasi permanen penyertaan modal daerah dan mutasi penyertaan modal daerah disajikan pada **Tabel 5.103**.

**Tabel 5.103 Rincian Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
PT. Bank BPD Kaltim	78.390.000.000,00	0,00	0,00	78.390.000.000,00
PDAM Malinau	19.660.137.439,00	3.453.577.887,00	1.710.930.347,00	21.402.784.979,00
Perusda Intimung	17.150.950.390,00	103.114.610,00	0,00	17.254.065.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>115.201.087.829,00</b>	<b>3.556.692.497,00</b>	<b>1.710.930.347,00</b>	<b>117.046.849.979,00</b>

Penyertaan Modal pada Bankaltimtara sebesar Rp78.390.000.000,00 mencerminkan kepemilikan sebesar 2,62% dari total saham yang dikeluarkan oleh Bankaltimtara. Nilai penyertaan modal sebesar tersebut didasarkan pada surat Bankaltimtara perihal Rincian Data Dana Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Malinau di Bankaltimtara. Metode penilaian penyertaan modal pada Bankaltimtara menggunakan pendekatan metode biaya.

Rincian Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah pada Bankaltimtara sesuai dengan pengeluaran Pemerintah Daerah melalui SP2D disajikan pada **Tabel 5.104**.

**Tabel 5.104 Rincian Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah pada Bankaltimtara**

(dalam rupiah)

No	Tahun	Bank Kaltimtara		
		Realisasi Penyertaan Modal (Rp)	Akumulasi (Rp)	Bentuk Penyertaan Modal
1	2001	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	UANG
2	2002	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	UANG
3	2003	625.000.000,00	3.625.000.000,00	UANG
4	2004	11.000.000.000,00	14.625.000.000,00	UANG
5	2005	4.690.000.000,00	19.315.000.000,00	UANG
6	2006	4.170.000.000,00	23.485.000.000,00	UANG
7	2007	6.760.000.000,00	30.245.000.000,00	UANG
8	2008	0,00	30.245.000.000,00	-
9	2009	14.000.000.000,00	44.245.000.000,00	UANG
10	2010	8.500.000.000,00	52.745.000.000,00	UANG
11	2011	0,00	52.745.000.000,00	-
12	2012	10.645.000.000,00	63.390.000.000,00	UANG
13	2013	15.000.000.000,00	78.390.000.000,00	UANG
14	2014	0,00	78.390.000.000,00	-
15	2015	0,00	78.390.000.000,00	-





No	Tahun	Bank Kaltimara		
		Realisasi Penyertaan Modal (Rp)	Akumulasi (Rp)	Bentuk Penyertaan Modal
16	2016	0,00	78.390.000.000,00	-
17	2018	0,00	78.390.000.000,00	-
18	2019	0,00	78.390.000.000,00	-
19	2020	0,00	78.390.000.000,00	-
20	2021	0,00	78.390.000.000,00	-
TOTAL		78.390.000.000,00	78.390.000.000,00	

Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Malinau dimulai saat disahkannya Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau. Saldo awal nilai ekuitas PDAM, berdasarkan kebijakan akuntansi Kabupaten Malinau dan PSAP Nomor 6 Tahun 2016 bahwa nilai penyertaan modal yang lebih dari 50% maka nilai ekuitas yang dimiliki tersebut harus sama dengan nilai ekuitas pada PDAM APA'MENING.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malinau pada PDAM APA'MENING adalah kepemilikan 100%. Penilaian dan pengakuan investasi permanen berupa penyertaan modal menggunakan pendekatan metode nilai ekuitas. Nilai ekuitas PDAM APA'MENING (*audited*) per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.402.784.979,00. PDAM APA'MENING menerima penyertaan modal dan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malinau di Tahun 2021 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening, dan sesuai dengan hasil perhitungan dan laporan *audited* PDAM Kabupaten Malinau terdapat penambahan sebesar Rp335.741.681,00 dimana pengakuan defisit tahun berjalan PDAM Malinau dari sebelumnya sebesar Rp19.660.137.439,00 menjadi Rp21.402.784.979,00.

Rincian Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah pada PDAM APA'MENING Kabupaten Malinau sesuai dengan pengeluaran Pemerintah Daerah melalui SP2D disajikan pada **Tabel 5.105**.

**Tabel 5.105 Rincian Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah pada PDAM APA' MENING**

(dalam rupiah)

No	Tahun	Pdam Apa' Mening		
		Realisasi Penyertaan Modal (Rp)	Akumulasi (Rp)	Bentuk Penyertaan Modal
1	2005	328.456.829,00	328.456.829,00	UANG
2	2006	350.000.000,00	678.456.829,00	UANG
3	2007	985.660.000,00	1.664.116.829,00	UANG
4	2008	813.000.000,00	2.477.116.829,00	UANG
5	2009	1.768.679.570,00	4.245.796.399,00	UANG
6	2010	0,00	4.245.796.399,00	UANG



No	Tahun	Pdam Apa' Mening		
		Realisasi Penyertaan Modal (Rp)	Akumulasi (Rp)	Bentuk Penyertaan Modal
7	2011	1.603.954.000,00	5.849.750.399,00	UANG
8	2012	0,00	5.849.750.399,00	UANG
9	2013	3.828.500.000,00	9.678.250.399,00	UANG
10	2014	0,00	9.678.250.399,00	UANG
11	2015	10.342.403.115,00	20.020.653.514,00	ASET
12	2016	0,00	20.020.653.514,00	UANG
13	2017	0,00	20.020.653.514,00	UANG
14	2018	0,00	20.020.653.514,00	UANG
15	2019	2.000.000.000,00	22.020.653.514,00	UANG
16	2020	3.000.000.000,00	25.020.653.514,00	UANG
17	2021	3.000.000.000,00	28.020.653.514,00	UANG
TOTAL		28.020.653.514,00	28.020.653.514,00	

Penyertaan Modal pada Perusda Intimung didasarkan pada Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah yang kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 216 Tahun 2004 tentang Susunan dan Tata Kerja Perusda Intimung. Berdasarkan kebijakan akuntansi Kabupaten Malinau dan PSAP Nomor 6 Tahun 2016 bahwa nilai penyertaan modal yang lebih dari 50% maka nilai ekuitas yang dimiliki itu harus sama dengan nilai ekuitas pada Perusda Intimung yang menerima penyertaan modal.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malinau pada Perusda Intimung adalah kepemilikan 100%. Penilaian dan pengakuan investasi permanen berupa penyertaan modal menggunakan pendekatan metode nilai ekuitas. Nilai ekuitas Perusda Intimung (*audited*) per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.254.056.500,00. Nilai tersebut sudah termasuk pengurangan rugi serta penambahan laba per 31 Desember 2021 pada Perusda Intimung dimana terdapat pengakuan laba tahun berjalan dari sebelumnya sebesar Rp17.150.950.390,00 menjadi Rp17.254.056.500,00 atau penambahan sebesar Rp103.114.610,00.

Rincian Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah pada perusda Intimung sesuai dengan pengeluaran Pemerintah Daerah melalui SP2D disajikan pada **Tabel 5.106**.

**Tabel 5.106 Rincian Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah pada PERUSDA INTIMUNG**

(dalam rupiah)

NO	TAHUN	PERUSDA INTIMUNG			
		REALISASI PENYERTAAN MODAL	PENGEMBALIAN	AKUMULASI	BENTUK PENYERTAAN MODAL
1	2004	24.555.000,00	0,00	24.555.000,00	UANG
2	2005	1.406.043.000,00	0,00	1.430.598.000,00	UANG
3	2006	500.000.000,00	0,00	1.930.598.000,00	UANG
4	2007	3.000.000.000,00	0,00	4.930.598.000,00	UANG
5	2008	3.000.000.000,00	0,00	7.930.598.000,00	UANG





NO	TAHUN	PERUSDA INTIMUNG			
		REALISASI PENYERTAAN MODAL	PENGEMBALIAN	AKUMULASI	BENTUK PENYERTAAN MODAL
6	2009	32.961.738.000,00	0,00	40.892.336.000,00	UANG
7	2010	0,00	0,00	40.892.336.000,00	-
8	2011	0,00	29.208.614.850,00	11.683.721.150,00	UANG
9	2012	0,00	0,00	11.683.721.150,00	-
10	2013	9.950.000.000,00	0,00	21.633.721.150,00	UANG
11	2014	0,00	0,00	21.633.721.150,00	-
12	2015	0,00	0,00	21.633.721.150,00	-
13	2016	0,00	0,00	21.633.721.150,00	-
14	2019	0,00	0,00	21.633.721.150,00	-
15	2020	0,00	0,00	21.633.721.150,00	-
16	2021	0,00	0,00	21.633.721.150,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>50.842.336.000,00</b>	<b>29.208.614.850,00</b>	<b>21.633.721.150,00</b>	

### 5.3.1.3. Aset Tetap

**31 Desember 2021**  
Rp4.206.146.899.449,22

**31 Desember 2020**  
Rp4.294.664.813.766,44

Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp4.206.146.899.449,22 merupakan nilai bersih Aset Tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan nilai aset tetap jika sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp6.549.440.113.670,79 Aset Tetap tersebut merupakan nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Malinau per 31 Desember 2021 dan akumulasi penyusutan sebesar (Rp2.343.293.214.221,57) per 31 Desember 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Aset Tetap, maka aset tetap yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sesuai dengan peraturan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 5.107**.

**Tabel 5.107 Rincian Aset Tetap Sebelum Penyusutan**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Per 31 Desember 2021		
		Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Sebelum Penyusutan
Tanah	1.406.125.600.660,67	396.357.572,73	405.695.352,73	1.406.116.262.880,67
Peralatan dan Mesin	479.354.257.417,44	75.093.593.275,00	31.694.892.718,00	522.752.957.974,44
Gedung dan Bangunan	1.764.999.403.504,08	151.587.735.174,00	114.622.687.380,00	1.801.964.451.298,08
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.750.635.754.978,60	37.411.404.614,00	4.178.313.933,00	2.783.868.845.659,60
Aset Tetap Lainnya	21.272.392.975,00	13.720.000,00	94.777.500,00	21.191.335.475,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	38.344.681.833,00	3.048.984.600,00	27.847.406.050,00	13.546.260.383,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.460.732.091.368,79</b>	<b>267.551.795.235,73</b>	<b>178.843.772.933,73</b>	<b>6.549.440.113.670,79</b>



Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2012. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Pemerintah Daerah yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah maupun yang masih dalam proses penelusuran keberadaannya. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset OPD yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi.

Penyesuaian nilai aset pada Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2021 dan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tindak lanjut atas penataan aset dari hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada.

Penyesuaian tersebut antara lain pencatatan aset yang belum tercatat sebelumnya dalam Neraca per 31 Desember 2021. Disamping itu, Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi Aset Tetap direklasifikasi pos ke Aset Lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat;
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran; dan
- c. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.

Serta, Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap dihapus dari pos Aset Tetap. Penghapusan tersebut meliputi:

- a. Pencatatan ganda aset dalam pada neraca dan pencatatan BMD;
- b. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah; dan
- c. Barang yang telah dimusnahkan (dibongkar).

Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.460.732.091.368,79 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.549.440.113.670,79 mengalami peningkatan sebesar Rp88.708.022.302,00 atau 1,37%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau dijelaskan sebagai berikut:

<b>5.3.1.3.1. Tanah</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>Rp1.406.116.262.880,67</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>Rp1.406.125.600.660,67</b>
-------------------------	---	---

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.406.116.262.880,67 dan saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.406.125.600.660,67. Uraian penjelasan saldo akhir Tanah per 31 Desember 2021 pada **Tabel 5.108**.





**Tabel 5.108 Uraian Penjelasan Aset Tetap Tanah**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Tanah per 1 Januari 2021	1.406.125.600.660,67
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2021	0,00
	2) Mutasi aset antar OPD dari OPD lain	105.695.352,66
	3) Dari Belanja Barang dan Jasa	290.662.220,00
	4) Aset baru ditemukan	0,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>396.357.572,66</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Mutasi aset antar OPD ke OPD lain	105.695.352,66
	2) Dihilangkan	300.000.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>405.695.352,66</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021</b>	<b>1.406.116.262.880,67</b>

Dari Tabel 5.108, maka dapat dijelaskan mutasi tambah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah aset antar OPD dari OPD lain sebesar Rp105.695.352,66 dengan rincian pada **Tabel 5.109**.

**Tabel 5.109 Rincian Mutasi Tambah aset Antar OPD dari OPD Lain**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset	OPD	Nilai	Mutasi Tambah dari	Uraian	Nilai Aset yg dimutasi
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Pendidikan	66.059.595,45	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	66.059.595,45
2	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	DKPP & KB	13.211.919,09	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	13.211.919,09
3	Tanah Lapangan Terbang Printis	Dinas Perhubungan	6.605.959,53	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	6.605.959,53
4	Tanah Bangunan Negara Golongan III	RSUD	6.605.959,53	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	6.605.959,53
5	Tanah Bangunan Sidang/ Pertemuan	Dinas Pertanian	6.605.959,53	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	6.605.959,53





No.	Jenis Aset	OPD	Nilai	Mutasi Tambah dari	Uraian	Nilai Aset yg dimutasi
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Kec. Bahau Hulu	6.605.959,53	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	6.605.959,53
Jumlah			105.695.352,66	Jumlah		105.695.352,66

2. Mutasi tambah Reklas dari belanja barang dan jasa sebesar Rp290.608.220,00 dengan rincian tersaji pada **Tabel 5.110**.

**Tabel 5.110 Rincian Mutasi Tambah Reklas dari Belanja Barang dan Jasa**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset	OPD	Nilai	Mutasi Tambah dari	Uraian	Nilai Aset yg dimutasi
1	Tanah Persil	DPUPRPERKIM	105.695.352,72	Dari Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Barang Dan Jasa Pembuatan Sertifikat Tanah Di Reklas Ke Belanja Modal Tanah Dan Menambah Nilai Aset Tetap Tanah	105.695.352,72
2	Lapangan	DPUPRPERKIM	184.966.867,28	Dari Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Barang Dan Jasa Pembuatan Sertifikat Tanah Di Reklas Ke Belanja Modal Tanah Dan Menambah Nilai Aset Tetap Tanah	184.966.867,28
Jumlah			290.662.220,00	Jumlah		290.662.220,00

Mutasi kurang dari tabel 5.108 Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi kurang aset antar OPD ke OPD lain sebesar Rp105.695.352,66 dengan rincian pada **Tabel 5.111**.

**Tabel 5.111 Rincian Mutasi Kurang aset Antar OPD ke OPD Lain**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset	OPD	Nilai	Mutasi Kurang ke	Uraian	Nilai Aset yg dimutasi
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	DPUPRPERKIM	66.059.595,45	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	66.059.595,45





No.	Jenis Aset	OPD	Nilai	Mutasi Kurang ke	Uraian	Nilai Aset yg dimutasi
2	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	DPUPRPERKIM	13.211.919,09	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	13.211.919,09
3	Tanah Lapangan Terbang Printis	DPUPRPERKIM	6.605.959,53	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	6.605.959,53
4	Tanah Bangunan Negara Golongan III	DPUPRPERKIM	6.605.959,53	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	6.605.959,53
5	Tanah Bangunan Sidang/ Pertemuan	DPUPRPERKIM	6.605.959,53	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	6.605.959,53
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	DPUPRPERKIM	6.605.959,53	DPUPRPERKIM	Penambahan Nilai Tanah Dari Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Tanah	6.605.959,53
<b>Jumlah</b>			<b>105.695.352,66</b>	<b>Jumlah</b>		<b>105.695.352,66</b>

2. Mutasi kurang hibah ke dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ke Parisada Hindu Dharma Indonesia PDHI sebesar Rp300.000.000,00.

**5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin**

**31 Desember 2021**  
**Rp522.752.957.974,44**

**31 Desember 2020**  
**Rp479.354.257.417,44**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar RpRp522.752.957.974,44 dan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sesuai dengan hasil *audited* sebesar Rp479.354.257.417,44.

Uraian penjelasan saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 pada **Tabel 5.112**.

**Tabel 5.112 Uraian Penjelasan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2021	<b>479.354.257.417,44</b>
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2020 (APBD, BOS, BLUD, DAN JKN)	57.240.682.792,00
	2) Mutasi aset antar OPD dari OPD lain	9.919.269.875,00
	3) Reklasifikasi dari Jenis Aset (KIB A/C/D/E/F)	1.012.974.333,00
	4) Hibah dari Pusat / Provinsi/ Pihak Ke tiga	6.853.332.275,00
	5) Dari Belanja Barang dan Jasa	29.519.000,00





No	Uraian	Jumlah (Rp)
	6) Utang Pengadaan Aset Tetap	37.815.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin</b>	<b>75.093.593.275,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Mutasi aset antar OPD Ke OPD lain	9.919.269.875,00
	2) Hibah ke Pihak Ke 3	27.500.000,00
	3) Reklas Ke Pakai Habis	348.578.000,00
	4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya	20.168.850.200,00
	5) Aset dibawah nilai kapitalisasi	592.613.643,00
	6) Reklas Ke Jenis Aset (KIB A/C/D/E/F)	638.081.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin</b>	<b>31.694.892.718,00</b>
	<b>Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2021</b>	<b>522.752.957.974,44</b>

Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi tambah sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2021 sebesar Rp57.240.682.792,00 merupakan Realisasi Belanja Modal OPD yang bersumber dari APBD, BLUD, BOS, dan JKN Tahun Anggaran 2021 dengan **Tabel 5.113** sebagai berikut:

**Tabel 5.113 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	13.406.028.875,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.221.534.791,00
3	RS PRATAMA LANGAP	860.760.245,00
4	RS PRATAMA LONG AMPUNG	2.703.034.386,00
5	PUSKESMAS SEHATI	24.234.400,00
6	PUSKESMAS PUJUNGAN	21.500.000,00
7	PUSKESMAS SUNGAI BOH	11.906.400,00
8	PUSKESMAS LONG SULE	40.170.000,00
9	PUSKESMAS LONG BERANG	29.050.000,00
10	PUSKESMAS METUT	8.820.000,00
11	UPTD GFK	23.495.600,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.925.446.300,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	113.930.910,00
14	DINAS KETENAGAKERJAAN	139.429.000,00
15	DINAS KETAHANAN PANGAN	27.500.000,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	544.296.780,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.118.500,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	863.520.000,00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	197.858.000,00
20	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	85.688.000,00
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	14.480.000,00
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	45.755.000,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	32.176.000,00
24	UPTD BALAI BENIH IKAN	405.951.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
25	DINAS PERTANIAN	177.452.500,00
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.435.732.500,00
27	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	23.700.000,00
28	BAGIAN HUKUM	6.980.000,00
29	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	25.680.000,00
30	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	18.084.000,00
31	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	15.650.000,00
32	BAGIAN UMUM	5.544.091.428,00
33	INSPEKTORAT	19.440.000,00
34	BAPPEDA DAN LITBANG	18.018.000,00
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.924.593.277,00
36	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	270.576.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>57.240.682.792,00</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan bersumber dari APBD dan dari Dana BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan Kinerja. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari APBD sebesar Rp54.902.417.219,00, dari BOS Reguler sebesar Rp1.281.047.000,00; BOS Afirmasi sebesar Rp775.817.000,00, dengan rincian belanja murni tahun 2021 sebesar Rp558.240.000,00 dan transaksi belanja yang dilakukan dibawah Tahun 2021 sebesar Rp217.577.000,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp167.757.075,00 dengan rincian belanja murni Tahun 2021 sebesar Rp98.817.075,00 dan transaksi belanja yang dilakukan dibawah Tahun 2021 sebesar Rp68.940.000,00. Adapun penyebab terjadinya keterlambatan laporan realisasi BOS sekolah dikarenakan kendala teknis sesuai surat pernyataan dan berita acara dari sekolah (terlampir). Belanja modal bersumber dari dana JKN sebesar Rp863.950.066,00 pada DKPPKB dan Belanja Modal dari dana BTT sebesar Rp1.187.798.507,00.

2. Mutasi tambah aset antar OPD dari OPD lain sebesar Rp9.919.269.875,00 dengan rincian pada **Tabel 5.114**.

**Tabel 5.114 Rincian Mutasi Tambah aset Antar OPD dari OPD Lain**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Tambah dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Kec. Sungai Tubu	141.110.000,00	Bagian Umum	Alat Rumah Tangga	32.300.000,00
				Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	94.110.000,00
				Komputer Unit	14.700.000,00
2	RSUD	8.349.467.829,00	DKPPKB	Belanja Modal Dari Dinkes	8.349.467.829,00
		203.796.839,00	DKPPKB	Belanja Modal BLUD	203.796.839,00
		722.626.007,00	BPKD (BTT)	Alat Bantu	30.875.000,00
				Alat Pengolahan	25.330.207,00
				Alat Rumah Tangga	47.135.000,00
				Alat Kedokteran Umum	510.085.800,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No.	OPD	Nilai	Mutasi Tambah dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
				Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	109.200.000,00
3	Bagian Umum	465.172.500,00	BPKD (BTT)	Alat Bantu	42.800.000,00
				Alat Kantor	228.882.500,00
				Alat Rumah Tangga	34.240.000,00
				Peralatan Pemancar	15.250.000,00
				Alat Kedokteran	64.300.000,00
				Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	72.800.000,00
				Peralatan Komputer	6.900.000,00
4	Kec. Kayan Hilir	37.096.700,00	Kec. Perwakilan Long Sule	Alat Angkutan Apung Bermotor	23.799.700,00
				Alat Bengkel Tak Bermesin	1.000.000,00
				Alat Kantor	2.357.000,00
				Komputer Unit	9.940.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.919.269.875,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>9.919.269.875,00</b>

3. Reklasifikasi dari Jenis Aset (KIB A/C/D/E/F) sebesar Rp1.012.974.333,00 dengan rincian pada **Tabel 5.115**.

**Tabel 5.115 Rincian Reklasifikasi dari Jenis Aset (KIB A/C/D/E/F) Peralatan dan Mesin Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Tambah dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DKPPKB	3.600.000,00	JIJ	Peralatan Komputer	3.600.000,00
2	RSUD	276.100.000,00	Gedung dan Bangunan	Alat Rumah Tangga	39.560.000,00
				Alat Kantor	4.450.000,00
				Alat Kedokteran Umum	232.090.000,00
		270.000.000,00	ATB	Alat Kantor	190.000.000,00
				Komputer Unit	80.000.000,00
3	DPUPRPERKIM	324.555.333,00	Gedung dan Bangunan, dan JJI	Rambu-Rambu Lintas Darat	324.555.333,00
4	DINAS PERTANIAN	13.720.000,00	Aset Tetap Lainnya	Alat Rumah Tangga	13.720.000,00
5	DISPRINDAG	112.999.000,00	JIJ	Alt Pertanian	112.999.000,00
6	Bagian Umum	12.000.000,00	Gedung Dan Bangunan	Alat Rumah Tangga	12.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.012.974.333,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>1.012.974.333,00</b>

4. Hibah dari Provinsi/Pusat/Pihak Ketiga sebesar Rp6.853.332.275,00 dengan rincian pada **Tabel 5.116**.

**Tabel 5.116 Rincian Hibah dari Provinsi/Pusat/Pihak Ketiga ke Peralatan dan Mesin Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Tambah dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Pendidikan	1.413.280.000,00	KEMETERIAN	TIK	1.413.280.000,00
2	DKPPKB	112.848.298,00	KEMENTERIAN KESEHATAN	Kulkas Vaksin	112.848.298,00



No.	OPD	Nilai	Mutasi Tambah dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
3	RSUD	5.145.417.977,00	BNPB	Alkes PCR Dan Ventilator	850.029.806,00
			DINKES KALTARA	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.287.716.275,00
			Kementerian	Generator Oksigen	2.585.465.896,00
			PT. Mitrabara Adiperdana	Alat Kesehatan Lainnya	341.000.000,00
			PT. Sumber Rejeki	Alat Rumah Tangga Dan Personal Komputer	81.206.000,00
4	DISDUKCAPIL	164.147.500,00	KEMENTERIAN	Mesin Pembuat ID Card	164.147.500,00
5	DPMPTSPTK	17.638.500,00	KEMENTERIAN	Personal Komputer	17.638.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.853.332.275,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>6.853.332.275,00</b>

5. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp 29.519.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.117 Rincian Reklasifikasi Dari Belanja Barang Dan Jasa ke Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Reklas dari Belanja	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Pendidikan	3.180.000,00	Barang dan Jasa	Kipas Angin 6 Unit	3.180.000,00
2	DKPPKB	2.189.000,00	Barang dan Jasa	Stavol	2.189.000,00
3	Dinas Perhubungan	24.150.000,00	Barang dan Jasa	Baterai Dan Kipas Angin	24.150.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.519.000,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>29.519.000,00</b>

6. Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp37.815.000,00 dengan rincian pada **Tabel 5.118**.

**Tabel 5.118 Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap Jasa Peralatan dan Mesin Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Tambah dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	RSUD	37.815.000,00	Utang	Alat Rumah Tangga Lainnya	11.239.000,00
				Alat Pendingin	8.231.000,00
				Alat Pembersih	2.990.000,00
				Meubelair	15.355.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.815.000,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>37.815.000,00</b>

Dari Tabel 5.109 diatas maka dapat dijelaskan mutasi kurang sebagai berikut:

1. Mutasi kurang aset antar OPD Ke OPD lain sebesar Rp9.919.269.875,00, dengan rincian pada **Tabel 5.119**.





**Tabel 5.119 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Antar OPD Ke OPD Lain Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DKPPKB	8.553.264.668,00	RSUD	Belanja Modal Dinkes Dan Blud	8.553.264.668,00
2	Kec. Perwakilan Long Sule	37.096.700,00	Kec. Kayan Hilir	Alat Angkutan Apung Bermotor	23.799.700,00
				Alat Bengkel Tak Bermesin	1.000.000,00
				Alat Kantor	2.357.000,00
				Komputer Unit	9.940.000,00
3	Bagian Umum	141.110.000,00	Kec. Sungai Tubu	Alat Rumah Tangga	32.300.000,00
				Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	94.110.000,00
				Komputer Unit	14.700.000,00
4	BPKD	465.172.500,00	Bag. UMUM (BTT)	Alat Bantu	42.800.000,00
				Alat Kantor	228.882.500,00
				Alat Rumah Tangga	34.240.000,00
				Peralatan Pemancar	15.250.000,00
				Alat Kedokteran	64.300.000,00
				Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	72.800.000,00
				Peralatan Komputer	6.900.000,00
		722.626.007,00	BTT RSUD	Alat Bantu	30.875.000,00
				Alat Pengolahan	25.330.207,00
				Alat Rumah Tangga	47.135.000,00
				Alat Kedokteran Umum	510.085.800,00
				Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	109.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.919.269.875,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>9.919.269.875,00</b>

2. Aset tetap peralatan dan mesin yang dihibahkan sebesar Rp27.500.000,00 rincian pada **Tabel 5.120**.

**Tabel 5.120 Rincian Peralatan dan Mesin yang Hibah ke Pihak Ketiga Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Hibah Ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Ketahanan Pangan	27.500.000,00	Kelompok Tani	Alat Pertanian	27.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.500.000,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>27.500.000,00</b>

3. Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke barang habis pakai persediaan sebesar Rp348.578.000,00, rincian pada **Tabel 5.121**.





**Tabel 5.121 Rincian Peralatan dan Mesin Reklas ke Barang Habis Pakai Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Pendidikan	63.252.000,00	Barang & Jasa	Komputer Jaringan	63.252.000,00
2	DKPPKB	256.500.000,00	Barang & Jasa	Belanja BKB KIT Dan KIT Siap Nikah	256.500.000,00
3	Bagian Umum	28.826.000,00	Barang & Jasa	Perengkapan Sound Dan Alat Listrik	28.826.000,00
Jumlah		348.578.000,00		Jumlah	348.578.000,00

4. Reklasifikasi ke Aset Lainnya rusak berat sebesar Rp20.168.850.200,00, rincian pada **Tabel 5.122**.

**Tabel 5.122 Rincian Reklasifikasi Peralatan Dan Mesin Ke Aset Lainnya Rusak Berat Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	BAPPEDA DAN LITBANG	1.475.251.500,00	Aset Lainnya	Alat Ukur	203.476.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	954.750.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	39.300.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.970.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	60.175.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	141.540.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	44.040.000,00
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	324.546.300,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	224.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	3.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	4.850.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	1.250.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	50.350.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	32.096.300,00
3	Dinas Perhubungan	163.198.600,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	16.300.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	13.200.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.660.000,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	47.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	51.457.800,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	13.580.800,00
4	DLHD	5.184.906.875,00	Aset Lainnya	Alat Besar Darat	1.367.673.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
			Aset Lainnya	Alat Bantu	49.200.000,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.360.276.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bengkel Tak Bermesin	49.200.000,00
			Aset Lainnya	Alat Ukur	115.700.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	57.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	462.678.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	123.157.500,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	32.440.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	69.780.350,00
			Aset Lainnya	Alat Peraga Praktek Sekolah	198.798.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	9.125.000,00
			Aset Lainnya	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	5.230.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	843.812.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	7.963.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	321.022.920,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	106.351.105,00
5	BPPD	56.718.500,00	Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.718.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	16.000.000,00
6	DISDUKCAPIL	68.186.000,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	31.100.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	22.400.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	14.686.000,00
7	DP3AS	131.153.000,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	30.520.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	11.185.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	70.120.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	19.328.000,00
8	SATPOL PP	96.470.000,00	Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	13.800.000,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	27.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	34.000.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	4.170.000,00
			Aset Lainnya	Alat Sar	10.000.000,00
9	Bagian Tapem	91.245.000,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	4.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	4.900.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	62.000.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	19.845.000,00
10	Dinas Pertanian	276.799.500,00	Aset Lainnya	Alat Besar Darat	36.948.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
			Aset Lainnya	Alat Bantu	1.585.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bengkel Bermesin	2.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.140.000,00
			Aset Lainnya	Alat Pengolahan	27.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	3.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	26.160.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.800.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	34.670.000,00
			Aset Lainnya	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	1.548.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	95.377.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	35.571.000,00
11	Bagian Ekonomi	14.800.000,00	Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	14.800.000,00
12	Bagian Administrasi Pembangunan	512.694.000,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	81.112.500,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	45.150.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	22.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	244.191.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	120.240.000,00
13	Bagian Kesejahteraan Rakyat	20.180.000,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	2.180.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	2.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	1.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	14.500.000,00
14	Bagian Hukum	80.945.000,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	26.195.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	12.500.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.750.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	17.500.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	23.000.000,00
15	BKPP	367.037.500,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	16.857.500,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	141.900.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	119.480.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.250.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	64.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	10.000.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	12.550.000,00
16	Bagian Umum	6.962.222.600,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Apung Bermotor	1.877.065.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	4.853.125.600,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	78.152.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	153.880.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
17	Sekretariat Dprd	756.278.400,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	460.475.000,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	178.750.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	117.053.400,00
18	Kecamatan Malinau Barat	258.826.500,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	57.600.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	9.864.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	21.167.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.197.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	86.498.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	81.500.000,00
19	Kecamatan Mentarang Hulu	788.561.300,00	Aset Lainnya	Alat Bantu	50.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	382.092.000,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Apung Bermotor	96.448.800,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	105.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	2.357.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	45.156.700,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	21.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	59.396.800,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	25.110.000,00
20	BPKD	2.221.696.125,00	Aset Lainnya	Alat Pengolahan	7.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	87.187.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	44.860.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.458.500,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	85.800.000,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	95.800.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	2.091.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	895.569.780,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	992.929.845,00
21	Dinas Perikanan	120.970.000,00	Aset Lainnya	Alat Bantu	10.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bengkel Bermesin	20.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Ukur	2.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	4.350.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	1.820.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	63.800.000,00
			Aset Lainnya	Alat Peraga Praktek Sekolah	4.000.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
			Aset Lainnya	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	4.200.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	9.300.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	1.500.000,00
22	Bagian Pengadaan Barang Jasa	67.280.000,00	Aset Lainnya	Komputer Unit	67.280.000,00
23	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	128.883.500,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	14.600.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	16.725.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	2.876.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.525.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	65.157.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	11.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.168.850.200,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>20.168.850.200,00</b>

5. Aset dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp592.613.643,00, rincian pada **Tabel 5.123.**

**Tabel 5.123 Rincian Peralatan Dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Pendidikan	52.404.800,00		Peralatan Personal Komputer Lainnya	52.404.800,00
2	DKPPKB	291.972.143,00		Alat Kesehatan Lainnya	291.972.143,00
3	Dinas Perhubungan	8.750.000,00		Kipas Angin Dan Charger	8.750.000,00
4	DLHD	2.805.000,00		Printer	2.805.000,00
5	RSUD	14.733.000,00		Alat Kesehatan Dan Meubelair	14.733.000,00
6	DPUPRPERKIM	18.480.000,00		Power Bank Dan Alat Keselamatan Kerja	18.480.000,00
7	SATPOL PP	24.300.000,00		Alat Pemadam Kebakaran	24.300.000,00
8	Bagian Umum	179.168.700,00		Alat Dapur Lainnya	179.168.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>592.613.643,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>592.613.643,00</b>

6. Reklas Ke Jenis Aset (KIB A/C/D/E/F) sebesar Rp638.081.000,00 dengan rincian **Tabel 5.124.**

**Tabel 5.124 Rincian Peralatan Dan Mesin Reklas Ke Jenis Aset (KIB A/C/D/E/F) Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DKPPKB	38.200.000,00	JJI	Jaringan Telpon	38.200.000,00
2	DPUPRPERKIM	193.930.000,00	JJI	Instalasi Pembangkit Listrik	193.930.000,00
3	DINAS PERIKANAN	405.951.000,00	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.040.000,00





No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
			JJI	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	351.911.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>638.081.000,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>638.081.000,00</b>

**5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan**

**31 Desember 2021**  
**Rp1.801.964.451.298,08**

**31 Desember 2020**  
**Rp1.764.999.403.504,08**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.801.964.451.298,08 dan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.764.999.403.504,08. Uraian penjelasan saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 pada **Tabel 5.125**.

**Tabel 5.125 Uraian Penjelasan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2021	1.764.999.403.504,08
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2021	14.725.005.950,00
	2) Mutasi aset antar OPD dari OPD lain	113.507.372.830,00
	3) Reklasifikasi Dari Aset	12.967.379.250,00
	4) Hibah dari Pusat / Provinsi	10.387.977.144,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan</b>	<b>151.587.735.174,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Mutasi aset antar OPD Ke OPD lain	113.507.372.830,00
	2) Reklasifikasi ke Aset	454.337.000,00
	3) Dihilangkan kepihak 3/Masyarakat	40.000.000,00
	4) Utang Terbayar	366.952.550,00
	5) Pindah Ke KDP	99.825.000,00
	5) Reklas Aset Lainnya (RB)	154.200.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan</b>	<b>114.622.687.380,00</b>
	<b>Saldo Akhir Gedung dan Bangunan Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2021</b>	<b>1.801.964.451.298,08</b>

Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi tambah sebagai berikut:

1. Belanja modal di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp14.725.005.950,00 dapat dilihat pada **Tabel 5.126**.

**Tabel 5.126 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	5.293.087.250,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.107.752.400,00
3	RS PRATAMA LANGAP	75.491.000,00
4	RS PRATAMA LONG AMPUNG	20.000.000,00
5	PUSKESMAS LONG SULE	2.201.715.300,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	776.116.000,00





No	Uraian	Jumlah
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	40.000.000,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	1.408.091.000,00
9	DINAS PERTANIAN	190.375.000,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.027.758.000,00
11	BAGIAN UMUM	66.999.000,00
12	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.517.621.000,00
Jumlah		14.725.005.950,00

2. Mutasi tambah aset antar OPD dari OPD lain sebesar Rp113.507.372.830,00 dengan pada **Tabel 5.127**.

**Tabel 5.127 Mutasi tambah aset antar OPD dari OPD lain Pada Gedung dan Bangunan Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	RSUD	552.610.000,00	Belanja Modal Dinkes	Gedung Kesehatan (Gedung PCR)	552.610.000,00
2	Bagian Umum	107.540.368.930,00	DPUPRPERKIM	Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.540.368.930,00
3	Kec. Perwakilan Long Sule	5.414.393.900,00	KEC. KAYAN HILIR	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.183.404.000,00
				Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.230.989.900,00
Jumlah		113.507.372.830,00		Jumlah	113.507.372.830,00

3. Reklasifikasi dari aset sebesar Rp12.967.379.250,00, dengan rincian pada **Tabel 5.128**.

**Tabel 5.128 Mutasi tambah Reklasifikasi Dari Aset ke Gedung Dan Bangunan Tahun 2021**

No.	OPD	Nilai	Mutasi dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DKPPKB	12.843.339.250,00	KDP	Bangunan Kesehatan	12.843.339.250,00
2	DPUPRPERKIM	70.000.000,00	DKP	Bangunan Olahraga	70.000.000,00
3	Dinas Perikanan	54.040.000,00	Peralatan Dan Mesin	Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.040.000,00
Jumlah		12.967.379.250,00		Jumlah	12.967.379.250,00

4. Mutasi tambah hibah pusat/provinsi sebesar Rp10.387.977.144,00 pada Dinas Pendidikan Malinau berupa bangunan tempat pendidikan (ruang kelas belajar) di SDN 002 Malinau Selatan Hulu, SDN 006 Malinau Barat dan SDN 004 Sungai Boh.

Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi kurang sebagai berikut:

1. Mutasi kurang aset antar OPD ke OPD lain sebesar Rp113.507.372.830,00 dengan rincian pada **Tabel 5.129**.





**Tabel 5.129 Mutasi aset Gedung Dan Bangunan antar OPD ke OPD lain Gedung dan Bangunan Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	RSUD	552.610.000,00	Belanja Modal Dinkes	Bangunan Kesehatan	552.610.000,00
2	Bagian Umum	107.540.368.930,00	DPUPRPERKIM	Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.540.368.930,00
3	Kec. Perwakilan Long Sule	5.414.393.900,00	KEC. KAYAN HILIR	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.183.404.000,00
				Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.230.989.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>113.507.372.830,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>113.507.372.830,00</b>

2. Reklasifikasi ke Aset sebesar Rp454.337.000,00, dengan rincian pada **Tabel 5.130**.

**Tabel 5.130 Mutasi Kurang Aset Gedung Dan Bangunan Reklasifikasi ke Aset Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Pendidikan	134.376.000,00	KDP	KDP Gedung Dan Bangunan	134.376.000,00
2	RSUD	276.100.000,00	Peralatan Dan Mesin	Alat Rumah Tangga	39.560.000,00
				Alat Kantor	4.450.000,00
				Alat Kedokteran Umum	232.090.000,00
3	DPUPRPERKIM	31.861.000,00	Peralatan Dan Mesin	Rambu-Rambu Lintas Darat	31.861.000,00
4	Bagian Umum	12.000.000,00		Alat Rumah Tangga	12.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>454.337.000,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>454.337.000,00</b>

3. Mutasi kurang gedung dan bangunan di hibahkan ke pihak ketiga sebesar Rp40.000.000,00, dengan rincian pada **Tabel 5.131**.

**Tabel 5.131 Mutasi Kurang Aset Gedung Dan Bangunan di Hibahkan Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Ketahanan Pangan	40.000.000,00	Kelompok Tani/Masyarakat	Alat Pertanian	40.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>40.000.000,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>40.000.000,00</b>

4. Mutasi kurang gedung dan bangunan dikarenakan Utang pengadaan aset tetap telah diselesaikan, dimana nilai aset telah dicatat pada saat munculnya Utang. Pada saat penyelesaian utang melalui penerbitan SP2D, nilai aset dikurangi sebesar penyelesaian utang. Penyelesaian Utang aset Gedung dan bangunan sebesar Rp366.952.550,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berupa bangunan Kesehatan.





5. Mutasi kurang reklas gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pembangunan sebesar Rp99.825.000,00, dengan rincian **Tabel 5.132**.

**Tabel 5.132 Mutasi Kurang Aset Gedung Dan Bangunan Reklasifikasi ke KDP Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DPUPRPERKIM	99.825.000,00	KDP	KDP Gedung Dan Bangunan	99.825.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>99.825.000,00</b>	<b>Jumlah</b>		<b>99.825.000,00</b>

6. Mutasi kurang reklas gedung dan bangunan ke aset lainnya (aset rusak berat) sebesar Rp154.200.000,00, dengan rincian pada **Tabel 5.133**.

**Tabel 5.133 Mutasi Kurang Aset Gedung Dan Bangunan Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat) Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Pertanian	144.200.000,00	Aset Lainnya (RB)	Bangunan Gedung Tempat Kerja	144.200.000,00
2	Kecamatan Mentarang Hulu	10.000.000,00	Aset Lainnya (RB)	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>154.200.000,00</b>	<b>Jumlah</b>		<b>154.200.000,00</b>

**5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

**31 Desember 2021**  
Rp2.783.868.845.659,60

**31 Desember 2020**  
Rp2.750.635.754.978,60

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.783.868.845.659,60 dan Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.750.635.754.978,60.

Uraian penjelasan saldo akhir Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2021 pada **Tabel 5.134**.

**Tabel 5.134 Uraian Penjelasan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2021	2.750.635.754.978,60
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2021	30.704.495.068,00
	2) Mutasi aset antar OPD dari OPD lain	26.750.000,00
	3) Reklasifikasi Dari Aset	1.153.943.100,00
	4) Hibah dari Pusat / Provinsi	5.464.616.446,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>		<b>37.349.804.614,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Mutasi aset antar OPD Ke OPD lain	26.750.000,00
	2) Reklasifikasi Ke Aset	409.293.333,00
	3) Belanja Pemeliharaan	356.875.000,00





No	Uraian	Jumlah
	4) Penyelesaian Utang	2.363.730.000,00
	5) Pindah Ke KDP	960.065.600,00
Jumlah Mutasi Kurang Jalan, Jaringan, dan Irigasi		4.116.713.933,00
Saldo Akhir Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2021		2.783.868.845.659,60

Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi tambah sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal tahun 2021 sebesar Rp30.704.495.068,00 dengan rincian pada **Tabel 5.135**.

**Tabel 5.135 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.600.000,00
2	RS PRATAMA LONG AMPUNG	119.250.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.970.487.833,00
4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	141.283.235,00
5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	112.999.000,00
6	BPKD	8.750.000,00
7	BAGIAN UMUM	348.125.000,00
Jumlah		30.704.495.068,00

Realisasi belanja modal bersumber dari APBD sebesar Rp30.704.495.068,00, dimana terdapat belanja modal BTT senilai Rp8.750.000,00 pada BPKD.

1. Mutasi tambah aset Jalan, Jaringan dan Irigasi antar OPD dari OPD lain sebesar Rp26.750.000,00 dengan rincian pada **Tabel 5.136**.

**Tabel 5.136 Rincian Mutasi tambah aset jalan, jaringan dan irigasi antar OPD dari OPD lain Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	RSUD	8.750.000,00	BPKD BTT	Jaringan Listrik	8.750.000,00
2	Kecamatan Kayan Hilir	18.000.000,00	Kec. Perwakilan Long Sule	Bangunan Air Irigasi	18.000.000,00
Jumlah		26.750.000,00		Jumlah	26.750.000,00





2. Reklasifikasi dari Aset sebesar Rp1.153.943.100,00 dengan rincian:

**Tabel 5.137 Rincian Mutasi tambah aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
Reklasifikasi dari Aset Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DKPPKB	38.200.000,00	Peralatan Dan Mesin	Jaringan Telpon	38.200.000,00
2	DPUPRPERKIM	763.832.100,00	Peralatan Dan Mesin	Instalasi Pembangkit Listrik	193.930.000,00
			KDP	KDPJalan	569.902.100,00
3	Dinas Perikanan	351.911.000,00	Peralatan Dan Mesin	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	351.911.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.153.943.100,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>1.153.943.100,00</b>

3. Mutasi Tambah aset jalan, jaringan dan irigasi berupa Hibah sebesar Rp5.464.616.446,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.138 Rincian Mutasi tambah aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
berupa Hibah Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DPUPRPERKIM	5.464.616.446,00	Kementerian PUPR	Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.464.616.446,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.464.616.446,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>5.464.616.446,00</b>

Dari uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi kurang sebagai berikut:

1. Mutasi kurang aset berupa aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp26.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.139 Rincian Mutasi Kurang Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi  
Antar OPD Ke OPD lain Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Kec. Perwakilan Long Sule	18.000.000,00	Kec. Kayan Hilir	Bangunan Air Irigasi	18.000.000,00
2	BPKD	8.750.000,00	RSUD BTT	Jaringan Listrik	8.750.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.750.000,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>26.750.000,00</b>

2. Mutasi kurang aset tetap jalan, jaringan dan irigasi reklasifikasi ke aset sebesar Rp409.293.333,00 dengan rincian pada **Tabel 5.140**.

**Tabel 5.140 Rincian Mutasi Kurang Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi  
Reklasifikasi Ke Aset Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DKPPKB	3.600.000,00	Peralatan Dan Mesin	Peralatan Komputer	3.600.000,00
2	DPUPRPERKIM	292.694.333,00	Peralatan Dan Mesin	Rambu-Rambu Lintas Darat	292.694.333,00





No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
3	DISPRINDAG	112.999.000,00	Peralatan Dan Mesin	Alat Pertanian	112.999.000,00
Jumlah		409.293.333,00	Jumlah		409.293.333,00

3. Mutasi kurang aset berupa aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp356.875.000,00 dengan rincian pada **Tabel 5.141**.

**Tabel 5.141 Rincian Mutasi Kurang Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Ke Beban Pemeliharaan Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	RSUD	8.750.000,00	Beban Pemeliharaan	Jaringan Listrik	8.750.000,00
2	Bagian Umum	348.125.000,00	Beban Pemeliharaan	Jaringan Listrik	348.125.000,00
Jumlah		356.875.000,00	Jumlah		356.875.000,00

4. Mutasi kurang aset berupa aset tetap jalan, jaringan dan irigasi karena penyelesaian utang sebesar Rp2.363.730.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.142 Rincian Mutasi Kurang Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi karena penyelesaian utang Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DPUPRPERKIM	2.363.730.000,00		Jalan	2.363.730.000,00
Jumlah		2.363.730.000,00	Jumlah		2.363.730.000,00

5. Mutasi kurang aset berupa aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi reklas ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp960.065.600,00 dengan rincian pada **Tabel 5.143**.

**Tabel 5.143 Rincian Mutasi Kurang Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Reklas ke KDP Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DPUPRPERKIM	960.065.600,00	KDP	Perencanaan Jalan Dan Irigasi	960.065.600,00
Jumlah		960.065.600,00	Jumlah		960.065.600,00

**5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya**

**31 Desember 2021**  
Rp21.191.335.475,00

**31 Desember 2020**  
Rp21.272.392.975,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.191.335.475,00 dan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.272.392.975,00.



Uraian penjelasan saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 pada **Tabel 5.144**.

**Tabel 5.144 Uraian Penjelasan Aset Tetap Lainnya**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2021	21.272.392.975,00
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2021	13.720.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya</b>		<b>13.720.000,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi ke Aset (RB)	81.057.500,00
	1) Reklas Ke Jenis Aset	13.720.000,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya</b>		<b>94.777.500,00</b>
<b>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021</b>		<b>21.191.335.475,00</b>

Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi tambah dan mutasi kurang sebagai berikut:

1. Mutasi tambah realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp13.720.000,00 pada Dinas Pertanian;

Pada Laporan Realisasi anggaran Tahun 2021, belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.034.439.000,00 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 pada belanja modal aset lainnya digabung pada belanja modal aset tetap lainnya. Sehingga rincian belanja modal aset tetap lainnya terdiri dari belanja aset tetap lainnya sebesar Rp13.720.000,00 dan aset lainnya sebesar Rp1.020.719.000,00.

2. Mutasi kurang reklasifikasi ke aset lainnya (aset rusak berat) sebesar Rp81.057.500,00, dengan rincian **Tabel 5.145**.

**Tabel 5.145 Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya Reklas Aset Lainnya (Aset Rusak Berat) Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DP3AS	10.000.000,00	Aset Lainnya	Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku)	10.000.000,00
2	Bagian Hukum	71.057.500,00	Aset Lainnya	Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku)	71.057.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>81.057.500,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>81.057.500,00</b>

3. Mutasi kurang reklas ke jenis aset sebesar Rp13.720.000,00, dengan rincian pada **Tabel 5.146**.





**Tabel 5.146 Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya Reklas ke Jenis Aset Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Pertanian	13.720.000,00	Peralatan Dan Mesin	Alat Rumah Tangga	13.720.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.720.000,00</b>	<b>Jumlah</b>		<b>13.720.000,00</b>

**5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

31 Desember 2021  
Rp13.546.260.383,00

31 Desember 2020  
Rp38.344.681.833,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.546.260.383,00 dan saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.344.681.833,00. Uraian penjelasan saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 pada **Tabel 5.147**.

**Tabel 5.147 Uraian Penjelasan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2021	38.344.681.833,00
2	Mutasi Tambah	
	1) Reklasifikasi Dari Aset	1.194.266.600,00
	2) Reklasifikasi Dari Belanja Barang dan Jasa	1.854.718.000,00
	3) Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>		<b>3.048.984.600,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi Ke Aset	13.483.241.350,00
	2) Penghapusan Aset Tetap	14.364.164.700,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>		<b>27.847.406.050,00</b>
<b>Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021</b>		<b>13.546.260.383,00</b>

Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi tambah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari Aset sebesar Rp1.194.266.600,00 dengan rincian pada **Tabel 5.148**.

**Tabel 5.148 Rincian Mutasi Tambah KDP Reklasifikasi dari Aset Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Pendidikan	134.376.000,00	Gedung Dan Bangunan	KDP Gedung Dan Bangunan	134.376.000,00
2	DPUPRPERKIM	1.059.890.600,00	Gedung Dan Bangunan	KDP Gedung Dan Bangunan	99.825.000,00
			JII	Perencanaan Jalan Dan Irigasi	960.065.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.194.266.600,00</b>	<b>Jumlah</b>		<b>1.194.266.600,00</b>

2. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.854.718.000,00 dengan rincian pada **Tabel 5.149**.





**Tabel 5.149 Rincian Mutasi Tambah KDP Reklasifikasi Dari Belanja  
Barang dan Jasa Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Dari	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DPUPRPERKIM	1.854.718.000,00	Barjas	Pembangunan Jalanm Kabupaten	1.854.718.000,00
Jumlah		1.854.718.000,00	Jumlah		1.854.718.000,00

Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi kurang sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke Aset sebesar Rp13.483.241.350,00 dengan rincian pada **Tabel 5.150**.

**Tabel 5.150 Rincian Mutasi Kurang KDP Reklasifikasi ke Aset Tahun  
2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	DKPPKB	12.843.339.250,00	Gedung Dan Bangunan	Bangunan Kesehatan	12.843.339.250,00
2	DPUPRPERKIM	639.902.100,00	JIJ	Jalan Kabupaten	569.902.100,00
			Gedung Dan Bangunan	Bangunan Olahraga	70.000.000,00
Jumlah		13.483.241.350,00	Jumlah		13.483.241.350,00

2. Mutasi kurang karena penghapusan aset tetap pada KDP berdasarkan keputusan Bupati Malinau Nomor : 900/K.295.1/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021, yakni sebesar Rp14.364.164.700,00 dengan rincian pada **Tabel 5.151**.

**Tabel 5.151 Rincian Mutasi Kurang KDP Penghapusan Aset Tetap  
Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Dinas Pendidikan	1.505.840.800,00	Perencanaan Gedung Dan Bangunan Yang Tidak Dilanjutkan Pembangunannya	1.505.840.800,00
2	Dinas Perhubungan	266.090.000,00	Perencanaan JIJ Tidak Dilanjutkan Pembangunannya	266.090.000,00
3	DPUPRPERKIM	12.212.574.500,00	Perencanaan Gedung Dan Bangunan Yang Tidak Dilanjutkan Pembangunannya	4.008.822.100,00
			Perencanaan JIJ Tidak Dilanjutkan Pembangunannya	8.203.752.400,00
4	DISPRINDAG	379.659.400,00	Perencanaan Gedung Dan Bangunan Yang Tidak Dilanjutkan Pembangunannya	379.659.400,00
Jumlah		14.364.164.700,00	Jumlah	14.364.164.700,00





**5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
(Rp2.343.293.214.221,57) (Rp2.166.067.277.602,35)

Setelah Aset Tetap diperoleh, maka aset tetap tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau untuk kegiatan operasional. Dalam fase ini, perlakuan akuntansi atas aset tetap ada beberapa perlakuan, salah satu perlakuan adalah penyusutan aset tetap, penyusutan aktiva tetap merupakan konsekuensi dari penggunaan aset tetap dimana aset tetap akan mengalami penurunan fungsi. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp2.343.293.214.221,57) dan (Rp2.166.067.277.602,35).

Pada tahun 2021 terdapat koreksi saldo awal, dikarenakan reklas aset tetap ke aset lainnya dan pembulatan angka dibelakang koma. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap dan aset tetap setelah akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada **Tabel 5.152**.

**Tabel 5.152 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021**

(dalam rupiah)

Nama Aset	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Koreksi Saldo Awal	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Mesin	378.493.198.170,06	(19.807.965.703,00)	32.992.781.888,42	391.678.014.355,48
Gedung Bangunan	326.326.569.222,00	(63.420.565,00)	35.488.517.229,00	361.751.665.886,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.461.247.510.210,29	(1,30)	128.616.023.771,10	1.589.863.533.980,09
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.166.067.277.602,35</b>	<b>(19.871.386.269,30)</b>	<b>197.097.322.888,52</b>	<b>2.343.293.214.221,57</b>

**Tabel 5.153 Rincian Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan Aset tetap TA 2021**

Uraian	Per 31 Desember 2021		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.406.116.262.880,67	-	1.406.116.262.880,67
Peralatan dan Mesin	522.752.957.974,44	391.678.014.355,48	131.074.943.618,96
Gedung dan Bangunan	1.801.964.451.298,08	361.751.665.886,00	1.440.212.785.412,08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.783.868.845.659,60	1.589.863.533.980,09	1.194.005.311.679,51
Aset Tetap Lainnya	21.191.335.475,00	-	21.191.335.475,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.546.260.383,00	-	13.546.260.383,00
	<b>6.549.440.113.670,79</b>	<b>2.343.293.214.221,57</b>	<b>4.206.146.899.449,22</b>

**5.3.1.4. Aset Lainnya** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
Rp101.890.730.986,75 Rp172.994.807.093,83

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2020 dapat disajikan pada **Tabel 5.154**.



**Tabel 5.154 Aset Lainnya Tahun 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	26.850.000,00	38.850.000,00
Aset Tidak Berwujud	10.926.098.261,00	10.202.278.261,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.818.942.954,05)	(5.845.284.352,97)
Aset Lain-lain	145.027.537.296,80	228.757.207.392,80
Akumulasi Penyusutan Lain-Lain	(47.270.811.617,00)	(60.158.244.207,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>101.890.730.986,75</b>	<b>172.994.807.093,83</b>

Dari data tabel di atas saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.890.730.986,75 dibandingkan dengan saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp172.994.807.093,83 mengalami penurunan sebesar Rp71.104.076.107,08 atau 41,10%. Uraian mengenai aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau dijelaskan sebagai berikut:

**5.3.1.4.1. Tagihan Jangka**

<b>Panjang/Tuntutan Kerugian Daerah</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>Rp26.850.000,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>Rp38.850.000,00</b>
---	--	--

Merupakan Tuntutan Ganti Rugi bendahara Pengeluaran Bagian Pertanahan berdasarkan SKTJM No. 06/SKTJM/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012. Tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.850.000,00 dan 31 Desember 2020 adalah Rp38.850.000,00.

**5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud**

	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>Rp10.926.098.261,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>Rp10.202.278.261,00</b>
--	--	--

Aset Tidak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp10.926.098.261,00 sebelum dilakukan amortisasi dan nilai Aset Tidak Berwujud setelah dikurangi dengan amortisasi yaitu sebesar Rp4.107.155.306,95, Aset Tidak Berwujud Tahun 2020 sebesar Rp10.202.278.261,00 yang akan menjadi saldo awal di Tahun 2021. Adapun uraian Aset Tidak Berwujud disajikan pada **Tabel 5.155**.

**Tabel 5.155 Uraian Penjelasan Aset Tidak Berwujud**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2021	10.423.378.261,00
2	Mutasi Tambah	
	1) Belanja Modal TA 2021	1.020.719.000,00
	2) Mutasi aset antar OPD dari OPD lain	270.000.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud</b>	<b>1.290.719.000,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Mutasi aset antar OPD ke OPD lain	270.000.000,00
	2) Reklasifikasi ke Aset	270.000.000,00
	3) Penghapusan Aset Tetap	221.100.000,00
	4) Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	26.899.000,00



No	Uraian	Jumlah
	Jumlah Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud	787.999.000,00
	Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021	10.926.098.261,00

Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi tambah dan kurang sebagai berikut:

1. Mutasi tambah aset tidak berwujud sebesar Rp1.020.719.000,00 berupa belanja modal Tahun Anggaran 2021 dengan rincian pada **Tabel 5.156**.

**Tabel 5.156 Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	270.000.000,00
2	RS PRATAMA LANGAP	190.520.000,00
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	184.800.000,00
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	146.000.000,00
5	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	55.000.000,00
6	INSPEKTORAT	8.199.000,00
7	BAPPEDA DAN LITBANG	18.700.000,00
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	147.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.020.719.000,00</b>

2. Mutasi tambah aset antar OPD dari OPD lain sebesar Rp270.000.000,00 dari DKPPKB ke RSUD;
3. Mutasi kurang aset antar OPD ke OPD lain sebesar Rp270.000.000,00 dari DKPPKB ke RSUD;
4. Mutasi kurang reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp270.000.000,00 pada RSUD berupa alat kantor sebesar Rp190.000.000,00 dan komputer unit sebesar Rp80.000.000,00;
5. Mutasi kurang penghapusan Aset Tak Berwujud pada Bagian Organisasi sebesar Rp221.100.000,00 berupa software; dan
6. Mutasi kurang Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi sebesar Rp26.899.000,00 pada Bappeda dan Litbang sebesar Rp18.700.000,00 dan Inspektorat sebesar Rp8.199.000,00 berupa software.

Berikut daftar Aset Tidak Berwujud tersaji pada **Tabel 5.157**.

**Tabel 5.157 Daftar Aset Tidak Berwujud**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	450.890.000,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	836.374.799,00
3	RS PRATAMA LANGAP	190.520.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.230.856.862,00





No	Uraian	Jumlah
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	375.740.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	578.060.000,00
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	374.186.977,00
8	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	43.590.000,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	40.000.000,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	146.000.000,00
11	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	55.000.000,00
12	BAGIAN ORGANISASI	30.000.000,00
13	BAGIAN UMUM	1.808.222.273,00
14	BAPPEDA DAN LITBANG	1.853.470.000,00
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.599.460.200,00
16	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	313.727.150,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.926.098.261,00</b>

**5.3.1.4.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
(Rp6.818.942.954,05)      (Rp5.845.284.352,97)

Merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu disetiap periode akuntansi. Pengurangan nilai Aset Tidak Berwujud ini dilakukan dengan cara mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun Aset Tidak Berwujud. Aset Tidak Berwujud *netto* sebesar Rp4.107.155.306,95 merupakan nilai per 31 Desember 2021 setelah dilakukan amortisasi sebesar Rp6.818.942.954,05 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi serta kajian pada OPD dan amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2020 sebesar Rp5.845.284.352,97. Rincian Aset Tidak Berwujud setelah amortisasi dapat disajikan pada **Tabel 5.158**.

**Tabel 5.158 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	(394.614.416,67)
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(245.074.725,61)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(1.056.485.473,22)
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(375.740.000,00)
5	DINAS PERHUBUNGAN	(469.998.500,00)
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(75.923.589,17)
7	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(9.444.500,00)
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(24.000.000,00)
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(2.433.333,33)
10	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	(5.041.666,67)
11	BAGIAN ORGANISASI	(3.500.000,00)





No	Uraian	Jumlah
12	BAGIAN UMUM	(1.572.480.189,62)
13	BAPPEDA DAN LITBANG	(1.229.670.250,00)
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(1.317.934.808,93)
15	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	(36.601.500,83)
	<b>Jumlah</b>	<b>(6.818.942.954,05)</b>

**5.3.1.4.4. Aset Lain-lain**

**31 Desember 2021**  
**Rp145.027.537.296,80**

**31 Desember 2020**  
**Rp228.757.207.392,80**

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp145.027.537.296,80 dan Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp228.757.207.392,80, merupakan saldo sebelum akumulasi penyusutan. Adapun rincian Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2021 pada **Tabel 5.159**.

**Tabel 5.159 Rincian Aset Lain-lain**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2021	228.757.207.392,80
2	Mutasi Tambah	
	1) Reklas dari aset (KIB A/B/C/D/E/F)	20.404.107.700,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Aset Lain-lain</b>	<b>20.404.107.700,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Penghapusan Aset Lainnya	104.133.777.796,00
	2) Aset lainnya dalam penelusuran	0,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Aset Lain-lain</b>	<b>104.133.777.796,00</b>
	<b>Saldo Akhir Aset Lain-lain per 31 Desember 2021</b>	<b>145.027.537.296,80</b>

Dari tabel uraian di atas maka dapat dijelaskan mutasi tambah dan kurang sebagai berikut:

1. Mutasi tambah Reklas dari aset (KIB A/B/C/D/E/F) sebesar Rp20.404.107.700,00 dengan rincian pada Tabel 5.160

**Tabel 5.160 Rincian Mutasi Tambah Reklas Dari Aset (KIB A/B/C/D/E/F)**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Nilai	Mutasi Ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
1	Bappeda Dan Litbang	1.475.251.500,00	Aset Lainnya	Alat Ukur	203.476.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	954.750.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	39.300.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.970.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	60.175.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	141.540.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	44.040.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No.	OPD	Nilai	Mutasi Ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	324.546.300,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	224.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	3.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	4.850.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	1.250.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	50.350.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	32.096.300,00
3	Dinas Perhubungan	163.198.600,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	16.300.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	13.200.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.660.000,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	47.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	51.457.800,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	13.580.800,00
4	DLHD	5.184.906.875,00	Aset Lainnya	Alat Besar Darat	1.367.673.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bantu	49.200.000,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.360.276.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bengkel Tak Bermesin	49.200.000,00
			Aset Lainnya	Alat Ukur	115.700.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	57.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	462.678.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	123.157.500,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	32.440.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	69.780.350,00
			Aset Lainnya	Alat Peraga Praktek Sekolah	198.798.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	9.125.000,00
			Aset Lainnya	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	5.230.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	843.812.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	7.963.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	321.022.920,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	106.351.105,00
5	BPPD	56.718.500,00	Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.718.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	16.000.000,00
6	DISDUKCAPIL	68.186.000,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	31.100.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	22.400.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	14.686.000,00
7	DP3AS	141.153.000,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	30.520.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No.	OPD	Nilai	Mutasi Ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	11.185.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	70.120.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	19.328.000,00
			Aset Lainnya	Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku)	10.000.000,00
8	SATPOL PP	96.470.000,00	Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	13.800.000,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	27.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	34.000.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	4.170.000,00
			Aset Lainnya	Alat Sar	10.000.000,00
9	Bagian Tapem	91.245.000,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	4.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	4.900.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	62.000.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	19.845.000,00
10	Dinas Pertanian	420.999.500,00	Aset Lainnya	Alat Besar Darat	36.948.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bantu	1.585.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bengkel Bermesin	2.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.140.000,00
			Aset Lainnya	Alat Pengolahan	27.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	3.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	26.160.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.800.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	34.670.000,00
			Aset Lainnya	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	1.548.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	95.377.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	35.571.000,00
			Aset Lainnya	Bangunan Gedung Tempat Kerja	144.200.000,00
11	Bagian Ekonomi	14.800.000,00	Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	14.800.000,00
12	Bagian Administrasi Pembangunan	512.694.000,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	81.112.500,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	45.150.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	22.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	244.191.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	120.240.000,00
13	Bagian Kesejahteraan Rakyat	20.180.000,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	2.180.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	2.500.000,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	1.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	14.500.000,00
14	Bagian Hukum	152.002.500,00	Aset Lainnya	Alat Kantor	26.195.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No.	OPD	Nilai	Mutasi Ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	12.500.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.750.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	17.500.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	23.000.000,00
			Aset Lainnya	Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku)	71.057.500,00
15	BKPP	367.037.500,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	16.857.500,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	141.900.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	119.480.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.250.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	64.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	10.000.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	12.550.000,00
16	Bagian Umum	6.962.222.600,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Apung Bermotor	1.877.065.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	4.853.125.600,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	78.152.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	153.880.000,00
17	Sekretariat Dprd	756.278.400,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	460.475.000,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	178.750.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	117.053.400,00
18	Kecamatan Malinau Barat	258.826.500,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	57.600.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	9.864.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	21.167.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.197.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	86.498.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	81.500.000,00
19	Kecamatan Mentarang Hulu	798.561.300,00	Aset Lainnya	Alat Bantu	50.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	382.092.000,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Apung Bermotor	96.448.800,00
			Aset Lainnya	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	105.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	2.357.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	45.156.700,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	21.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	59.396.800,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	25.110.000,00
			Aset Lainnya	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
20	BPKD	2.221.696.125,00	Aset Lainnya	Alat Pengolahan	7.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	87.187.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	44.860.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.458.500,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No.	OPD	Nilai	Mutasi Ke	Keterangan	Nilai Aset yg dimutasi
			Aset Lainnya	Alat Studio	85.800.000,00
			Aset Lainnya	Alat Komunikasi	95.800.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	2.091.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.000.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	895.569.780,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	992.929.845,00
21	Dinas Perikanan	120.970.000,00	Aset Lainnya	Alat Bantu	10.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Bengkel Bermesin	20.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Ukur	2.000.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	4.350.000,00
			Aset Lainnya	Alat Studio	1.820.000,00
			Aset Lainnya	Unit Alat Laboratorium	63.800.000,00
			Aset Lainnya	Alat Peraga Praktek Sekolah	4.000.000,00
			Aset Lainnya	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	4.200.000,00
			Aset Lainnya	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	9.300.000,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	1.500.000,00
22	Bagian Pengadaan Barang Jasa	67.280.000,00	Aset Lainnya	Komputer Unit	67.280.000,00
23	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	128.883.500,00	Aset Lainnya	Alat Angkutan Darat Bermotor	14.600.000,00
			Aset Lainnya	Alat Kantor	16.725.000,00
			Aset Lainnya	Alat Rumah Tangga	2.876.000,00
			Aset Lainnya	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.525.000,00
			Aset Lainnya	Komputer Unit	65.157.500,00
			Aset Lainnya	Peralatan Komputer	11.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.404.107.700,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>20.404.107.700,00</b>

2. Mutasi kurang Penghapusan aset lainnya/rusak berat sebesar Rp104.133.777.796,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp35.590.000,00 berupa bangunan pendidikan dan DPUPRPERKIM sebesar Rp104.098.187.796,00 berupa aset jalan desa.

Daftar aset lain-lain disajikan pada **Tabel 5.161**.

**Tabel 5.161 Daftar Aset Lain-lain pada OPD**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	1.359.581.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	120.922.946.146,80
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	96.470.000,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL	141.153.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.184.906.875,00
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	421.058.000,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	163.198.600,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	128.883.500,00
9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.988.030.450,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	324.546.300,00
11	DINAS PERIKANAN	120.970.000,00
12	DINAS PERTANIAN	420.999.500,00
13	BAGIAN HUKUM	152.002.500,00
14	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	91.245.000,00
15	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.180.000,00
16	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	14.800.000,00
17	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	512.694.000,00
18	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	67.280.000,00
19	BAGIAN UMUM	6.962.222.600,00
20	BAPPEDA DAN LITBANG	1.475.251.500,00
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.221.696.125,00
22	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	367.037.500,00
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	756.278.400,00
24	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	56.718.500,00
25	KECAMATAN MALINAU BARAT	258.826.500,00
26	KECAMATAN MENTARANG HULU	798.561.300,00
Jumlah		145.027.537.296,80

**5.3.1.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
(Rp47.270.811.617,00)      (Rp60.158.244.207,00)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 (LKPD *Akrual* pada Pemerintah Daerah) merupakan turunan dari PP 71 Tahun 2010 (SAP), maka Pengakuan dan Pengukuran Aset Lainnya adalah sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, *yakni* secara umum: memiliki manfaat masa depan, dapat diukur dengan andal menggunakan nilai perolehan maupun nilai wajar, serta diterima kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Adapun rincian penyusutan aset lain-lain disajikan pada **Tabel 5.162**.

**Tabel 5.162 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**

(dalam rupiah)

SKPD	Nilai Aset Lain-Lain	Penyusutan	Nilai Aset Lai-Lain Setelah Penyusutan
DINAS PENDIDIKAN	1.359.581.000,00	0,00	1.359.581.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	120.922.946.146,80	(26.452.676.157,00)	94.470.269.989,80
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	96.470.000,00	(93.803.333,00)	2.666.667,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL	141.153.000,00	(131.153.000,00)	10.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.184.906.875,00	(5.104.517.859,00)	80.389.016,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	421.058.000,00	(421.058.000,00)	0,00
DINAS PERHUBUNGAN	163.198.600,00	(163.198.600,00)	0,00
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	128.883.500,00	(128.415.900,00)	467.600,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

SKPD	Nilai Aset Lain-Lain	Penyusutan	Nilai Aset Lai-Lain Setelah Penyusutan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.988.030.450,00	(428.363.239,00)	1.559.667.211,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	324.546.300,00	(321.657.412,00)	2.888.888,00
DINAS PERIKANAN	120.970.000,00	(111.542.170,00)	9.427.830,00
DINAS PERTANIAN	420.999.500,00	(336.161.833,00)	84.837.667,00
BAGIAN HUKUM	152.002.500,00	(80.945.000,00)	71.057.500,00
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	91.245.000,00	(91.245.000,00)	0,00
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.180.000,00	(20.180.000,00)	0,00
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	14.800.000,00	(14.800.000,00)	0,00
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	512.694.000,00	(509.985.667,00)	2.708.333,00
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	67.280.000,00	(67.280.000,00)	0,00
BAGIAN UMUM	6.962.222.600,00	(6.962.222.600,00)	0,00
BAPPEDA DAN LITBANG	1.475.251.500,00	(1.472.834.834,00)	2.416.666,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.221.696.125,00	(2.212.713.487,00)	8.982.638,00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	367.037.500,00	(367.037.500,00)	0,00
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	756.278.400,00	(756.278.400,00)	0,00
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	56.718.500,00	(56.718.500,00)	0,00
KECAMATAN MALINAU BARAT	258.826.500,00	(257.825.644,00)	1.000.856,00
KECAMATAN MENTARANG HULU	798.561.300,00	(708.197.482,00)	90.363.818,00
<b>Jumlah</b>	<b>145.027.537.296,80</b>	<b>(47.270.811.617,00)</b>	<b>97.756.725.679,80</b>

### 5.3.2. Kewajiban

**31 Desember 2021**  
**Rp39.556.860.398,90**

**31 Desember 2020**  
**Rp27.488.235.886,68**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp39.556.860.398,90 dan kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.488.235.886,68. Kewajiban per 31 Desember 2021 terdiri dari (1) Kewajiban Jangka Pendek Rp39.556.860.398,90 dan (2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan penyesuaian APBD sebagai tindak lanjut SKB MENDAGRI dan MENKEU No. 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 dan PMK No.35 Tahun 2020. Adapun pokok peraturannya:

1. Penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui:
  - a. Penyesuaian pendapatan TKDD; dan
  - b. Penyesuaian PAD dengan memperhitungkan potensi pajak/retribusi serta kondisi perkiraan asumsi makro.
2. Penyesuaian belanja daerah melalui:
  - a. Rasionalisasi belanja pegawai (tunjangan tambahan penghasilan, honorarium, uang lembur);





- b. Rasionalisasi belanja barang/jasa minimal 50% (perjalanan dinas, sosialisasi, paket rapat, perawatan kendaraan, jasa kantor, dll); dan
  - c. Rasionalisasi belanja modal minimal 50% (pengadaan kendaraan, mesin/alat berat, tanah, renovasi gedung/ruangan, pembangunan gedung baru, dll).
3. Penggunaan hasil penyesuaian APBD untuk mendanai:
- a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19;
  - b. Penyediaan jaring pengaman sosial (bansos untuk masyarakat miskin); dan
  - c. Pemulihan kegiatan ekonomi (dunia usaha, UMKM, koperasi).

Dengan dilakukannya relokasi dan *refocusing* APBD untuk penanganan Covid-19, akan berdampak pada penanganan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2021.

<b>5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp39.556.860.398,90	<u>31 Desember 2020</u> Rp27.488.235.886,68
---	--	--

Kewajiban jangka pendek adalah akuntansi yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.556.860.398,90 dan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.488.235.886,68 yang terdiri dari:

<b>5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp0,00
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Utang perhitungan fihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

<b>5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp67.989.041,08	<u>31 Desember 2020</u> Rp92.793.566,29
--	--	--

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp67.989.041,08 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp92.793.566,29, maka terdapat penurunan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp24.804.525,21 atau 26,73%.

Pendapatan diterima dimuka dikelola oleh masing-masing OPD dan hasil pendapatan disetorkan ke Kas Daerah dengan STS dan dilaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada **Tabel 5.163**.





Tabel 5.163 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

SKPD	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
DKPPKB (RSUD-BLUD)	Pendapatan diterima di Muka Pendapatan Hasil Kerjasama Sewa Tempat Lahan ATM BPD	71.079.452,05	0,00	23.063.013,71	48.016.438,34
DKPPKB (RSUD-BLUD)	Pendapatan diterima di Muka Pendapatan Hasil Kerjasama Sewa Tempat Lahan ATM BRI	4.986.301,37	20.000.000,00	10.000.000,00	14.986.301,37
DKPPKB (RSUD-BLUD)	Pendapatan diterima di Muka Pendapatan Hasil Kerjasama Sewa Tempat Lahan ATM BNI	14.986.301,37	0,00	10.000.000,00	4.986.301,37
Dinas Perhubungan	Koreksi pendapatan diterima dimuka (sewa lahan)	1.741.511,50	0,00	1.741.511,50	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>92.793.566,29</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>44.804.525,21</b>	<b>67.989.041,08</b>

5.3.2.1.3. Utang Belanja

31 Desember 2021  
Rp11.614.097.671,82

31 Desember 2020  
Rp5.460.935.079,39

Utang Belanja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.614.097.671,82 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.460.935.079,39, maka terdapat peningkatan Utang Belanja sebesar Rp6.153.162.592,43 atau 112,68%.

Utang Belanja terdiri dari Utang Belanja Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa disajikan pada **Tabel 5.164**, **Tabel 5.165**, dan **Tabel 5.166**.

Tabel 5.164 Rincian Utang Belanja Tahun 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun	
	2021	2020
Utang Belanja Pegawai	33.237.584,00	42.452.259,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	11.580.860.087,82	5.418.482.820,39
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.614.097.671,82</b>	<b>5.460.935.079,39</b>

Tabel 5.165 Utang Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

SKPD	Utang Belanja Pegawai	Jumlah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koreksi tambah utang beban penghasilan berdasarkan beban kerja pengendalian akuntabilitas kepada kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kab.malinau untuk bulan oktober s/d desember 2017 yang yang tidak tercatat di tahun sebelumnya	20.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

SKPD	Utang Belanja Pegawai	Jumlah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koreksi tambah utang beban penghasilan berdasarkan pengendalian akuntabilitas kepada pengurus barang, penyimpan barang, pengelola gaji, operator RKA (SIMDA), sopir dan pengelola arsip pada disbudpar untuk bulan oktober s/d desember 2017 yang tidak tercatat ditahun sebelumnya	9.780.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyesuaian utang belanja pegawai An. Stefanus Harimanggung, S. STP tahun 2021	3.057.584,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.237.584,00</b>

Tabel 5.166 Utang Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

SKPD	Utang Belanja Pegawai	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	Saldo Awal 2016	42.126.200,00
DINAS PENDIDIKAN	Dana Bantuan PSB SMPN 1 Mentarang Hulu TA 2015/2016	1.400.000,00
BPBD	Pembayaran perpanjangan STNK dan kekurangan tahun 2015 atas kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 TA 2016	7.000.000,00
BPKD	Pembayaran biaya jasa perbaikan perataan kerja, computer, laptop, printer server dan mesin proporasi kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja TA 2016	26.338.988,00
BPKD	Kewajiban atas temuan persediaan Karcis Retribusi Leges (saldo awal)	1.000.000,00
KEC. MALINAU KOTA	Jurnal Koreksi atas Utang Beban - Jasa Air PDAM sesuai dengan realisasi pada TA 2020 - Kec. Malinau Kota	491.500,00
KEC. MALINAU KOTA	Jurnal Koreksi atas Utang Beban - Jasa Air Listrik sesuai dengan realisasi pada TA 2021 - Kec. Malinau Kota	2.831.007,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian atas utang pemeriksaan kesehatan TA 2020	100.000,00
BAGIAN UMUM	Penyesuaian atas utang tagihan listrik pemda dan Kantor Penghubung di Jakarta, Asrama Malinau di Yogyakarta, Samarinda, Tarakan pemakaian bulan desember 2021	395.834.587,00
BAGIAN UMUM	Penyesuaian atas utang tagihan telepon Pemda pemakaian bulan desember 2021	6.320.855,00
BAGIAN UMUM	Penyesuaian atas utang tagihan air Pemda, Perwakilan dan Asrama di Samarinda dan Tarakan pemakaian bulan desember 2021	49.975.522,00
KEC. MALINAU BARAT	jurnal atas utang tagihan listrik desember 2021	1.359.573,00
KEC. MALINAU BARAT	jurnal atas utang tagihan air bulan desember 2021	282.600,00
SETWAN	Penyesuaian Utang Beban Barang Jasa Belanja Jasa Listrik Pemakaian Bulan Desember Tahun 2021	45.184.635,00
SETWAN	Penyesuaian Utang Beban Barang Jasa Belanja Jasa Air Pemakaian Bulan Desember Tahun 2021	6.834.600,00
SETWAN	Penyesuaian Utang Beban Barang Jasa Belanja Jasa Telpon Pemakaian Bulan Desember Tahun 2021	2.348.461,00
KEC. MALINAU UTARA	Penyesuaian utang belanja tagihan air pemakaian bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 dan bulan Juli, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2021	7.499.500,00
KEC. MALINAU UTARA	Penyesuaian utang belanja tagihan listrik pemakaian bulan desember 2021	2.836.057,00
KEC. MENTARANG	Utang Beban Tagihan Air bulan November & Desember 2021	243.300,00
KEC. MENTARANG	Utang Beban Tagihan Listrik bulan Desember TA 2021	899.750,00
KEC. MALINAU KOTA	Jurnal Penyesuaian atas Utang Beban- Jasa Listrik Bulan Desember 2021- Kec. Malkot	1.421.777,00
KEC. MALINAU KOTA	Jurnal Penyesuaian atas Utang Beban- Jasa air PDAM Bulan Desember 2021-Kec. Malkot	96.600,00
DISHUB	Penyesuaian Utang Beban Air tahun 2021	758.000,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (jasa pelayanan medis umum) TA 2021	92.906.211,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (jasa pelayanan medis covid-19) TA 2021	5.691.165.750,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (jasa pelayanan medis BPJS 2021) TA 2021	2.295.630.885,00





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

SKPD	Utang Belanja Pegawai	Jumlah
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (bealanja insentif dan honorarium) TA 2021	208.983.500,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (uang lembur non PNS) TA 2021	51.730.000,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja obat-obatan) TA 2021	513.025.625,13
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja BAKHP) TA 2021	1.148.915.008,69
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja fotocopy) TA 2021	1.674.530,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja rumah tangga) TA 2021	37.815.000,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja pemeliharaan) TA 2021	35.000.000,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja tagihan air) TA 2021	58.604.300,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja listrik) TA 2021	101.561.598,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja telepon) TA 2021	2.139.940,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja telkom astinet) TA 2021	37.136.000,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja paket pengiriman) TA 2021	79.527.000,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (belanja bahan makanan dan minuman pasien) TA 2021	215.108.200,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (pemeriksaan kesehatan) TA 2021	10.346.298,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Penyesuaian utang barang dan jasa BLUD (perjalanan dinas pendamping pasien) TA 2021	28.842.900,00
DKPPKB	Penyesuaian Utang Belanja Listrik Tahun 2021 DKPPKB dan PKM Malkot	15.515.430,00
DKPPKB	Penyesuaian Utang Belanja Air Tahun 2021 DKPPKB, PKM Malkot, Malseb, Sesua, Pulau Sapi dan Loreh	4.775.100,00
DKPPKB	Penyesuaian Utang Belanja Transport Rujukan Udara (MAF) Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	346.192.000,00
DKPPKB (RSUD BLUD)	Koreksi BPK atas kurang catat utang pemeliharaan peralatan dan mesin RSUD	1.081.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.580.860.087,82</b>

**5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya**

**31 Desember 2021**  
**Rp27.874.773.686,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp21.934.507.241,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.874.773.686,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp21.934.507.241,00, maka terdapat peningkatan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5.940.266.445,00 atau 27,08%. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada **Tabel 5.167**.

**Tabel 5.167 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya**

(dalam rupiah)

Uraian	31/12/2021	31/12/2020
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	27.676.393.686,00	19.043.259.691,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	198.380.000,00	2.891.247.550,00
Utang Pembiayaan	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>27.874.773.686,00</b>	<b>21.934.507.241,00</b>

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.





Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.874.773.686,00 akan dilakukan pelunasannya pada tahun berikutnya.

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp27.448.053.686,00 merupakan koreksi saldo awal berdasarkan Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan disajikan pada **Tabel 5.168**, serta rincian mutasi utang transfer tersaji pada **Lampiran 9**.

**Tabel 5.168 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer  
Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal Utang 2021	Koreksi Saldo Utang berdasarkan PMK 129 TA 21 (Varian)	Realisasi Pemotongan LB TA 2020	Penyesuaian Utang berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7 /2021	Saldo Akhir per 31 Des 2021
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	7.702.996,00	(7.702.996,00)	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH PBB Bagi Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	462.982.140,00	837.963.489,00	0,00	0,00	1.300.945.629
Bagi Hasil PBB Migas	0,00	150.389.451,00	0,00	0,00	150.389.451
Bagi Hasil PBB Non Migas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Daerah Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Pungut PBB Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Pungut PBB Kehutanan	19.290.756,00	34.904.500,00	0,00	0,00	54.195.256
Biaya Pungut PBB Migas	0,00	5.413.089,00	0,00	0,00	5.413.089
Biaya Pungut PBB Non Migas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BP Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	1.551.197.477,00	4.292.240.657,00	0,00	0,00	5.843.438.134
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	7.880.709,00	494.817.846,00	0,00	0,00	502.698.555
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	5.026.934.597,00	73.693.111,00	0,00	0,00	5.100.627.708
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	16.682.857.893,00	14.527.273.989	0,00	2.155.583.904
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	9.707.924.038,00	3.231.372.946,00	5.712.977.907	0,00	7.226.319.077
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.259.346.978,00	2.691.301.885,00	0,00	0,00	4.950.648.863
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	0,00	157.694.020,00	0,00	0,00	157.694.020
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	228.440.000	228.440.000
<b>Jumlah</b>	<b>19.043.259.691,00</b>	<b>28.644.945.891,00</b>	<b>20.240.251.896,00</b>	<b>228.440.000,00</b>	<b>27.676.393.686,00</b>





Utang Transfer dana perimbangan pada Dana Alokasi Umum sebesar Rp228.440.000,00 merupakan penyesuaian berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang pemotongan penyaluran DAU atau DBH TA 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19).

Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp 198.380.000,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.934.507.241,00. Rincian utang aset tetap kepada pihak ketiga disajikan pada **Tabel 5.169**.

**Tabel 5.169 Rincian Utang Aset Tetap**

(dalam rupiah)

SKPD	Utang Pengadaan Aset tetap	Jumlah
DPUPR-PERKIM	Pembangunan Jalan Swadaya - Lidung Kemenci	142.390.000,00
DINAS PENDIDIKAN	Blj. Modal Dana BOSDA SDN 013 Malinau Utara Semester II Tahun 2016	17.125.000,00
DINAS PENDIDIKAN	Blj. ATK dan Foto Copy Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kantor SDN 005 Kecamatan Sungai Tubu	1.000.000,00
DPUPR-PERKIM	Koreksi BPK-RI atas kurang catat aset DPUPR sebesar Rp44.883.000,00 berupa peningkatan jalan swadaya - simpang jalan inhutani (kapitalisasi ke aset induk)	50.000,00
RSUD BLUD	Koreksi penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas pembelian yang terhutang	37.815.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>198.380.000,00</b>

Utang pengadaan aset tetap sebesar Rp198.380.000,00 merupakan utang jangka pendek lainnya yang telah selesai dikerjakan dan akan dibayarkan kepada pihak ketiga ditahun berikutnya.

### 5.3.3. Ekuitas

31 Desember 2021  
Rp4.607.075.845.953,27

31 Desember 2020  
Rp4.771.117.685.282,84

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.607.075.845.953,27 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.771.117.685.282,84 yang merupakan pencerminan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.





#### 5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.1. Ekuitas Awal

1 Januari 2021                      1 Januari 2020  
Rp4.771.117.685.282,84              Rp4.894.091.836.456,97

Jumlah ekuitas awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp4.771.117.685.282,84 merupakan reklasifikasi dari ekuitas akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.771.117.685.282,84, rincian pada **Tabel 5.170**.

**Tabel 5.170 Ekuitas Awal Tahun 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL 2020	4.894.091.836.456,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(120.058.931.546,28)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	(2.915.219.627,85)
<b>EKUITAS 2020</b>	<b>4.771.117.685.282,84</b>

Dari jumlah ekuitas awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.771.117.685.282,84 terdiri dari ekuitas awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.894.091.836.456,97, Defisit-LO sebesar Rp120.058.931.546,28, Koreksi Ekuitas sebesar Rp2.915.219.627,85.

##### 5.4.2. Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

31 Desember 2021                      31 Desember 2020  
(Rp67.732.851.671,62)              (Rp120.058.931.546,28)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp67.732.851.671,62 yaitu selisih antara pendapatan LO sebesar Rp1.215.000.741.307,64 dengan beban sebesar Rp1.258.246.536.092,26, defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp0,00 dan Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp24.487.056.887,00. Rincian surplus/defisit LO disajikan pada **Tabel 5.171**.

**Tabel 5.171 Rincian Surplus/(Defisit) – LO Tahun 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH
<b>PENDAPATAN – LO</b>	
Pajak Daerah-LO	14.806.527.144,00
Retribusi Daerah-LO	2.347.685.534,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.348.771.821,36
Lain-lain PAD yang Sah-LO	56.609.243.863,39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.061.132.887.011,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	53.360.239.863,47
Pendapatan Hibah-LO	6.360.132.070,42
Dana Darurat-LO	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

URAIAN	JUMLAH
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	18.035.254.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.215.000.741.307,64</b>
<b>BEBAN</b>	
Beban Pegawai	504.769.183.242,00
Beban Barang dan Jasa	370.983.093.987,79
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	2.393.507.500,00
Beban Hibah	21.718.178.702,00
Beban Bantuan Sosial	2.694.382.502,00
Beban Penyisihan Piutang	1.187.012.560,86
Beban Lain-lain	628.262.643,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.992.781.888,42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.488.517.229,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	128.616.023.771,10
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	168.197.465,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	973.658.601,09
Beban Bagi Hasil	0,00
Beban Bantuan Keuangan	155.633.736.000,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1.258.246.536.092,26</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) OPERASI</b>	<b>(43.245.794.784,62)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00
<b>JUMLAH KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	
Beban Tak Terduga	24.487.056.887,00
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>	<b>24.487.056.887,00</b>
<b>JUMLAH KEGIATAN NON OPERASIONAL - JUMLAH POS LUAR BIASA</b>	<b>(24.487.056.887,00)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>	<b>(67.732.851.671,62)</b>

**5.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
(Rp96.308.987.657,95) (Rp2.915.219.627,85)

**5.4.3.1. Koreksi Ekuitas** 31 Desember 2021 31 Desember 2020  
(Rp96.308.987.657,95) (Rp2.915.219.627,85)

Koreksi Ekuitas Tahun Anggaran 2021 yang dapat mempengaruhi nilai Ekuitas akhir. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar (Rp96.308.987.657,95) merupakan koreksi atas tahun sebelumnya dimana saldo awal koreksi ekuitas lainnya adalah sebesar (Rp2.915.219.627,85), koreksi yang dilakukan terdiri atas membalik koreksi ekuitas lainnya Tahun 2020 sebesar (Rp2.915.219.627,85) yang fungsinya untuk menampilkan saldo awal di Tahun 2021, koreksi atas penambahan/pengurangan piutang sebesar (Rp4.345.795.470,40), koreksi atas penambahan/pengurangan utang sebesar (Rp7.795.651.943,61), koreksi





Penambahan/Pengurangan Saldo Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Kas Lainnya, Pendapatan, dan Penghapusan Aset serta koreksi penyisihan piutang sebesar (Rp84.167.540.243,94). Adapun rincian dari koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada **Tabel 5.172**, **Tabel 5.173**, **Tabel 5.174**, dan **Table 5.175**.

**Tabel 5.172 Koreksi Ekuitas Lainnya Atas Tahun 2021**

(dalam rupiah)

NO	KODE TRANSAKSI	Uraian	JUMLAH
1	01/JB/Ekuit/Dishub/2021	Jurnal balik koreksi ekuitas awal	633.174.746,00
2	01/JB/LPE/BPBD/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	150.853.999,00
3	01/JB/LPE/BPKD/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	49.297.192.421,73
4	01/JB/LPE/DISBUDPAR/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(48.479.000,00)
5	01/JB/LPE/DISDIK/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(11.819.551.503,39)
6	01/JB/LPE/DISNAKER/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(133.897.000,00)
7	01/JB/LPE/DISPERINDAG/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(13.840.383,22)
8	01/JB/LPE/DKPPKB/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(9.874.829.432,77)
9	01/JB/LPE/DLH/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(1,00)
10	01/JB/LPE/DPMPSTP/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	133.897.000,00
11	01/JB/LPE/DPU/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	1.440.212.584,50
12	01/JB/LPE/KBH/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(50.000.000,00)
13	01/JB/LPE/KEC.KAYANHILIR/2021	Jurnal Balik atas koreksi ekuitas awal	(50.000.000,00)
14	01/JB/LPE/KEC.KAYANHULU/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(100.000.000,00)
15	01/JB/LPE/KEC.KAYANSELATAN/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(100.000.000,00)
16	01/JB/LPE/KEC.LONGSULE/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(25.000.000,00)
17	01/JB/LPE/KEC.MALBAR/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(150.000.001,00)
18	01/JB/LPE/KEC.MALSEL/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(100.000.000,00)
19	01/JB/LPE/KEC.MASEHI/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(50.000.000,00)
20	01/JB/LPE/KEC.MASEHU/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(100.000.000,00)
21	01/JB/LPE/KEC.MENTARANG/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	371.008.001,00
22	01/JB/LPE/KEC.MENTARANGHULU/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(50.000.000,00)
23	01/JB/LPE/KEC.PUJUNGAN/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(50.000.000,00)
24	01/JB/LPE/KEC.SUNGAIBOH/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(100.000.000,00)
25	01/JB/LPE/KEC.SUNGAI TUBU/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(50.000.000,00)
26	01/JB/LPE/SATPOLPP&PK/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(1,00)
27	01/JB/LPE/SETDA_PERKEU/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(89.475.000,00)
28	01/JB/LPE/SETDA_UMUM(COVID19)/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(24.165.639.553,00)
29	01/JB/LPE/SETDA_UMUM/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(831.953.667,00)
30	01/LPE/KEC.MALKOT/2021	Jurnal Balik atas Koreksi Ekuitas Lainnya 2020	(150.000.000,00)
31	01/LPE/PERPUSTAKAAN/2021	Jurnal Balik atas koreksi ekuitas lainnya 2020	2,00
32	01/LPE/SETWAN/2021	Jurna Balik Koreksi ekuitas lainnya TA 2020	(641.000.001,00)
33	02/JB/kor.nilai persediaan/Dishub/2021	Jurnal balik koreksi nilai persediaan awal	(67.650.000,00)
34	02/JB/LPE/KEC.MENTARANG/2021	Jurnal balik atas koreksi nilai persediaan awal	(150.000.000,00)
35	04/LPE/KECMALUT/2021	Jurnal balik atas koreksi ekuitas awal	(150.000.000,00)
36	10/LPE/DISDUKCAPIL/2021	Jurnal balik atas koreksi equitas lainnya	196.417,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.915.219.627,85</b>



Tabel 5.173 Koreksi Atas Penambahan/Pengurangan Piutang TA 2021

(dalam rupiah)

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
1	01/JK/Kor_Sawal_Piutang_Prov/ BPKD/2021	Koreksi tambah saldo awal piutang transfer DBH Provinsi berdasarkan Kep. Gub Kaltara No. 188.44 / K.140 / 2021	0,10
2	1/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_ Pusat/DBH/BPKD/202	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 Berdasarkan PMK No. 25/PMK/2021	955.042.400,00
3	2/JK/Kor_Sawal_Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/202	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri Berdasarkan PMK No. 25/PMK/2021	(955.042.400,00)
4	3/JK/Kor_Sawal_Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/202	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil PBB Migas Berdasarkan PMK No. 25/PMK/2021	490.896.917,00
5	4/JK/Kor_Sawal_Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/202	Koreksi Saldo Awal Piutang Biaya Pungut PBB Migas Berdasarkan PMK No. 25/PMK/2021	17.045.032,00
6	5/JK/Kor_Sawal_Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/202	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Berdasarkan PMK No. 25/PMK/2021	(179.883.300,00)
7	6/JK/Kor_Sawal_Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/202	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Berdasarkan PMK No. 25/PMK/2021	(3.329.700,00)
8	7/JK/Kor_Sawal_Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/202	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Berdasarkan PMK No. 25/PMK/2021	(2.094.838.503,00)
9	8/JK/Kor_Sawal_Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/202	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Berdasarkan PMK No. 25/PMK/2021	(21.079.240,00)
10	1/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada DBH PBB Bagi Rata	(265.689.700,00)
11	2/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	(1.475.469.971,00)
12	3/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil PBB Migas	(995.144.580,00)
13	4/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil PBB Non Migas Lainnya	(2.638.829.700,00)
14	5/JK/Piutang/Transfer_Pusat /DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Biaya Pungut PBB Migas	(20.962.956,00)
15	6/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	(316.881.000,00)
16	10/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/20	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	121.754.852,00
17	11/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/20	Koreksi Saldo Awal Piutang DBH PBB Bagi Rata Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	1.726.270.298,00
18	12/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/20	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil PBB Non Migas Lainnya Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	13.676.126.004,00
19	13/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/20	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagian Daerah Sektor Lainnya Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	206.994.707,00
20	14/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/20	Koreksi Saldo Awal Piutang Biaya Pungut PBB Non Migas Lainnya Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	474.585.559,00
21	15/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/20	Koreksi Saldo Awal Piutang BP Sektor Lainnya Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	7.187.224,00
22	16/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/20	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	179.883.300,00
23	17/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/20	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	3.329.700,00
24	18/JK/Kor_Sawal_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/20	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	201.287.739,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
25	9/JK/Kor_Sawat_Piutang/ Transfer_Pusat/DBH/BPKD/202	Koreksi Saldo Awal Piutang Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	1.063.941.021,00
26	10/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil PBB Non Migas Lainnya	(2.176.669.445,00)
27	7/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	(214.542.919,00)
28	8/JK/Piutang/Transfer_Pusat / DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	(24.551.776,00)
29	9/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada DBH PBB Bagi Rata	(348.101.127,00)
30	11/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	(849.398.102,00)
31	12/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	(97.203.076,00)
32	13/JK/Piutang/Transfer_Pusat/ DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada DBH PBB Bagi Rata	(1.378.169.171,00)
33	14/JK/Piutang/Transfer_Pusat /DBH/BPKD/2021	Penyelesaian Utang Kelebihan Transfer Pembayaran Pemerintah Pusat (LB) melalui pemotongan Piutang Tranfer (KB) pada Bagi Hasil PBB Non Migas Lainnya	(9.438.638.373,00)
34	02/JK/Piutang_PBB/BPKD/2021	Reklas Pendapatan PBB berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No. 900.017/BPKD-PD2-I/2022	24.284.815,00
35	10/JK/Pey.Piutang/BPKD/2021	Koreksi Saldo awal penyesihan piutang lain-lain PAD yg sah pada Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,50
<b>TOTAL</b>			<b>(4.345.795.470,40)</b>

Tabel 5.174 Koreksi Atas Penambahan/Pengurangan Utang TA 2021

(dalam rupiah)

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
1	01/JK/utang-beban/DKPPKB2021	Koreksi Lebih catat atas utang beban barjas, Beban Jasa air tahun 2021 pada DKPP&KB	20.000,00
2	01/JK/Utang/DKPPKB/2021	Reklas Saldo Awal Utang Beban Air, Listrik dan Telepon ke Puskesmas Malinau Kota Rp.7.856.397,00, Malinau Seberang Rp.2.346.100,00, Tanjung Lapang Rp.342.000,00, Sesua Rp.2.325.733,00, Pulau Sapi Rp.8.553.700,00	21.423.930,00
3	1/JK/Penyelesaian_Utang_TF/ BPKD/2021	Penyelesaian Utang melalui Pemotongan Kurang Bayar pada Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan	5.712.977.907,00
4	02/JK/Koreksi_Utang/SETDA/2021	Koreksi atas mutasi utang belanja pegawai ke Sekretariat Daerah dari Bagian Prokompim berdasarkan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2019	(3.637.163,00)
5	12/JK/Koreksi_Utang/ SETDA_PROKOMPIM/2021	Koreksi atas mutasi utang belanja pegawai dari Bagian Prokompim ke Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2019	3.637.163,00
6	10/JK/Utang/BKPD/2021	Pembayaran atas utang pengadaan BBM TA 2020 dalam penanganan Covid 19 (BTT)	261.180.800,00
7	1/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	7.702.996,00
8	10/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(3.231.372.946,00)
9	11/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(2.691.301.885,00)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
10	12/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(157.694.020,00)
11	2/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(837.963.489,00)
12	3/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil PBB Migas Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(150.389.451,00)
13	4/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Biaya Pungut PBB Kehutanan Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(34.904.500,00)
14	5/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Biaya Pungut PBB Migas Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(5.413.089,00)
15	6/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(4.292.340.657,00)
16	7/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(494.817.846,00)
17	8/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(73.693.111,00)
18	9/JK/Utang_TF_Pusat/BPKD/2021	Koreksi Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	(16.682.857.893,00)
19	2/JK/Penyelesaian_Utang_TF/BPKD/2021	Penyelesaian Utang melalui Pemotongan Kurang Bayar pada Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	2.763.865.267,00
20	3/JK/Penyelesaian_Utang_TF/BPKD/2021	Penyelesaian Utang melalui Pemotongan Kurang Bayar pada Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	11.763.408.722,00
21	12/JK/Utang_Air/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas kurang catat utang belanja tagihan air di tahun 2020 sebesar Rp132.000,00 berdasarkan Surat Pernyataan No: 010/18/bagum3a	(132.000,00)
22	20/JK/Utang/RSUD_BLUD/2021	Koreksi atas selisih kurang catat estimasi jasa pelayanan medis covid-19 sebesar Rp3.976.056,00 berdasarkan surat pernyataan No: 804/149/keu	(3.976.056,00)
23	25/JK/Utang/RSUD_BLUD/2021	Koreksi atas selisih lebih catat sebesar Rp330.625.377,39 yang merupakan nilai estimasi, pembulatan, dan perubahan penetapan harga satuan pokok keg. belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan surat pernyataan No: 804/149/keu	330.625.377,39
<b>TOTAL</b>			<b>(7.795.651.943,61)</b>

**Tabel 5.175 Koreksi Penambahan/Pengurangan Saldo Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Kas Lainnya, Pendapatan dan Penghapusan Aset TA 2021**

(dalam rupiah)

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
1	01/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/BPPD/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa karena pembulatan	(1,00)
2	01/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DISHUB/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara karena pembulatan	(1,00)
3	01/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DISFORA/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film karena pembulatan	(1,00)
4	01/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DKPPKB/DKPPKB/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Mesin Proses Apung karena pembulatan	(25,00)
5	01/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DLH/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih karena pembulatan	(21,00)
6	01/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Kendaraan Bermotor Angkutan Barang karena pembulatan	1,00
7	01/JK/Sawal_Ak_Amortisasi/DKPPKB/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya karena pembulatan	0,01
8	02/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DISHUB/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air karena pembulatan	1,00
9	02/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DKPPKB/DKPPKB/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang karena pembulatan	6,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
10	02/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DLH/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya karena pembulatan	(1,00)
11	02/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Gedung Kantor karena pembulatan	4,00
12	03/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DKPPKB/DKPPKB/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon di atas Tanah karena pembulatan	1,00
13	03/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DLH/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa karena pembulatan	(1,00)
14	03/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Gedung Tempat ibadah karena pembulatan	1,00
15	04/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Rumah Negara Golongan III karena pembulatan	1,00
16	05/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Tugu/Tanda Batas Administrasi karena pembulatan	1,00
17	06/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Jalan Kabupaten karena pembulatan	3,11
18	07/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai karena pembulatan	2,00
19	08/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku karena pembulatan	1,00
20	09/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Jaringan Pembawa karena pembulatan	7,00
21	10/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Alat Laboratorium Batuan/Geologi karena pembulatan	(1,00)
22	11/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Peralatan Umum karena pembulatan	(1,00)
23	12/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja atas double catat tahun sebelumnya	2.683.607,00
24	12/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Pemesinan:Electrical Workshop karena pembulatan	(1,00)
25	13/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang karena pembulatan 3 angka d belakang koma	1,00
26	13/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Gudang karena pembulatan	(2,00)
27	14/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium karena pembulatan 3 angka d belakang koma	(2,00)
28	14/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Gedung Tempat Olahraga karena pembulatan	(1,00)
29	15/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan karena pembulatan 3 angka d belakang koma	(37,00)
30	15/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar karena pembulatan	(1,00)
31	16/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan karena pembulatan 3 angka d belakang koma	(3,00)
32	16/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Pembawa Irigasi karena pembulatan	(1,00)
33	17/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan karena pembulatan 3 angka d belakang koma	1,00
34	17/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Pembuang Irigasi karena pembulatan	(2,00)
35	18/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II karena pembulatan 3 angka d belakang koma	1,00
36	18/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Pembuang Pengaman Sungai karena pembulatan	(5,81)
37	19/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III karena pembulatan 3 angka d belakang koma	1,00
38	19/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air karena pembulatan	(1,00)
39	20/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air karena pembulatan 3 angka d belakang koma	1,00
40	20/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Instalasi Air Permukaan karena pembulatan	(1,00)
41	21/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses karena pembulatan 3 angka d belakang koma	5,00
42	21/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Instalasi Air Sumber/Mata Air karena pembulatan	(2,00)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
43	22/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pertanian karena pembulatan 3 angka d belakang koma	(4,00)
44	22/JK/Sawal_Ak.Peny_AT/DPUPR/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada Jaringan Cabang Distribusi karena pembulatan	(1,00)
45	23/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Energi Surya karena pembulatan 3 angka d belakang koma	1,00
46	24/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain karena pembulatan 3 angka d belakang koma	(5,00)
47	25/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment karena pembulatan 3 angka d belakang koma	1,00
48	26/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar karena pembulatan 3 angka d belakang koma	(2,00)
49	27/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian karena pembulatan 3 angka d belakang koma	(2,00)
50	28/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic karena pembulatan 3 angka d belakang koma	(1,00)
51	29/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display karena pembulatan 3 angka d belakang koma	2,00
52	30/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran karena pembulatan 3 angka d belakang koma	1,00
53	31/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISDIK/2021	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Umum karena pembulatan 3 angka d belakang koma	(2,00)
54	01a/JK/Dana Kapitasi/IV/2021	Koreksi atas Kurang Catat di saldo Akhir 2020 Dana Kapitasi Jasa Pelayanan Bulan okt - Desember 2020 PKM Long Loreh Senilai 58.755.780,- dan Lebih catat di PKM Malinau seberang Seberang 1,-	(58.755.781,00)
55	01a/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Reguler pada SDN 006 Mentarang (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2019)	(9.460.000,00)
56	02a/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Reguler pada SDN 003 MENTARANG (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK sudah di SPJ pada Tahun 2019)	(4.634.000,00)
57	03a/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Kurang Catat Belanja Bos Afiriasi Tahun 2020 pada SDN 008 MENTARANG HULU	(1.170.000,00)
58	04a/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Kurang Catat Belanja Bos Afiriasi Tahun 2020 pada SDN 001 MALINAU SELATAN	(9.268.000,00)
59	05a/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Kurang Catat Belanja Bos Afiriasi Tahun 2020 pada SMPN 2 M. SELATAN HULU	(10.590.000,00)
60	01/JK-BPK/BPKD/2021	Koreksi BPK-RI atas Lebih Catat pada Utang Tranfer Pusat pada Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Berdasarkan PMK No. 129/PMK/2021	100.000,00
61	01/JK/Hapus_AL_RB/DISDIK/2021	Mutasi Kurang (Penghapusan) Aset Lainnya berupa aset rusak berat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900/K.295.1/2021 tentang penetapan penghapusan BMD Pemerintah Kab. Malinau TA 2021	(71.177.710.568,00)
62	01/JK/KOR_Sawal_Ak_Penyusutan/SETWAN/2021	Korekasi Lebih Catat Saldo awal akumuasi penyusutan pada Alat Laboratorium Patologi	(1,00)
63	01a/JK/PN-JAGIR/ BPKD/2021	pengembalian bunga kegiatan pemanfaatan dana kapitasi JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Bunga bank bulan januari-oktober 2021	(1.947.472,00)
64	01a/JK/PN-Kas-JAGIR/ DKPPKB/2021	pengembalian bunga kegiatan pemanfaatan dana kapitasi JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Bunga bank bulan januari-oktober 2021	1.947.472,00
65	02/JK-BPK/BPKD/2021	Koreksi BPK-RI atas Kurang Catat Utang Transfer Pusat Pada DAU berdasarkan PMK Nomor 34/KM.7/2021 Tentang pemotongan penyaluran DAU atau DBH TA 2022 Tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap penanganan dam	(228.440.000,00)
66	02/JK/KOR_Sawal_Ak_Penyusutan/SETWAN/2021	Korekasi Lebih Catat Saldo awal akumuasi penyusutan pada Rumah Negara Golongan I	(3,00)
67	02a/JK/PN-JAGIR/BPKD/2021	pengembalian bunga kegiatan pemanfaatan dana kapitasi JKN di fasilitas kesehatan tingkat (FKTP) bulan agustus-november 2021 dan januari -maret 2021 (puskesmas puijangan)	(204.056,00)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
68	02a/JP/Kas-JAGIR/ DKPPKB/2021	pengembalian bunga kegiatan pemanfaatan dana kapitasi JKN difasilitas kesehatan tingkat (FKTP) bulan agustus-november 2021	204.056,00
69	03/JK/AT/DKPPKB/2021	Koreksi tambah aset tetap peralatan dan mesin atas belanja dana JKN	863.950.066,00
70	03/JK/KOR_Sawal_Ak_Penyusutan/SETWAN/2021	Koreksi Lebih Catat Saldo awal akumulasi penyusutan pada Rumah Negara Golongan Iii	(10,00)
71	03/JK/mutasi_Tambah_Aset_Tetap/KEC.SUNGAITUBU/2021	Koreksi Mutasi Tambah Aset tetap mebel dari OPD lain Ta 2020	29.608.334,00
72	03a/JK/PN-JAGIR /BPKD/2021	pengembalian bunga kegiatan pemanfaatan dana kapitasi JKN di fasilitas kesehatan tingkat pratama (FKTP) bulan agustus-oktober 2021 (puskesmas sehat)	(131.557,00)
73	03a/JP/Kas-JAGIR /DKPPKB/2021	pengembalian bunga kegiatan pemanfaatan dana kapitasi JKN di fasilitas kesehatan tingkat pratama (FKTP) bulan agustus-oktober 2021 (puskesmas sehat)	131.557,00
74	04/JK/mutasi_Tambah_Aset_Tetap/KEC.SUNGAITUBU/2021	koreksi Mutasi Tambah Aset tetap MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT dari OPD lain Ta 2020	21.184.163,00
75	04a/JK/PN-JAGIR/BPKD/2021	pengembalian bunga kegiatan pemanfaatan dana kapitasi JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) bulan januari s/d september tahun 2021 (puskesmas pulau sapi)	(331.348,00)
76	04a/JP/Kas-JAGIR/DKPPKB/2021	pengembalian bunga kegiatan pemanfaatan dana kapitasi JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) bulan januari s/d september tahun 2021 (puskesmas pulau sapi)	331.348,00
77	05/JK/BTT/KEC.MALKOT/2021	Koreksi persediaan BTT atas mutasi dari BPKD	50.000.000,00
78	05/JK/mutasi_Tambah_Aset_Tetap/KEC.SUNGAITUBU/2021	koreksi Mutasi Tambah Aset tetap LEMARI DAN ARSIP PEJABAT dari OPD lain Ta 2020	65.083.331,00
79	06/JK/mutasi_Tambah_Aset_Tetap/KEC.SUNGAITUBU/2021	koreksi Mutasi Tambah Aset tetap PERSONAL KOMPUTER dari OPD lain Ta 2020	12.862.500,00
80	06h/JK/Penyusutan_AT /Mentarang_Hulu/XII/2021	Koreksi Saldo awal penyusutan Alat laboratorium Lingkungan hidup TA 2021	(1,00)
81	07a/JK/Kor_Sawal_BOS /DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Afiriasi pada SDN 001 MENTARANG HULU (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2019)	(1.189.000,00)
82	08/JK/Koreksi_SA/kec.malbar/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (MOB)	(1,00)
83	08a/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Afiriasi pada SDN 001 MENTARANG HULU (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020)	(42.850.000,00)
84	08a/JK/Koreksi_SA/SETDA_PROKOMPIM/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap (alat laboratorium pertanian) TA 2021	(6,00)
85	09/JK/BTT/kec.malbar/2021	Koreksi persediaan BTT atas mutasi dari BPKD	50.000.000,00
86	09a/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Kinerja pada SDN 002 SUNGAI BOH (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020)	(21.060.000,00)
87	1/JP/BM-BTT/BPKD/2021	Penyesuaian belanja modal atas BTT Covid 19 TA 2021	1.196.548.507,00
88	10/JK/AT/DPUPR/2021	Koreksi kurang aset tetap gedung dan bangunan atas mutasi ke Bagian Umum	(71.473.141.747,00)
89	10/JK/B.Modal-BTT/BPKD/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap dari belanja modal (BTT) dalam penanganan covid-19 ke RSUD	(731.376.007,00)
90	10/JK/Hapus_AT/ DISPERINDAG/2021	Mutasi Kurang aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berupa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900/K.295.1/2021 tentang penetapan penghapusan BMD Pemerintah Kab. Malinau TA 2021	(379.659.400,00)
91	10/JK/Koreksi_ASETTETAP/ SATPOLPP&PK/XII/2021	koreksi saldo awal akumulasi penyusutan alat kendaraan bermotor khusus TA 2021	1,00
92	10/JP/UMKM/BPKD/2021	Penyesuaian Dana Bergulir UMKM Tahun 2021	(163.618.513,36)
93	104/JK/Mutasi_Aset/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap bangunan gedung kantor sebesar Rp89.254.700.890,00 dari Dinas PU TA 2021	71.473.141.747,00
94	105/JK/Mutasi_Aset/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp11.186.423.660,00 dari Dinas PU TA 2021	11.090.355.409,00
95	106/JK/Mutasi_Aset/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap bangunan gedung tempat olahraga sebesar Rp7.099.244.380,00 dari Dinas PU TA 2021	7.021.564.218,00
96	107/JK/Mutasi_Aset/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap meubelair sebesar Rp32.300.000,00 ke kecamatan sungai tubu TA 2021	(29.608.334,00)
97	108/JK/Mutasi_Aset/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap kursi kerja pejabat sebesar Rp23.110.000,00 ke kecamatan sungai tubu TA 2021	(21.184.163,00)
98	109/JK/Mutasi_Aset/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap lemari dan arsip pejabat sebesar Rp71.000.000,00 ke kecamatan sungai tubu TA 2021	(65.083.331,00)
99	10a/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Afiriasi pada SDN 004 SUNGAI BOH (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020)	(12.350.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
100	11/JK/AT-BTT/RSUD-APBD/2021	Koreksi aset tetap peralatan dan mesin atas mutasi dari BPKD	722.626.007,00
101	11/JK/AT/DPUPR/2021	Koreksi kurang aset tetap gedung dan bangunan atas mutasi ke Bagian Umum	(11.090.355.409,00)
102	110/JK/Mutasi_Aset/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap personal komputer sebesar Rp14.700.000,00 ke kecamatan sungai tubu TA 2021	(12.862.500,00)
103	111/JK/Mutasi_Aset/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap pompa sebesar Rp11.925.000,00 dari BPKD TA 2021	465.172.500,00
104	113/JK/Persediaan/SETDA_UMUM/2021	Koreksi persediaan BTT atas mutasi dari BPKD	21.093.717.480,00
105	11a/JK/Kor_Sawal_BOS/DISDIK/2021	Koreksi Saldo awal BOS Kinerja pada SMPN 1 SUNGAI BOH (Terlambat mengantar laporan ke DISDIK, Sudah di SPJ pada Tahun 2020)	(30.000.000,00)
106	12./JP/PERSEDIAAN/BPBD/2021	Penyesuaian persediaan atas mutasi ke Dinkes dan RSUD	(1.372.316.954,28)
107	12/JK/AT/DPUPR/2021	Koreksi kurang aset tetap gedung dan bangunan atas mutasi ke Bagian Umum	(7.021.564.218,00)
108	12/JK/Hapus_KDP/DISDIK/2021	Mutasi Kurang aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berupa Gedung dan bangunan dalam pengerjaan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900/K.295.1/2021 tentang penetapan penghapusan BMD Pemerintah Kab. Malinau TA 2021	(1.505.840.800,00)
109	125/JK/Koreksi_SA/SETDA_UMUM/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap (alat laboratorium umum)	(2,00)
110	13/JK/AT/RSUD-APBD/2021	koreksi tambah aset jalan, jaringan dan irigasi atas mutasi dari BPKD	8.750.000,00
111	13/JK/BTT/KECMALUT/2021	Koreksi persediaan BTT atas mutasi dari BPKD	50.000.000,00
112	13/JK/Hapus_ARB/DISDIK/2021	Mutasi Kurang aset lain-lain (aset rusak berat) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900/K.295.1/2021 tentang penetapan penghapusan BMD Pemerintah Kab. Malinau TA 2021	(31.734.417,00)
113	16./JP/Mutasi_Persediaan/RSUD_APBD/2021	Penyesuaian atas persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (mutasi dari BPBD) TA 2021	2.098.815,00
114	16/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISPERINDAG/2021	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Umum	(1,00)
115	168/JK/Koreksi_SA/RSUD_BLUD/2021	Koreksi atas kesalahan pencatatan saldo awal penyisihan piutang berdasarkan surat pernyataan nomor: 900/257/KEU	664.731.557,80
116	17/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISPERINDAG/2021	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(1,00)
117	18./JP/Mutasi_Persediaan/RSUD_APBD/2021	Penyesuaian atas persediaan bantuan covid-19 (mutasi dari BPBD) TA 2021	743.087.363,00
118	18/JK/AT/DPUPR/2021	Koreksi kurang aset tetap KDP atas penghapusan aset tetap berdasarkan SK no. 900/K.167/2021	(12.212.574.500,00)
119	18/JK/Kor_Sawal_Ak_Penyusutan/DISPERINDAG/2021	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik	1,00
120	2/JP/Jasa-BTT/BPKD/2021	Penyesuaian belanja jasa atas BTT Covid 19 TA 2021	923.640.450,00
121	20/JK-BPK/BPBD/2021	Koreksi BPK atas lebih catat koreksi nilai persediaan dan kurang catat beban persediaan atas hibah ke Dinas Kesehatan (BPBD)	324.728.000,00
122	21/JK-BPK/DKPPKB/2021	Koreksi BPK atas kurang catat koreksi nilai persediaan dan lebih catat beban persediaan atas hibah dari BPBD (Dinas Kesehatan)	(324.728.000,00)
123	26/JK-BPK/DPUPR/2021	Koreksi BPK atas salah penganggaran belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah	290.662.220,00
124	26/JK/Koreksi_SA/PARIWISATA/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap (peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah)	15,00
125	27/JK-BPK/DPUPR/2021	Koreksi BPK atas salah penganggaran belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah	(290.662.220,00)
126	27/JK/Koreksi_SA/PARIWISATA/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap (bangunan gedung tempat pertemuan)	1,00
127	28/JK-BPK/DPUPR/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah lapangan terbang ke Dinas Perhubungan (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	(6.605.959,53)
128	28/JK/Koreksi_SA/PARIWISATA/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap (bangunan gedung tempat kerja lainnya)	(1,00)
129	29/JK-BPK/DPUPR/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja ke Dinas Kesehatan (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	(13.211.919,09)
130	29/JK/Koreksi_SA/PARIWISATA/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	1,00
131	30/JK-BPK/DPUPR/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal ke RSUD (belanja jasa	(6.605.959,53)





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
		pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	
132	31/JK-BPK/DPUPR/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja ke Kec. Bahau Hulu (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	(6.605.959,53)
133	32/JK-BPK/DPUPR/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja ke Dinas Pertanian (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	(6.605.959,53)
134	33/JK-BPK/DPUPR/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja ke Dinas Pendidikan (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	(66.059.595,45)
135	34/JK-BPK/Dishub/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah lapangan terbang dari DPUPR (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	6.605.959,53
136	340/JK/Koreksi/RSUD_BLUD/2021	Koreksi atas selisih verifikasi (kerugian piutang) BPJS Kesehatan Kab. Malinau tahun 2021 sebesar Rp66.340.700,00 dan BPJS Kesehatan COVID-19 2021 sebesar Rp14.323.400,00 berdasarkan surat pernyataan no. 900/257/keu TA 2021	(80.664.100,00)
137	341/JK/Koreksi/RSUD_BLUD/2021	Koreksi atas selisih verifikasi (kerugian piutang) BPJS Kesehatan Kab. Malinau 2020 sebesar Rp698.129.100,00 dan BPJS Kesehatan COVID-19 2020 sebesar Rp14.323.400,00 berdasarkan surat pernyataan no. 900/257/keu TA 2021	(712.452.500,00)
138	342/JK/Koreksi/RSUD_BLUD/2021	Koreksi atas berkurangnya saldo awal piutang pasien umum dengan surat hutang 2019 sebesar Rp458.400,00, BPJS dalam proses sebesar Rp268.370.900,00, PT. KPUC 2017-2018 sebesar Rp23.329.400,00 berdasarkan surat pernyataan no. 900/257/keu TA 2021	(292.158.700,00)
139	343/JK/Koreksi/RSUD_BLUD/2021	Koreksi atas bertambahnya saldo awal piutang BPJS Kesehatan Kab. Malinau (Obat Kronis) sebesar Rp6.400,00, BPJS Kesehatan Kab. Malinau 2020 sebesar Rp634.628.900,00 dan BPJS Ketenagakerjaan 2017, 2018, 2019 berdasarkan surat pernyataan no. 900/257/keu TA	634.638.200,00
140	344/JK/Koreksi/RSUD_BLUD/2021	Koreksi atas kurang catat BPJS Kesehatan COVID-19 2020 sebesar Rp1.136.266.700,00 berdasarkan surat pernyataan no. 900/257/keu TA 2021	1.136.266.700,00
141	35/JK-BPK/DKPKKB/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja dari DPUPR (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	13.211.919,09
142	36/JK-BPK/RSUD/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal dari DPUPR (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	6.605.959,53
143	37/JK-BPK/Kec.Bahau-Hulu/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja dari DPUPR (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	6.605.959,53
144	38/JK-BPK/Disperta/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja dari DPUPR (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	6.605.959,53
145	39/JK-BPK/Diknas/2021	Koreksi BPK atas mutasi aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja dari DPUPR (belanja jasa pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya masuk belanja modal karena menambah nilai aset tetap tanah)	66.059.595,45
146	4/JK/Persediaan-BTT/BPKD/2021	Koreksi atas mutasi persediaan (BTT) dalam penanganan covid-19 ke Bag. Umum	(21.093.717.480,00)
147	45/JK/KOSA-AT/DINSKAN/2021	koreksi saldo awal atas pembulatan Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	(1,00)
148	46/JK/KOSA-AT/DINSKAN/2021	koreksi saldo awal atas pembulatan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1,00
149	47/JK/KOSA-AT/DINSKAN/2021	koreksi saldo awal atas pembulatan Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	(1,00)
150	48/JK/KOSA-AT/DINSKAN/2021	koreksi saldo awal atas pembulatan Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	1,00
151	5/JK/Persediaan-BTT/BPKD/2021	Koreksi atas mutasi persediaan (BTT) dalam penanganan covid-19 ke Kec. Malinau Kota	(50.000.000,00)
152	55/JK/AT/DISHUB/2021	Mutasi Kurang Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus	(266.090.000,00)
153	56/JB/Pend/DISHUB/2021	Jurnal balik pendapatan diterima dimuka yang telah habis kontrak	1.741.511,50





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

NO	No. Bukti	Uraian	JUMLAH
154	57/JK/Koreksi_SA/ DISPERTAN/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin (general laboratory tool)	(1,00)
155	58/JK/Koreksi_SA/ DISPERTAN/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan (bangunan gudang)	2,00
156	59/JK/Koreksi_SA/ DISPERTAN/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan (bangunan gedung pemotong hewan)	1,00
157	6/JK/Persediaan- BTT/BPKD/2021	Koreksi atas mutasi persediaan (BTT) dalam penanganan covid-19 ke Kec. Malinau Utara	(50.000.000,00)
158	60/JK/Koreksi_SA/ DISPERTAN/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan (bangunan gedung tempat tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat peristirahatan)	(1,00)
159	61/JK/Koreksi_SA/ DISPERTAN/2021	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi (jembatan penyeberangan)	(1,00)
160	7/JK/Persediaan- BTT/BPKD/2021	Koreksi atas mutasi persediaan (BTT) dalam penanganan covid-19 ke Kec. Malinau Barat	(50.000.000,00)
161	8/JK/Persediaan- BTT/BPKD/2021	Koreksi atas mutasi persediaan (BTT) dalam penanganan covid-19 ke RSUD	(1.729.361.058,00)
162	9/JK/B.Modal- BTT/BPKD/2021	Koreksi atas mutasi aset tetap dari belanja modal (BTT) dalam penanganan covid-19 ke Bag. Umum	(465.172.500,00)
163	41/JK-BPK/BPKD/2021	Koreksi BPK atas kesalahan pencatatan beban penyisihan piutang pajak Kafetaria Dan Sejenisnya yang bebannya sudah tercatat di tahun sebelumnya	59.864,09
164	42/JK-BPK/BPKD/2021	Koreksi BPK atas kesalahan pencatatan beban retribusi daerah berupa piutang retribusi Rumah Makan Dan Sejenisnya/Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan yang bebannya sudah tercatat di tahun sebelumnya	16.861.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>(84.167.540.243,94)</b>

#### 5.4.4. Ekuitas Akhir

31 Desember 2021  
Rp4.607.075.845.953,27

31 Desember 2020  
Rp4.771.117.685.282,84

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.607.075.845.953,27 merupakan perubahan kurang dari nilai ekuitas di Tahun 2020 sebesar Rp4.771.117.685.282,84. Perubahan ekuitas Tahun 2020 disebabkan karena terjadinya:

1. Defisit LO sebesar Rp67.732.851.671,62, defisit yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp1.215.000.741.307,64 dengan beban sebesar Rp1.258.246.536.092,26, defisit kegiatan operasi sebesar Rp0,00; defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp0,00, dan defisit dari pos luar biasa sebesar Rp24.487.056.887,00; dan
2. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dari koreksi ekuitas sebesar (Rp96.308.987.657,95).

**Tabel 5.176 Ekuitas Akhir Tahun 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	4.771.117.685.282,84
SURPLUS/DEFISIT-LO	(67.732.851.671,62)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	(96.308.987.657,95)
<b>EKUITAS 2021</b>	<b>4.607.075.845.953,27</b>





## 5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan

<b>Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp163.842.357.024,91	<u>31 Desember 2020</u> Rp101.069.012.805,69
--	---	---

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) per 31 Desember 2021 sebesar Rp163.842.357.024,91 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp101.069.012.805,69. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) per 31 Desember 2021 dibandingkan SAL tahun 2020 akhir Terdapat kenaikan SAL sebesar Rp62.773.344.219,22. Laporan Perubahan SAL tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>5.5.1. Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<u>1 Januari 2021</u> Rp101.069.012.805,69	<u>1 Januari 2020</u> Rp89.878.830.078,84
---	---	--

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.069.012.805,69 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran selama Tahun Anggaran 2021. Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp89.878.830.078,84.

<b>5.5.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp100.581.169.024,69	<u>31 Desember 2020</u> Rp86.623.856.246,51
---	---	--

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021, sebesar Rp100.581.169.024,69.

<b>5.5.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<u>31 Desember 2021</u> (Rp487.843.781,00)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp3.254.973.832,33)
--	---	---

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp487.843.781,00.

<b>5.5.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)</b>	<u>31 Desember 2021</u> Rp163.842.357.024,91	<u>31 Desember 2020</u> Rp101.069.012.805,69
---	---	---

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2021 sebesar Rp163.842.357.024,91 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2020 sebesar Rp101.069.012.805,69. Rincian sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp163.842.357.024,91 disajikan pada **Tabel 5.177**.

**Tabel 5.177 Rincian SiLPA**

(dalam rupiah)

SILPA TA 2021		SILPA TA 2020	
URAIAN	NILAI	URAIAN	NILAI
Kas di Kas Daerah	152.813.870.813,56	Kas di Kas Daerah	92.914.312.006,69
Kas di Bendahara Penerimaan	2.518.000,00	Kas di Bendahara Penerimaan	97.229.350,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	216.256.900,00	Kas di Bendahara Pengeluaran	366.037.939,00
Kas di BLUD	10.380.231.254,81	Kas di BLUD	6.367.029.845,00



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

SILPA TA 2021		SILPA TA 2020	
URAIAN	NILAI	URAIAN	NILAI
Kas Dana BOS	76.639.000,00		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	351.960.583,54		
Kas Lainnya	55.501,00	Kas Lainnya	1.323.578.693,00
Piutang PFK 2016 (dapat dilihat di Simda Keuangan TA 2016 no.Bukti: 02d/JK/lebih setor/BPKAD-PPKD/2016; 03d/JK/lebih bayar/BPKAD-PPKD/2016; 21/JK-BPK/PPKD/2016; 01e/JK/Utang PFK/PPKD/2018; 01f/JK/UtangPFK/PPKD/2018)	880.473,00	Piutang PFK 2016 (dapat dilihat di Simda Keuangan TA 2016 no.Bukti: 02d/JK/lebih setor/BPKAD-PPKD/2016; 03d/JK/lebih bayar/BPKAD-PPKD/2016; 21/JK-BPK/PPKD/2016; 01e/JK/Utang PFK/PPKD/2018; 01f/JK/UtangPFK/PPKD/2018)	880.473,00
Sisa Dana Hibah/Bansos 2015	(55.501,00)	Sisa Dana Hibah/Bansos 2015	(55.501,00)
<b>SILPA TA 2021</b>	<b>163.842.357.024,91</b>	<b>SILPA TA 2020</b>	<b>101.069.012.805,69</b>





## 5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas

Sebelum masuk ke dalam Penjelasan atas Laporan Arus Kas Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021, perlu diperhatikan bahwa terjadi *Restatement* atas Nilai Kas BUD dalam Laporan Arus Kas Tahun 2019. *Restatement* ini merupakan hasil daripada pengkajian ulang terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 4 dan PSAP nomor 13 Paragraf 119. Setelah Pengkajian ulang Kas BUD yang terdapat pada Laporan Arus Kas Kabupaten Malinau terdiri dari Kas di Kas Daerah, Saldo Dana Kapitasi, Kas Badan Layanan Umum Daerah, dan Kas Bendahara Pengeluaran dengan Tujuan agar dapat dikomparasi antara Tahun 2021 dan 2020. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

### 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

**31 Desember 2021**  
Rp167.512.179.806,22

**31 Desember 2020**  
Rp169.040.717.608,18

Arus Kas dari aktivitas operasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp167.512.179.806,22 dan tahun 2020 sebesar Rp169.040.717.608,18, disajikan pada **Tabel 5.178**.

**Tabel 5.178 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31/12/2021	Per 31/12/2020
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	13.866.537.016,00	10.103.027.404,00
Retribusi Daerah	2.405.711.534,00	1.444.868.069,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.503.009.671,36	3.250.680.716,62
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	55.129.172.676,68	50.425.712.099,77
Dana Alokasi Umum	779.926.601.361,00	784.353.307.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak	41.240.548.202,00	34.979.905.378,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	143.298.047.839,00	188.473.396.312,00
Dana Alokasi Khusus	108.405.677.011,00	139.655.161.723,00
Penerimaan Dana Penyesuaian (DID)	19.625.186.000,00	21.601.351.000,00
Dana Desa	171.145.649.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	48.631.549.939,90	43.149.023.138,12
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	12.183.140.910,47	9.713.509.370,34
Pendapatan Hibah	2.511.000.000,00	2.935.000.000,00



Uraian	Per 31/12/2021	Per 31/12/2020
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	18.035.254.000,00	172.468.153.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk (I)</b>	<b>1.419.907.085.161,41</b>	<b>1.462.553.095.210,85</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Belanja Pegawai	505.155.869.372,00	481.304.058.967,00
Belanja Barang dan Jasa	369.096.865.284,19	370.723.697.307,67
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	2.393.507.500,00	1.881.918.000,00
Bantuan Sosial	2.694.382.502,00	3.909.543.425,00
Hibah	20.696.504.236,00	82.927.885.974,00
Bagi Hasil Pajak ke Desa	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	326.779.385.000,00	313.606.773.000,00
Belanja Tak Terduga	25.292.777.495,00	38.892.325.734,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	285.613.966,00	266.175.195,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar (II)</b>	<b>1.252.394.905.355,19</b>	<b>1.293.512.377.602,67</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Operasi (I-II)</b>	<b>167.512.179.806,22</b>	<b>169.040.717.608,18</b>

Dari tabel di atas secara total kas dari aktivitas operasi untuk penerimaan kas terdapat penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp1.528.537.801,96 dengan cara membandingkan antara penerimaan dan pengeluaran kas. Kenaikan atas arus kas bersih dari kegiatan operasi itu dikarenakan meningkatnya penerimaan daerah melalui Pajak Daerah dan penerimaan lainnya baik dari pusat maupun Provinsi dibandingkan jumlah pengeluaran kas.

#### 5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

**31 Desember 2021**  
(Rp101.644.124.237,00)

**31 Desember 2020**  
(Rp151.682.944.147,00)

Arus kas dari aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun Anggaran 2021 menunjukkan arus kas bersih sebesar (Rp101.644.124.237,00) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp151.682.944.147,00). Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan disajikan pada **Tabel 5.179**.



**Tabel 5.179 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan  
TA 2021 dan 2020**

Uraian	Per 31/12/2021	Per 31/12/2020
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Belanja Tanah	0,00	78.305.181,00
Belanja Peralatan dan Mesin	54.902.417.219,00	25.538.565.860,00
Belanja Gedung dan Bangunan	15.011.522.950,00	50.360.093.912,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.695.745.068,00	74.974.715.067,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.034.439.000,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	731.264.127,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar (II)</b>	<b>101.644.124.237,00</b>	<b>151.682.944.147,00</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Non Keuangan (I-II)</b>	<b>(101.644.124.237,00)</b>	<b>(151.682.944.147,00)</b>

Berdasarkan tabel di atas terjadinya penurunan atas arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan di Tahun 2021 lebih kecil dibanding Tahun 2020 sehingga turun sebesar Rp50.038.819.910,00 dan penurunan anggaran untuk belanja aset yang disediakan merupakan salah satu pengaruh dari penurunan tersebut.

**5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**                      **31 Desember 2021**                      **31 Desember 2020**  
(Rp3.000.000.000,00)                      (Rp3.000.000.000,00)

Arus Kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi tuntutan (klaim) pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp3.000.000.000,00). Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan disajikan pada **Tabel 5.180**.

**Tabel 5.180 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31/12/2021	Per 31/12/2020
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	150.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000.000,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	150.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar (II)</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>153.000.000.000,00</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Pembiayaan (I-II)</b>	<b>(3.000.000.000,00)</b>	<b>(3.000.000.000,00)</b>



**5.6.4. Arus Kas Dari Aktivitas  
Transitoris/Non Anggaran**

**31 Desember 2021**  
**Rp0,00**

**31 Desember 2020**  
**Rp0,00**

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran merupakan aktivitas yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran, oleh karena itu terhadap transaksi ini tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Jumlah Arus Kas bersih dari arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dan Arus Kas bersih dari arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 disajikan pada **Tabel 5.181**.

**Tabel 5.181 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran  
TA 2021 dan 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Per 31/12/2021	Per 31/12/2020
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.256.353.092,00	56.368.867.372,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk (I)</b>	<b>66.256.353.092,00</b>	<b>56.368.867.372,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.256.353.092,00	56.368.867.372,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar (II)</b>	<b>66.256.353.092,00</b>	<b>56.368.867.372,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dapat diketahui bahwa saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp163.841.532.052,91 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp101.068.187.833,69, dengan rincian pada **Tabel 5.182**.

**Tabel 5.182 Rincian Kenaikan/Penurunan kas Tahun 2021 dan 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Per 31/12/2021	Per 31/12/2020
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	62.868.055.569,22	14.357.773.461,18
Saldo Awal Kas di BUD, Bend. Pengeluaran, BLUD, Dana BOS	100.970.902.982,69	86.611.021.667,51
Saldo Akhir Kas di BUD, Bend. Pengeluaran, BLUD, Dana BOS	163.838.958.551,91	100.968.795.128,69
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	2.518.000,00	97.229.350,00
Saldo Kas Saldo Akhir Kas Lainnya	55.501,00	2.163.355,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>163.841.532.052,91</b>	<b>101.068.187.833,69</b>

Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, Dana BOS tahun anggaran 2021 sebesar Rp100.970.902.982,69, hal ini berbeda dengan saldo akhir Kas di BUD, Bend. Pengeluaran, BLUD, Dana BOS tahun anggaran 2020 sebesar Rp100.968.795.128,69. Selisih Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran,



BLUD, Dana BOS tahun anggaran 2021 dan Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, Dana BOS tahun anggaran 2020 sebesar Rp Rp2.107.854,00. Selisih dikarenakan reklas saldo awal jagir JKN sebesar Rp2.107.854,00 ke Kas Dana Kapitasi pada FKTP, dimana pada tahun anggaran 2020 tercatat pada Kas Lainnya.





---

## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1. Penetapan Manajemen Selama Tahun Berjalan

Pada tahun 2021 tidak ada perubahan struktural secara signifikan, hanya terjadi mutasi pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun pegawai, walaupun terdapat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau namun disaat itu bertepatan dengan wacana perubahan pejabat struktural yang disesuaikan menjadi fungsional yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.

### 6.2. Penerapan Kebijakan

Menindaklanjuti berlakunya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah telah menyusun Rancangan Peraturan yang merupakan turunan dari permendagri tersebut, yang telah di proses di Provinsi Kalimantan Utara hingga awal Tahun 2022, sehingga di dalam penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

### 6.3. Pengungkapan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Malinau, yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Malinau yang merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, dengan ibukota berkedudukan di Malinau, memiliki luas wilayah  $\pm 39.766,33$  km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir dan Kecamatan Sungai Tubu.

Kabupaten Malinau secara geografis terletak di wilayah bagian utara Kalimantan Utara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia yaitu negara bagian





Serawak di sebelah Barat. Wilayah Kabupaten Malinau berada di daerah tropis dengan posisi geografis  $1^{\circ}21'36''$  sampai dengan  $4^{\circ}10'55''$  Lintang Utara dan  $114^{\circ}35'22''$  sampai dengan  $116^{\circ}50'55''$  Bujur Timur dengan Luas wilayah sekitar 39.766,33 km<sup>2</sup> yang didominasi oleh wilayah daratan. Secara administratif Kabupaten Malinau berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur (Serawak).

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menjalankan program unggulan baik pelayanan publik, pendidikan maupun peningkatan perekonomian rakyat seperti Rumah Sakit Bergerak Langap, RT Bersih, Wajib Belajar 9 Tahun dan Beras Daerah (Rasda) ditambah dengan program Desa Sarjana.

Program unggulan Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu RT Bersih merupakan kelanjutan Program Gerdema yang merupakan kelanjutan program Kepala Daerah sebelumnya namun ditambah dengan beberapa program inovasi lainnya salah satunya program Desa Sarjana.

Wajib belajar 9 tahun menjadikan pendidikan dasar mulai PAUD, TK, SD hingga SMU kepada anak-anak guna mewujudkan sumber daya manusia yang diharapkan mampu bersaing secara global kedepannya.

Beras Daerah (Rasda) adalah beras yang dihasilkan oleh petani Malinau yang dikemas oleh Perusda Intimung untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang juga bermanfaat meningkatkan akses pasar dan pendapatan petani.

Pemerintah Daerah melalui Perusda Intimung mensubsidi harga jual beras sehingga hasil produk dari beras tersebut dapat terjangkau daya beli masyarakat dan produk beras tersebut dapat bersaing dengan produk beras dari luar.

Di saat pandemi Covid-19 ini, *refocusing* anggaran dilakukan guna penanganan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kabupaten Malinau sebesar Rp41.113.219.587,00 dengan realisasi sebesar Rp36.215.868.910,00 atau 88,09% yang dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran				Realisasi			
		Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Sumber Pendanaan		Jumlah	%
		DAU	DBH			DAU	DBH		
I	Perlindungan Sosial	27.802.431.847,00	82.250.600,00	27.884.682.447,00	67,82%	27.481.051.247,00	79.927.000,00	27.560.978.247,00	98,84%
II	Dukungan Ekonomi	7.128.773.475,00	6.099.763.665,00	13.228.537.140,00	32,18%	4.015.504.588,00	4.639.386.075,00	8.654.890.663,00	65,43%
	<b>Total Jumlah</b>	<b>34.931.205.322,00</b>	<b>6.182.014.265,00</b>	<b>41.113.219.587,00</b>	<b>100%</b>	<b>31.496.555.835,00</b>	<b>4.719.313.075,00</b>	<b>36.215.868.910,00</b>	<b>88,09%</b>





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

---

Selain *merefocusing* anggaran guna menggiatkan pemulihan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malinau juga masih menerapkan kebijakan-kebijakan publik walaupun penyebaran virus COVID-19 telah menurun, antara lain razia masker, pemberlakuan Belajar Dari Rumah (BDR) bagi siswa dan *Work From Home* (WFH) bagi aparat pemerintah.





## BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 ini merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, guna memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

- 1) Realisasi Pendapatan Daerah selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.419.812.373.811,41 atau 104,58% dari anggaran sebesar Rp1.357.613.033.544,00 yang realisasinya berasal dari:
  - Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp74.809.719.548,04 atau 157,67%
  - Pendapatan Transfer sebesar Rp1.324.456.400.263,37 atau 102,47%; dan
  - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp20.546.254.000,00 atau 116,15%.

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.353.551.185.811,19 atau 92,98% dari anggaran sebesar Rp1.455.682.046.350,00 dengan realisasi terdiri dari:

- Belanja Operasi sebesar Rp900.121.416.079,19 atau 91,68%;
- Belanja Modal sebesar Rp101.357.607.237,00 atau 91,17%; dan
- Belanja Tak Terduga sebesar Rp25.292.777.495,00 atau 70,36%.

Realisasi Belanja Transfer berupa Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp326.779.385.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp326.779.385.000,00, yang merupakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp171.145.649.000,00 dan dana RT Bersih yang diperuntukkan bagi seluruh RT se Kabupaten Malinau sebesar Rp99.060.000.000 serta Rp56.573.736.000 merupakan dana Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).

Pembiayaan *netto* sebesar Rp97.581.169.024,69 adalah jumlah antara penggunaan SiLPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp100.581.169.024,69 ditambah dengan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya sebesar Rp0,00 serta dikurangi dengan penyertaan pengeluaran investasi non permanen lainnya sebesar Rp0,00 dan dikurangi pengeluaran penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebesar Rp3.000.000.000,00

Dengan menjumlahkan antara surplus anggaran sebesar Rp66.261.188.000,22 dan pembiayaan *netto* sebesar Rp97.581.169.024,69 maka pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp163.842.357.024,91

- 2) Laporan Operasional (LO) secara keseluruhan terdapat defisit sebesar Rp67.732.851.671,62 yang terdiri atas:
  - Pendapatan - LO sebesar Rp1.215.000.741.307,64;





- Beban sebesar Rp1.258.246.536.092,26;
  - Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00;
  - Pos Luar Biasa sebesar Rp24.487.056.887,00.
- 3) Jumlah Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di dalam Neraca sampai akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp4.646.632.706.352,17 yang terdiri dari:
- Aset:
- Aset Lancar sebesar Rp220.768.607.560,90;
  - Investasi Jangka Panjang sebesar Rp117.826.468.355,30;
  - Aset Tetap sebesar Rp4.206.146.899.449,22;
  - Aset Lainnya sebesar Rp101.890.730.986,75.
- Kewajiban dan Ekuitas:
- Kewajiban sebesar Rp39.556.860.398,90;
  - Ekuitas sebesar Rp4.607.075.845.953,27.
- 4) Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp4.607.075.845.953,27 merupakan perubahan penurunan dari nilai ekuitas di tahun 2020 sebesar Rp4.771.117.685.282,84. Perubahan ekuitas tahun 2021 disebabkan karena terjadinya:
- Defisit LO sebesar Rp67.732.851.671,62 defisit yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp1.215.000.741.307,64 dengan beban sebesar Rp1.258.246.536.092,26, defisit kegiatan operasi sebesar Rp43.245.794.784,62; defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp0,00, pos luar biasa sebesar Rp24.487.056.887,00.
  - Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp96.308.987.657,95
- 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) per 31 Desember 2021 sebesar Rp163.842.357.024,91
- 6) Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan dan non anggaran, dan pada tahun 2021 terdapat kenaikan kas sebesar Rp62.868.055.569,22 dengan rincian sebagai berikut:
- Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp167.512.179.806,22;
  - Arus Kas Dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan sebesar (Rp101.644.124.237,00)
  - Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan sebesar (Rp3.000.000.000,00) dan;
  - Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebesar Rp0,00.





**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021**  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

---

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 secara keseluruhan.

